

info Pasti

MEDIA INFORMASI PENGADAAN DAN ASET TERKINI

INFO PASTI | EDISI XIII | 2024



*“Transformasi tata kelola aset Kemenkeu sangat diperlukan,
dalam upaya perbaikan ekosistem pengelolaan aset.”*

Edy Gunawan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PUBLIKASI MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN KEMENTERIAN KEUANGAN



Foto Sampul
Much Hari Cahyo

“Kaleidoskop”

Cover Story

Kami menggunakan foto kamera instax sebagai ilustrasi yang menggambarkan alat untuk merekam memori yang telah terjadi sepanjang tahun 2024.

Alamat Redaksi

Gedung Juanda II Lantai 15-17,
Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Pasar Baru,
Sawah Besar, Jakarta Pusat (10710)

Saluran Bantuan

- ☎ 134
- ☎ +6281283676760 (Helpdesk LPSE)
- ✉ kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
- 🌐 www.kemenkeu.go.id

Ikuti Kami

@pastikanasetkita

Diterbitkan oleh Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan | **Penanggung Jawab:** Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Edy Gunawan | **Pimpinan Redaksi:** Kepala Bagian Manajemen Teknis, Data dan Informasi, Anwar Djunaidi | **Redaktur Pelaksana:** Kepala Subbagian Kerja Sama dan Komunikasi, Yulia Candra Kusumarini | **Tim Redaksi:** Muhammad Ibnu Sujono, Tyta Hanistia Rizkimada, Dwi Citra Lestari, Much Hari Cahyo | **Redaktur Foto:** Much Hari Cahyo & M. Ibnu Sudjono | **Desain Grafis dan Layout:** Much Hari Cahyo & Muhammad Ibnu Sudjono | **Ilustrator:** Much Hari Cahyo

DAFTAR ISI

LAPORAN UTAMA

12 Membangun Masa Depan : Transformasi Perkantoran dan Hunian ASN

INFO ASET

16 Pemenuhan Kebutuhan Hunian Pegawai : Realitas, Rencana, dan Harapan

20 Tentang Rusunara Kemenkeu Jayapura

24 Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sarpras Kementerian Keuangan untuk *New Ways of Working* yang Semakin Menyala

28 Menakar PNPB dari Sektor Platform Digital Milik Pemerintah

32 IKN, Cita-Cita atau Fakta ?

36 Ketika Engkau Pergi, Lantas Bagaimana Nasibku?

40 Pensertipikatan BMN Berupa Tanah

44 Mengurai Tantangan Pengelolaan Aset Bermasalah dan Rumah Negara

48 Optimalisasi Barang Rampasan Negara untuk Pengurangan Biaya Sewa Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan

50 Sensus Belum Usai, Sebelum Catatan Selesai

52 *Mrintilin* Printilan Master Aset

54 Laporan Wasdal BMN : Pekerjaan yang *muspro*?

INFO PENGADAAN

56 Penguatan Ekosistem Pengadaan Yang Inklusif : Transformasi Digital Pengadaan

60 Mengapa Marak Banting Harga pada Tender Konstruksi Pemerintah?

62 Mitigasi Risiko pada Sistem *E-Purchasing*

66 Antara Proteksi dan Liberalisasi Pelajaran dari Korea Selatan, Brazil, dan Indonesia

70 Kemenkeu Dukung Gernas BBI/BBWI Tahun 2024

INFO LAIN

74 *Personal Branding* Melalui Media Sosial : Menciptakan *Image* yang Konsisten di Media Sosial

76 *Fomo* Dalam Pengambilan Keputusan

78 Membentuk Kekuatan, Membangun Kesehatan : Rahasia *Weight Training* Untuk Hidup Yang Lebih Baik

84 Kenapa Harus Liburan ke Dieng?

88 Rammang-Rammang, Wisata Eksotis di Maros.

INFO EVENT

90 Setjen Road to HORI

INFO FOTOGRAFI

92 Kontributor Fotografi



Kata Pengantar

Salam hangat Sobat Aset dan Pengadaan,

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaleidoskop adalah aneka peristiwa yang telah terjadi yang disajikan secara singkat. Majalah Info PASTI Edisi XIII kali ini mengangkat tema “Kaleidoskop,” yang mencerminkan keragaman dan dinamika dalam pengelolaan aset serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kaleidoskop tidak hanya menggambarkan berbagai warna dan bentuk, tetapi juga melambangkan perubahan dan inovasi yang terus menerus. Dalam konteks manajemen aset dan pengadaan, kita menyaksikan banyak perkembangan yang signifikan, baik dari segi kebijakan, teknologi, maupun praktik terbaik dilapangan.

Kami mengajak pembaca untuk mengeksplorasi berbagai artikel, ulasan, dan studi kasus yang telah kami siapkan. Setiap halaman menyimpan kisah dan pelajaran berharga yang dapat kita ambil untuk memperkuat pengelolaan barang milik negara yang optimal serta mempercepat proses pengadaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Akhir kata, melalui majalah ini kami berharap dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kinerja dan transparansi.

Semoga bermanfaat, dan selamat membaca.

a.n.
Tim Redaksi Majalah Info PASTI

REKAM PERISTIWA 2024

26 JANUARI | PENATAAN KAWASAN

Menkeu Tinjau Lokasi Penataan Kawasan Hunian Denpasar

Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Edy Gunawan mendampingi Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal dan Kepala BPPK dalam kegiatan Kunjungan kerja Menteri Keuangan dalam rangka peninjauan lokasi Penataan kawasan untuk hunian pegawai dan pemenuhan sarana pelatihan diklat Kementerian Keuangan di provinsi Bali.



1 FEBRUARI | PENATAAN KAWASAN

Peresmian Rusunara Kemenkeu Jayapura

Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Edy Gunawan mendampingi Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Jenderal KemenPUPR dalam kegiatan Peresmian Rumah Susun Negara (Rusunara) Kemenkeu di Kota Jayapura.



5 FEBRUARI | PENATAUSAHAAN

Sosialisasi Sensus BMN Non-KIB Tahun 2024

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan menggelar kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman yang sama mengenai tata cara dan urgensi pelaksanaan sensus BMN non KIB serta untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM dalam menjalankan tugas pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara.





7 MARET | PENGELOLAAN BMN

Serah Terima Barang Rampasan Negara KPK Kepada Kemenkeu

Lewat Mekanisme PSP-Hibah, KPK Serahkan Barang Rampasan Negara kepada Kemenkeu yang bermanfaat dalam upaya memenuhi kebutuhan gedung kantor satuan kerja Kemenkeu, mengurangi gedung kantor kemenkeu yang masih melakukan sewa, serta memenuhi kebutuhan hunian rumah negara tanpa membebani APBN.

12 JUNI | PENATAAN KAWASAN

Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Kawasan Kemenkeu

Penataan kawasan Gedung Kantor dan Hunian serta Kendaraan ini untuk pemenuhan kebutuhan seluruh satker dalam rangka optimalisasi aset dan perbaikan layanan Kemenkeu Satu di Kementerian Keuangan. Pembiayaan melalui DIPA murni, SBSN, dan KPBU serta kerja sama dengan KemenPUPR.



5 JULI | PENGELOLAAN BMN

Serah Terima Aset Properti Eks BLBI

Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Edy Gunawan mewakili Kementerian Keuangan dalam acara penandatanganan berita acara serah terima (BAST) aset properti eks BLBI dari Kemenko Polhukam kepada Kementerian Keuangan, dihadiri oleh Menko Polhukam dan Menteri Keuangan.



9 JULI | PENGELOLAAN BMN

Penyerahan Dokumen Kepemilikan Aset Negara

Aset dimaksud berupa 5 (lima) bidang tanah di Rangkasbitung, Lebak dengan luas total 43.130m². Tanah dengan dokumen kepemilikan atas nama Departemen Keuangan yang sebagiannya dikuasai oleh pihak lain, diserahkan kembali kepada Kementerian Keuangan.



22 AGUSTUS | PENGELOLAAN BMN

Serah Terima BMN Yang Berasal dari Barang Rampasan Negara

KPK menyerahkan BMN yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Kemenkeu berupa 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Depok yang akan dibangun gedung kantor KPP Pratama Depok Cimanggis dan KPP Pratama Depok Sawangan, Jawa Barat dan 8 (delapan) rumah di Kota Bandar Lampung yang akan digunakan sebagai rumah dinas Kemenkeu Satu.



2-4 SEPTEMBER | PENGADAAN BMN

Training of Trainers (ToT) Aplikasi Dalam Rangka Peningkatan ITKP dan P3DN

Kegiatan ini bertujuan mengawal pencatatan informasi capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) untuk indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan serta Pengenalan Aplikasi SIMPEL-NG dan Manajemen Kontrak.





16-17 OKTOBER | PERENCANAAN

Forum Penelitian RKBMN

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selalu Pengguna Barang melaksanakan rangkaian kegiatan Forum Penelitian RKBMN Tahun 2026. Melalui kegiatan ini, dilakukan pembahasan one-on-one atas usulan RKBMN yang telah disampaikan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

28 NOVEMBER | HARI ANTI KORUPSI

Penguatan Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi

Dalam menyongsong Hari Antikorupsi Sedunia(Hakordia) 2025, Biro Manajemen BMN dan pengadaan selalu terus berupaya untuk memperkuat budaya integritas dan budaya anti korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengelola aset negara.



21 OKTOBER | PENGEMBANGAN STRATEGI

& KINERJA

Perumusan Kebijakan tentang Tarif Rusunara

Pembahasan Perumusan Kebijakan tentang Tarif Rumah Susun Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan dibahas secara komprehensif bersama dengan Kemenkumham, Kemenko Ekon, Setkab, dan KemenPUPR demi mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), yaitu dengan terdapat payung hukum setiap melakukan pengenaan tarif.



5 DESEMBER | PENGELOLAAN

Kunjungan Bank Indonesia Terkait Pengelolaan Kendaraan Dinas

Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas Bank Indonesia, melakukan kunjungan ke Biro Manajemen BMN dan Pengadaan dalam rangka *Sharing Session* terkait pengelolaan kendaraan dinas yang telah diimplementasikan di Biro Manajemen BMN dan Pengadaan.



22 NOVEMBER | KEBIJAKAN PBJ

Pemaparan Kertas Kebijakan Akuntabilitas dan Pengawasan Publik

Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan kajian terhadap penilaian kinerja penyedia dengan judul "Penilaian Kinerja Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah: Upaya Akuntabilitas dan Pengawasan Publik (Perbandingan dengan Amerika Serikat dan Kanada).



12-13 DESEMBER | PENGELOLAAN

Kunjungan Lapangan Pembangunan Kompleks Kawasan Renon

Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan mendampingi Wakil Menteri Keuangan I dan Sekretaris Jenderal dalam kegiatan Kunjungan Lapangan Pembangunan Kompleks Kawasan Renon, Bali.



REKAM PENGHARGAAN 2024

25 JANUARI | PENGHARGAAN

Konsisten Terapkan ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan terima penghargaan dari British Standards Institution Indonesia atas konsistensi penerapan ISO/IEC 27001:2013 *Information Security Management System*. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan telah tersertifikasi ISO/IEC 27001:2013 oleh BSI Client sejak tahun 2012.



17 MEI | PENGHARGAAN

Kementerian/Lembaga dengan Potensi Kerjasama Terbesar

Kementerian Keuangan mendapatkan penghargaan Inabuyer Awards 2024 untuk kategori Potensi Kerjasama Terbesar Untuk Kementerian/Lembaga pada *Closing Ceremony* Inabuyer B2B2G Expo 2024 yang dihadiri oleh Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM dan Ketua Umum HIPINDO.



7 MARET | PENGHARGAAN

K/L dengan Anggaran Belanja Terbesar

Dalam Kegiatan *Business Matching* Tahap VII, Kementerian Keuangan mendapatkan anugerah Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Tahun 2024 sebagai salah satu dari 3 Kementerian/Lembaga Terbaik dalam kategori Lembaga Negara dan dan Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Terbesar.

10 OKTOBER | PENGHARGAAN

Kepala UKPBJ Berprestasi Tahun 2024

Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan menerima penghargaan sebagai Kepala UKPBJ Berprestasi Kategori Kementerian/Lembaga dan Booth Terfavorit Kategori "Swargaloka Metaverse Pengadaan" dalam Rakor SDM dan Kelembagaan PBJ Tahun 2024 yang diselenggarakan LKPP.



4-7 MARET | PENGHARGAAN

Tercapainya Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif)

Dalam kegiatan pembentukan mentor kematangan UKPBJ Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta pada 4 s.d 7 Maret 2024, Kementerian Keuangan menerima penghargaan atas tercapainya Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif).



05 DESEMBER | Penghargaan

Anugerah Reksa Bandha

Kementerian Keuangan berhasil memenangkan 2 penghargaan pada acara dimaksud, yaitu Juara I Kategori Utilisasi Barang Milik Negara Kelompok III dan Juara I Penjual Lelang Noneksekusi Kelompok I pada Anugerah Reksa Bandha 2024.

Membangun Masa Depan : Transformasi Perkantoran dan Hunian ASN

Penulis : Edy Gunawan

Tonggak sejarah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dimulai pada saat diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang melandasi pengelolaan keuangan negara termasuk di dalamnya mengatur mengenai pengelolaan BMN. Dalam pelaksanaan pengelolaan BMN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur pengelolaan BMN di lingkungan Kemenkeu melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Transformasi tata kelola aset Kemenkeu sangat diperlukan dalam upaya perbaikan ekosistem pengelolaan aset. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, bahwa BMN mencerminkan peradaban suatu negara untuk menghargai apa yang telah dibangun, bahkan BMN dapat mengindikasikan nilai dan karakter suatu bangsa. Pesan tersebut menjelaskan bahwa aset yang diamankan kepada kita menjadi salah satu aspek yang perlu diberikan perhatian serius. Kemenkeu menyadari betul urgensi ini dan menjadikan aset sebagai bagian dari upaya perbaikan ekosistem kerja.

Foto : Dokumentasi Biro Umum



Edy Gunawan,

Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

Program Penataan Kawasan Perkantoran Melalui Gedung Kolaborasi

Pandemi Covid-19 mendorong Kemenkeu untuk mengoptimalkan penggunaan BMN melalui transformasi tata ruang kerja dari *cubicle* menjadi *open space* dengan konsep *Activity Based Workplace (ABW)* diantaranya *non dedicated seat, clean desk, mobile working and remote working, collaborative environment* dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.01/2020 menjadi dasar pelaksanaan ABW, yang mengubah pola pikir penggunaan aset menjadi lebih terintegrasi antar unit kerja di Kemenkeu dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BMN, serta menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan produktif.

Pada tahun 2020, penggunaan gedung kantor berfokus pada optimalisasi dengan penataan ruang kerja berkonsep ABW untuk memenuhi kebutuhan satuan kerja (satker) yang belum memiliki gedung kantor sendiri atau masih menyewa. Mulai tahun 2023, penggunaan gedung kantor tidak hanya melihat optimalisasi, tetapi juga memperhatikan aspek kolaborasi sebagai pendorong peningkatan kinerja Kemenkeu serta perkembangan UMKM dengan konsep penataan kawasan perkantoran.

Penataan kawasan perkantoran dilakukan dengan prinsip Kemenkeu Satu, yang menekankan kolaborasi penggunaan aset gedung kantor untuk memenuhi kebutuhan satuan kerja yang belum memiliki

gedung kantor sendiri atau masih menyewa. Sekretaris Jenderal menekankan bahwa dalam perbaikan ekosistem kerja, budaya Kemenkeu Satu harus diwujudkan secara konkret dalam Penataan Kawasan Perkantoran dan Hunian. Sementara, Biromadan melalui Program Penataan Kawasan Perkantoran telah menyusun Tim Teknis yang dibagi per-wilayah untuk berkoordinasi dengan satker di daerah terkait validitas data dan kesepakatan rencana penataan aset pada masing-masing wilayah.

Strategi Gedung Kolaborasi merupakan salah satu bentuk program Penataan Kawasan Perkantoran dan Hunian yang diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan gedung kantor melalui penggunaan bersama gedung kantor dengan satker yang belum memiliki gedung kantor atau masih sewa, sehingga dapat mengurangi biaya sewa dan meningkatkan efisiensi anggaran. Implementasi gedung kolaborasi juga termasuk penyediaan ruang layanan tunggal (*Single Front Office*) yang mencakup seluruh layanan Kemenkeu, yang diharapkan akan memudahkan stakeholder dalam mengakses layanan pada Kemenkeu. Konsepsi program penataan kawasan perkantoran disusun untuk dapat diimplementasikan dalam periode lima tahun mulai tahun 2024 sampai dengan 2028 dengan lini masa (*roadmap*) sebagaimana Gambar di bawah.

Saat ini, Kemenkeu memiliki kebutuhan gedung kantor untuk 113 satker yang belum mempunyai ruang kerja pada gedung kantor sendiri. Berdasarkan roadmap yang telah digambarkan pada Gambar di bawah, permasalahan dimaksud secara optimis

Penataan Kawasan Perkantoran



diperkirakan dapat diselesaikan sampai dengan tahun 2028 dan diharapkan akan menimbulkan berbagai dampak positif sebagai berikut: (1) Pengurangan biaya sewa atas 99 satker sebesar Rp338.916.203.111 (2) Pengurangan penggunaan sementara/pinjam pakai atas 14 satker Kemenkeu (2 satker yang masih berkantor dengan menggunakan gedung kantor K/L lain dan 12 satker Kemenkeu yang masih berkantor dengan meminjam pakai gedung kantor Pemda). (3) Pengalihan fungsi dari gedung kantor untuk pemenuhan kebutuhan hunian melalui optimalisasi penggunaan gedung kantor sebanyak 207 unit gedung/ bangunan.

Program Penataan Kawasan Hunian : Mengatasi Tantangan Hunian ASN

Hunian menjadi salah satu penunjang kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama bagi ASN yang mendapat penugasan jauh dari kampung halaman baik yang sudah berkeluarga maupun

belum berkeluarga. Kurangnya ketersediaan hunian yang layak dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan ASN mulai dari faktor ekonomi hingga faktor kesehatan baik fisik maupun mental yang akan berdampak pada penurunan produktivitas dan kualitas kerja ASN sehingga akan berdampak juga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

Penataan kawasan hunian tidak hanya bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung kualitas hidup penghuninya. Dalam mencapai tujuan ini, beberapa faktor penting harus diperhatikan, seperti penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi yang memadai sangat penting untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Selain itu, kawasan hunian harus mudah diakses dengan transportasi umum dan memiliki konektivitas yang baik ke pusat-pusat kegiatan seperti tempat kerja, sekolah, dan layanan

kesehatan. Penyediaan taman dan ruang terbuka hijau, sistem keamanan yang efektif, serta integrasi prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam pembangunan hunian.

Saat ini, Kemenkeu menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan rumah dinas bagi ASN di lingkungannya. Kemenkeu membutuhkan sebanyak 45.174 unit hunian, sedangkan data per 31 Desember 2022, hanya 10.008 unit yang dapat digunakan dari total 10.458 unit yang dimiliki oleh Kemenkeu, sehingga terdapat kekurangan hunian sebanyak 35.166 unit. Kemenkeu telah berupaya sejak tahun 2003 untuk mengatasi masalah ini dengan berbagai cara, termasuk pembangunan rumah dinas baru dan renovasi rumah dinas yang sudah ada. TA 2023 telah dilaksanakan upaya pemenuhan sebanyak 344 unit, sehingga sisa kekurangan hunian per oktober 2024 ini berkurang menjadi sebanyak 34.822 unit.

Untuk mengatasi kekurangan



Ilustrasi : Tim Renon

kebutuhan hunian tersebut, beberapa rencana strategi yang telah disusun dan dapat diterapkan yakni (1) Pembangunan hunian tapak dan asrama (2) pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun negara (rusunara) (3) peningkatan kualitas hunian yang sudah ada melalui program revitalisasi, rehabilitasi, dan renovasi (4) kerjasama penyediaan hunian dengan K/L lain melalui kerjasama pembangunan rusunara dengan KemenPUPR, alih status rumah negara dengan K/L lain, hibah dari Pemda, dan alih status barang rampasan dari KPK dan BLBI, (5) Penyediaan infrastruktur yang memadai seperti jalan, air bersih, dan listrik di kawasan perumahan baru untuk memastikan hunian yang layak.

Standarisasi Identitas Perkantoran dalam Pengelolaan BMN untuk Membangun Corporate Identity di Kementerian Keuangan

Corporate Identity adalah representasi visual dan konseptual dari suatu organisasi yang mencerminkan nilai, visi, misi, dan karakteristik uniknya. Penegakan *corporate identity* melalui artefak BMN diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki organisasi, membentuk persepsi positif, merawat loyalitas pegawai, memupuk semangat, dan meningkatkan produktivitas kerja. Selain itu, artefak BMN juga diharapkan mampu mengkomunikasikan nilai dan visi organisasi serta membangun *brand awareness*.

Dalam KMK Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, diatur mengenai standarisasi identitas perkantoran

yang merupakan atribut yang melekat pada BMN berupa tanah dan/atau bangunan untuk menampilkan ciri khas Kemenkeu, meliputi spesifikasi, jumlah, dan tata cara pemasangan Identitas Kementerian, Identitas Satuan Kerja, Identitas Kantor Pelayanan, Papan Nama, dan Plat Nama. Melalui standarisasi artefak BMN ini, diharapkan mampu menumbuhkan budaya Kemenkeu Satu serta membantu mengkomunikasikan nilai-nilai, keyakinan, dan identitas organisasi baik kepada anggota internal maupun pemangku kepentingan eksternal.

Secara keseluruhan, program penataan kawasan perkantoran dan hunian ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan sarana prasarana yang layak, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta mewujudkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel.



Pemenuhan Kebutuhan Hunian Pegawai : Realitas, Rencana, dan Harapan

Penulis : Indra Zulfa Riansyah

Sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan pokok manusia. Semua orang membutuhkan ketiga hal ini dalam menjalankan kehidupannya. Dalam berorganisasi, Pegawai Kementerian Keuangan dihadapkan pada tantangan untuk bekerja di kota yang bisa jadi bukan homebase pegawai bersangkutan. Sehingga kebutuhan hunian berupa 'papan' atau tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

Kebutuhan hunian ini menjadi perhatian Pimpinan Kementerian Keuangan yaitu antara lain arahan dalam *Leaders Offset Meeting* (LOM) pada tanggal 19-20 Januari 2024 di Kota Malang mengenai penyiapan dan penguatan data gedung kantor dan rumah negara yang layak, serta kendaraan operasional bagi pegawai Kementerian Keuangan melalui penataan kawasan perkantoran, hunian, dan kendaraan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melakukan penataan kawasan, perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip umum yaitu:

1. Perencanaan mengikuti aturan Standar Barang dan Standar Kebutuhan;
2. Penggunaan aset berdasarkan pertimbangan penggunaan secara bersama sebagai aset Kemenkeu;
3. Implementasi diutamakan melalui skema optimalisasi aset eksisting;
4. Penataan mencerminkan kolaborasi Kemenkeu Satu.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan merupakan batas tertinggi yang menjadi

pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun perencanaan kebutuhan BMN. Dalam penyusunan konsepsi penataan kawasan di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu untuk mengedepankan prinsip Kemenkeu Satu, sehingga perhitungan kebutuhannya melihat jumlah pegawai Kementerian Keuangan di kota bersangkutan dengan hunian eksisting tanpa membedakan unit Eselon I maupun Satuan Kerja.

Pada umumnya, hunian pegawai berbentuk Rumah Negara maupun Mess. Namun, seiring perkembangan zaman dan mempertimbangkan lahan yang terbatas, terdapat alternatif dalam pemenuhan kebutuhan hunian berupa Rumah Susun Negara atau Rusunara dan Apartemen/Flat. Berdasarkan Laporan Barang Pengguna Kementerian Keuangan TA 2023 audited, Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebanyak 10.419 (rincian pada ilustrasi halaman berikutnya). Berdasarkan data pada ilustrasi, terlihat bahwa Rumah Negara merupakan mayoritas solusi pemenuhan kebutuhan hunian pegawai Kementerian Keuangan. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Rumah Negara Golongan I atau dikenal sebagai Rumah Jabatan merupakan rumah negara yang digunakan oleh jabatan tertentu, sedangkan Rumah Negara Golongan II dapat digunakan oleh Pegawai Negeri aktif.

Hunian berupa mess terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Rumah Negara berupa Mess/Asrama dan Mess/Asrama/Bungalow/Tempat Peristirahatan. Kedua kelompok mess ini dipisahkan oleh fungsi penggunaannya. Rumah Negara berupa Mess. Asrama harus memenuhi kriteria mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh PNS dan apabila telah berhenti (pensiun) rumah dikembalikan kepada Negara; dan/atau berfungsi sebagai hunian sementara bagi beberapa pegawai negeri (beserta/ tidak beserta keluarganya). Sedangkan Mess/Asrama/Bungalow/Tempat Peristirahatan adalah hunian sementara pegawai, dapat berdasarkan Surat Tugas baik Diklat maupun penugasan lain yang memiliki jangka waktu tertentu, merupakan hunian sementara yang dapat disewakan kepada pegawai dan/atau pihak umum berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Memperhatikan kuantitas hunian di atas dan apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai Kementerian Keuangan yaitu sekitar 79 ribu orang, maka terdapat gap kekurangan kebutuhan yang sangat besar. Kebutuhan hunian ini dapat dipenuhi dengan strategi antara lain:

1. Optimalisasi aset eksisting yaitu dengan melakukan alih fungsi Gedung Kantor ataupun Rumah Negara Golongan I/II menjadi Rumah Negara berupa Mess/Asrama; perbaikan rumah negara yang kondisinya rusak; serta penertiban penghunian rumah negara.



2. Penambahan unit hunian baru baik berupa rumah tapak, Rumah Negara berupa Mess/Asrama, maupun Rumah Susun Negara (Rusunara).

Terbatasnya lahan menimbulkan alternatif solusi pemenuhan kebutuhan hunian dengan pembangunan Rumah Susun Negara atau dikenal dengan Rusunara. Rusunara merupakan rumah susun yang dimiliki oleh negara yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pejabat dan/atau pegawai negeri.

Bagi pegawai yang tidak menempati rumah negara, Rusunara dapat menjadi solusi

memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak huni dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tarif sewa yang terjangkau. Sebagai perbandingan, dalam luasan tanah yang sama, Rusunara dapat digunakan oleh lebih banyak pegawai. Tarif sewa Rusunara juga lebih rendah dibandingkan sewa rumah pada umumnya sehingga tidak memberatkan pegawai yang menempatinnya. Manfaat lain Rusunara dari sisi manajemen risiko, yaitu Rusunara memiliki potensi permasalahan lebih sedikit dibandingkan rumah negara. Permasalahan rumah negara seperti dikuasai pihak ketiga, tidak ditempati karena rusak/rawan kriminalitas, dan berada di lokasi langganan banjir, kecil kemungkinan terjadi pada Rusunara.

Pada saat ini, Kementerian Keuangan memiliki 7 unit Rusunara yang berada di kota Pantoloan (Sulawesi Tengah), Medan (Sumatera Utara), Palembang (Sumatera Selatan), Denpasar (Bali), Jayapura (Papua), Merauke (Papua Selatan), dan Jakarta. Selain itu, juga sedang dilaksanakan pembangunan Rusunara di Kemanggisan (Jakarta), Denpasar (Bali), dan Balikpapan (Kalimantan Timur).

Pada awalnya, pembangunan Rusunara dimulai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan pembangunan Rusunara di kota Pantoloan, Medan, dan Palembang pada tahun 2016-2017. Rusunara Pantoloan dicatat oleh PSO BC Tipe B Pantoloan sebanyak 2 unit tower dengan jumlah satuan rumah susun

(sarusun) sebanyak 41 unit yang selesai dibangun pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, juga selesai dibangun Rusunara Medan yang dikelola oleh Kanwil DJBC Sumatera Utara berupa 1 unit tower dengan jumlah sarusun sebanyak 12 unit. Kemudian pada tahun 2017, selesai dibangun Rusunara Palembang yang dicatat oleh Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur berupa 1 unit tower dengan jumlah sarusun sebanyak 64 unit. Selain itu, Rusunara Denpasar berlokasi di Jalan Imam Bonjol Perumahan Graha Kencana dicatat oleh KPTIK BMN Denpasar, berupa 1 unit tower dengan 40 unit sarusun.

Pada Tahun 2022, Kementerian Keuangan menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program pembangunan hunian bersama berupa Rusunara yang diperuntukkan bagi pegawai Kemenkeu. Program kerja sama penyediaan hunian bersama pegawai Kemenkeu tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Menteri PUPR dan Menteri Keuangan. Nota Kesepahaman Bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Perumahan Kementerian PUPR dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Sebagai langkah nyata, terdapat 2 (dua) lokasi pembangunan Rusunara Kemenkeu yaitu di Jayapura dan Merauke yang selesai pembangunannya pada tahun 2023. Rusunara Jayapura dicatat oleh GKN Jayapura berupa 1 unit tower dengan 44 unit sarusun. Rusunara Merauke juga memiliki spesifikasi yang sama yaitu 1 unit tower dengan 44 unit

sarusun. Pembangunan Rusunara ini merupakan gabungan upaya dari Kementerian PUPR dan Kemenkeu. Rusunara ini memiliki fasilitas penunjang berupa area parkir, pos satpam, lapangan olahraga, ruang genset, front office/lobby, ruang serba guna, kamar mandi umum, mushala, ruang pengelola, dan ruang pompa air. Adapun spesifikasi di dalam unit sarusun yaitu 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dan dapur serta dilengkapi dengan tempat tidur, lemari, sofa, meja makan, meja tamu, AC split, kompor, dan vertical blind.

Dengan dilakukannya berbagai strategi di atas, diharapkan kebutuhan hunian yang layak untuk pegawai Keuangan dapat makin terpenuhi. Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik merupakan perwujudan dari nilai-nilai Kementerian Keuangan.

"Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip."

- Jusuf Kalla -

Tentang Rusunara Kemenkeu Jayapura

Penulis : Much Hari Cahyo

Rumah Susun Negara (Rusunara) Kementerian Keuangan di Kota Jayapura, diresmikan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PUPR (diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR) pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 di Kota Jayapura. Rusunara Kemenkeu Jayapura dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan hunian bagi pegawai Kementerian Keuangan di Kota Jayapura. Rusunara ini terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan jumlah hunian sebanyak 44 (empat puluh empat) unit hunian. Setiap hunian terdiri dari 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi/toilet, 1 (satu) ruang dapur dan laundry serta 1 (satu) ruang tamu/ruang keluarga. Selain unit hunian sebagai ruang utama, terdapat beberapa ruang penunjang lainnya seperti ruang resepsionis, ruang serbaguna, ruang pengelola, toilet umum dan mushola yang terletak di lantai 1.

Penghuni merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan di Kota Jayapura baik yang sudah berkeluarga

JAYAPURA



Foto : Much Hari Cahyo

maupun lajang. Saat ini, Rusunara Kemenkeu Jayapura dihuni oleh total 64 (enam puluh empat) pegawai dari Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, Kanwil DJPB Papua, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, KPPBC TMP C Jayapura, KPPN Jayapura, KPKNL Jayapura dan KPP Pratama Jayapura. Demi menunjang kenyamanan penghuni, rusunara dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang seperti tempat parkir kendaraan bermotor yang luas dan teduh, ruang genset sebagai cadangan supply listrik, tempat pembuangan sampah, tempat penampungan air dan lapangan badminton sebagai sarana olahraga para penghuni rusunara. Selain itu demi menjaga keamanan penghuni, rusunara dilengkapi dengan CCTV di beberapa sudut bangunan, pos keamanan yang dijaga oleh 7 (tujuh) satuan pengamanan yang bergantian jaga selama 24 jam, serta pagar beton setinggi ±2,5 meter yang dilengkapi dengan kawat berduri. Rusunara Kemenkeu Jayapura dibangun pada lokasi yang sangat strategis, berada dekat dengan pusat fasilitas sosial seperti pasar, sekolah, perbankan, kantor kepolisian, puskesmas dan rumah sakit, hingga pusat sarana hiburan/olahraga.

Berdasarkan hasil kunjungan Tim Publikasi Biro Manajemen BMN dan Pengadaan pada tanggal 29 s.d. 30 Juli 2024, meskipun kondisi bangunan telah menunjukkan beberapa kondisi yang memerlukan perbaikan seperti mesin pompa air yang sering macet karena tersumbat tanah kapur, lampu taman yang mati/putus, biaya listrik hingga dinding yang retak dan rembes, kehadiran Rusunara Kemenkeu Jayapura ditanggapi sangat positif oleh para penghuni yang sebagian besar merupakan pegawai yang berasal dari luar Kota Jayapura.



Foto : Much Hari Cahyo

Beberapa fasilitas penunjang yang tersedia di Rusunara adalah hydrant dan APAR yang tersebar di beberapa titik.



Foto : Ibnu Sudjono

Terdapat fasilitas Toilet umum, Musholla, Ruang Serbaguna, dan Ruang Pengelola di Lantai 1



Foto : Much Hari Cahyo

Fasilitas keamanan berupa Pos Keamanan yang dijaga oleh 7 security secara bergantian 24/7, selain itu CCTV dan pemasangan pagar beton dengan kawat duri.



Foto : Ibnu Sudjono

Fasilitas penunjang lainnya berupa lapangan badminton dan juga halaman yang bisa dijadikan sebagai jogging track.



Foto : Much Hari Cahyo

Tempat penampungan sampah, tempat penampungan air dan ruang genset untuk supply listrik cadangan



Foto : Much Hari Cahyo

Lahan parkir yang cukup luas untuk dapat menampung kendaraan roda dua dan roda empat para penghuni.



Foto : Ibnu Sudjono

"meskipun masih perlu adanya perbaikan disana-sini, namun dengan adanya Rusunara, sangat membantu dan menjawab kebutuhan pegawai terkait dengan tempat tinggal dengan fasilitas yang lebih menjamin keamanan pegawai terutama bagi mereka yang telah berkeluarga dan memiliki anak kecil".

Fajar Nurrohman,
KPPBC TMP C Jayapura



Foto : Ibnu Sudjono

"kehadiran rusunara sangat membantu pegawai baik dari sisi keuangan, kenyamanan hingga keamanan. Lebih hemat biaya, lebih aman jadi merasa tenang ketika harus meninggalkan anak dan istri dirumah, dekat dengan pasar, sekolah, kantor polisi, dan fasos lainnya. Harapannya rusunara dapat diperbanyak diberbagai wilayah".

Husein Akbar,
Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku

"dengan adanya rusunara sangat membantu, terutama sosialisasi keluarga dan keamanan keluarga. Semoga kedepannya fasilitasnya dapat ditambah dengan adanya fasilitas bermain anak".

Salah satu Keluarga Pegawai yang menghuni Rusunara



Foto : Ibnu Sudjono

"dalam rangka menambah kenyamanan pegawai, akan diadakan bus jemputan untuk mengantar para pegawai dari dan ke Kantor"

Erik Romansah,
KPPN Jayapura selaku PPK dan Pengelola Rusunara Kemenkeu Jayapura

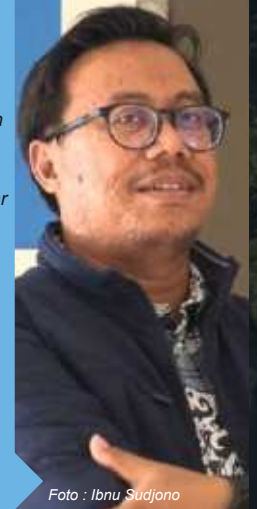


Foto : Ibnu Sudjono

Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 "**Rumah Susun Negara, yang selanjutnya disebut Rusunara, adalah Rumah Susun yang dimiliki negara yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pejabat dan/atau pegawai negeri**"

kehadiran Rusunara Kemenkeu Jayapura selain menjadi tempat tinggal bagi para pegawai juga menjadi wadah untuk bersosialisasi antar pegawai dari setiap unit eselon I yang ada di Kota Jayapura. Selain itu, dibangunnya rusunara juga menjadi salah satu solusi atas kebutuhan hunian pegawai Kemenkeu di Kota Jayapura, sehingga diharapkan

mampu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pegawai ASN Kemenkeu di Kota Jayapura.

Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sarpras Kementerian Keuangan untuk *New Ways of Working* yang Semakin Menyal

Penulis : Korry Febriani

Organisasi yang berhasil harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi perubahan. Tak terkecuali Kementerian Keuangan yang selalu mendorong inovasi dan keberanian untuk mencoba hal baru. Ketika dunia menghadapi Pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan beradaptasi dengan mendorong percepatan transformasi budaya melalui penerapan pola-pola kerja baru untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dalam menjaga kinerja dan pelaksanaan tugas.

Konsep *New Ways of Working* (NWOW) muncul sebagai pendekatan inovatif untuk menghadapi tantangan dunia saat itu. Sebagaimana pernyataan Menteri Keuangan pada 24 Agustus 2022 dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang menyatakan bahwa “Penerapan NWOW yang diadopsi oleh Kementerian Keuangan dengan



Foto : Much Hari Cahyo

melakukan integrasi secara hybrid memanfaatkan kemajuan teknologi digital selama masa pandemi covid-19, dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas baik dari sisi anggaran, proses bisnis, hingga di dalam penggunaan aset”. NWOW ini juga sejalan dengan program bersama Kemenkeu Satu untuk mencapai sistem dan budaya kerja lebih terbuka dan fleksibel serta mendorong kolaborasi antar unit sehingga dapat tercipta organisasi yang lebih gesit dan dinamis dalam usaha mewujudkan Kemenkeu Satu.

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Keuangan telah membuat percepatan implementasi NWOW melalui strategi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang sejalan dengan transformasi nilai-nilai budaya yang diharapkan. Penggunaan aset secara optimal, pengaturan tata ruang yang efektif dan efisien, pengaturan zona ruang berdasarkan aktivitas, peningkatan sinergisitas dan penghilangan silo-silo antar unit melalui penggunaan aset bersama menjadi program Kementerian Keuangan untuk mewujudkan hal tersebut.

Fleksibilitas Bekerja Melalui Activity Based Workplace (ABW) dan Co-Working Space (CWS)

Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang kolaboratif melalui konsep ABW di Lingkungan Kementerian Keuangan mencerminkan konsep desain ruang kerja yang memungkinkan pegawai maupun organisasi secara fleksibel memilih tata letak dan zona ruang yang sesuai dalam menunjang berbagai aktivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi. Sifat keterbukaan budaya Kemenkeu Satu juga dapat terwujud

dengan penghilangan sekat-sekat pembatas seperti bilik kantor melalui pembangunan CWS yang dapat meningkatkan sinergi sehingga tidak adanya pembatas pada interaksi antar pegawai.

Dengan CWS juga memungkinkan setiap pegawai menggunakan ruang kerja maupun ruang rapat secara bersama sesuai dengan lokasi dan kapasitas ruang yang dibutuhkan. Hal ini juga sejalan dengan dengan kebijakan *Flexible Working Space* (FWS) yang mengatur pola kerja pegawai dengan fleksibilitas lokasi bekerja tidak terbatas pada kantor asal saja karena dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pegawai dapat tetap terhubung, berkolaborasi, dan menjalankan tugasnya dengan produktif dan tetap memperhatikan ketentuan dan kewajiban atas tugas dan kinerja pegawai.

Penggunaan Gedung Kantor Bersama

Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan optimalisasi aset yang baik, Kementerian Keuangan senantiasa mendorong penggunaan aset secara bersama. Untuk penggunaan gedung kantor misalnya, dengan menerapkan konsep ABW dimana penggunaan ruang kerja menjadi lebih optimal, maka optimalisasi ruang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bagi unit lain yang kekurangan atau bahkan belum memiliki gedung kantor sendiri.

Berikut beberapa unit kerja pada Kementerian Keuangan yang dapat diupayakan untuk efisiensi biaya sewa gedung kantor atas hasil optimalisasi ruang kerja dengan menggunakan konsep ABW:

1. Sekretariat KNEKS (optimalisasi

- Gedung Djuanda II)
- 2. LNSW (optimalisasi Gedung Syarifudin Prawiranegara)
- 3. LDKPI (optimalisasi Gedung Sutikno Slamet)
- 4. LPDP (optimalisasi Gedung JB Sumarlin)
- 5. BPDPKS (optimalisasi Gedung Surachman)

Penggunaan gedung kantor bersama merupakan konsep penggunaan yang dilakukan oleh beberapa unit dalam satu gedung atau area kantor dengan memperhatikan perhitungan kebutuhan dan karakteristik ruang kerja masing-masing unit. Penggunaan gedung kantor bersama memungkinkan unit-unit tersebut juga menggunakan fasilitas yang sama seperti listrik, air, internet, dan pemeliharaan gedung. Konsep ini ideal demi tercapainya efisiensi yang lebih besar atau pengurangan biaya operasional dibandingkan dengan melakukan sewa kantor atau pemborosan akibat penggunaan gedung dengan luasan yang jauh berlebih dibandingkan dengan kebutuhan. Penggunaan gedung kantor bersama juga memungkinkan interaksi antara unit atau organisasi yang berbeda yang dapat mendorong kolaborasi, pertukaran ide, dan membangun jaringan yang lebih luas antar unit.

Penghunian Rumah Negara Kementerian Keuangan

Penggunaan aset bersama juga tercermin pada penghunian rumah negara dimana tiap Kawasan rumah negara dapat diisi oleh pegawai dari berbagai Unit Eselon I yang berbeda. Konsep ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan rumah negara dengan memperbolehkan pejabat dari satu unit Eselon I untuk menempati

rumah dinas yang dimiliki oleh Eselon I lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan penggunaan bersama ini, banyak keuntungan yang dapat dirasakan baik oleh pegawai maupun organisasi, diantaranya:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan hunian pegawai.
2. Rumah negara yang tidak dihuni dapat digunakan oleh pegawai unit lain sehingga tidak ada rumah negara yang idle.
3. Dengan memanfaatkan rumah negara yang tersedia, dapat mengurangi kebutuhan anggaran untuk penyediaan fasilitas perumahan baru.
4. Menghilangkan silo-silo, hubungan, komunikasi, dan kolaborasi sehingga dapat memperkaya perspektif dalam menjalankan tugas antar Unit Eselon I.



Foto : Much Hari Cahyo

Penggunaan kendaraan operasional melalui pooling system

Penggunaan kendaraan operasional melalui *pooling system* merupakan pengelolaan kendaraan secara terpusat oleh satu unit yang membidangi pengelolaan Barang Milik Negara. Sistem ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi jumlah kendaraan

yang digunakan, serta upaya optimalisasi bagi unit yang memiliki kendaraan operasional melebihi Standar Spesifikasi dan Standar Kebutuhan (SBSK).

Pooling system dapat diimplementasikan melalui:

1. *Car-pooling*, Kendaraan operasional dikelola secara terpusat dan dapat digunakan oleh siapa saja sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Sistem ini memungkinkan pegawai untuk mendapatkan akses yang lebih mudah dan cepat untuk menggunakan kendaraan yang tersedia sehingga dapat meningkatkan produktivitas.
2. *Ride-sharing*, Berbagi penggunaan kendaraan untuk perjalanan dari dan ke tempat kerja, contohnya : mobil antar-jemput (*shuttle*) dari suatu titik kumpul di dekat kediaman

menuju kantor dan sebaliknya, mobil antar-jemput pegawai dari kantor ke stasiun kereta terdekat dengan penjadwalan tertentu agar semua pegawai dapat berkumpul di waktu yang sama.

Dengan *pooling system* ini diharapkan dapat mendorong ketertiban penggunaan kendaraan operasional sesuai dengan

ketentuan, memungkinkan terciptanya efisiensi akibat pengurangan biaya bahan bakar dan pemeliharaan. Dengan pendekatan yang tepat, maka *pooling system* kendaraan juga dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi kebutuhan transportasi dan efisiensi penggunaannya. Namun demikian, implementasi *pooling system* ini memerlukan kematangan persiapan pada setiap unit karena terkait dengan kesediaan lahan parkir dan jarak antar unit (terutama untuk unit satuan kerja yang saling berjauhan).



Foto : Much Hari Cahyo

Penerapan Gedung Kantor Ramah Lingkungan

Striving for excellence adalah sebuah keharusan. Kementerian Keuangan tidak berpuas diri dan selalu melakukan perbaikan terus menerus dengan melakukan terobosan baru dalam mencapai potensi terbaik yang bernilai tambah dalam pengelolaan aset. Salah satu yang dilakukan adalah Kementerian Keuangan

mendorong keberlanjutan dan kelestarian lingkungan melalui penerapan kantor ramah lingkungan dalam pengembangan sarana dan prasarana Kementerian Keuangan.

Hal tersebut telah diimplementasikan pada gedung kantor pada kantor pusat Kementerian Keuangan dan ke depannya akan diimplementasikan pada gedung kantor satuan kerja lainnya. Adapun sarana dan prasarana dirancang hendaknya berfokus pada integrasi prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek desain, tata ruang dan pengelolaan gedung. Untuk mewujudkan gedung kantor ramah lingkungan, berikut beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

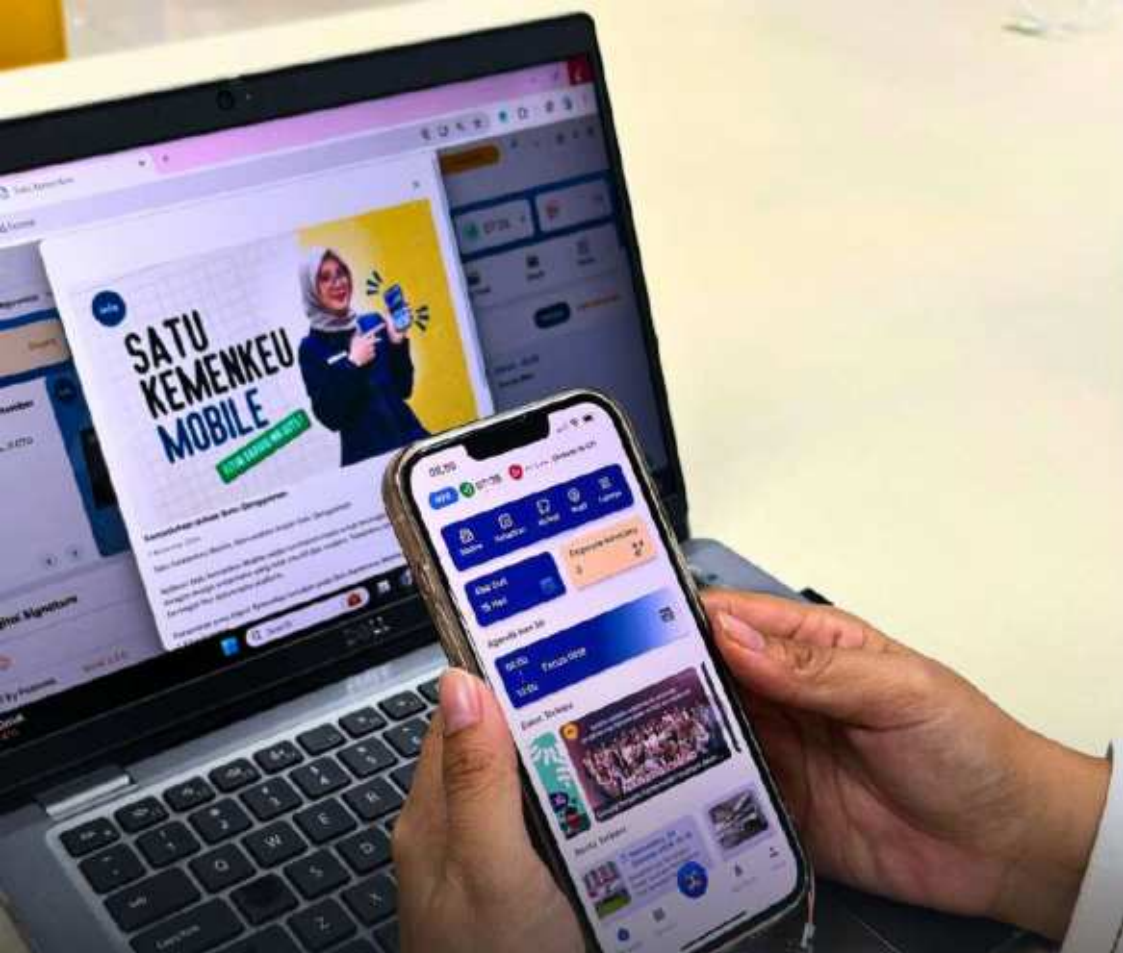
1. Penghematan energi listrik melalui penataan ruang kerja yang mendukung optimalisasi pencahayaan alami untuk mengurangi penggunaan lampu, implementasi teknologi hemat energi seperti lampu LED dengan sensor otomatis.
2. Penghematan penggunaan air dengan memasang keran, toilet, dan shower yang dirancang untuk mengurangi konsumsi air.
3. Penggunaan teknologi digital dalam korespondensi untuk mengurangi penggunaan kertas.
4. Pengelolaan sampah dengan cara memilah sampah dan penerapan sistem daur ulang dan pengurangan limbah kantor.
5. Penyediaan charging station di area kantor dalam hal telah menerapkan penggunaan kendaraan dengan energi terbarukan seperti kendaraan listrik untuk mobil dan motor, serta mendorong penggunaan sepeda atau motor Listrik bagi

- pegawai.
- 6. Pemasangan panel surya sebagai alternatif sumber energi Listrik.
- 7. Penyediaan tempat parkir sepeda dan shower pada kamar mandi kantor untuk mendorong penggunaan sepeda dari/ke kantor.
- 8. Pengaturan tata ruang luar gedung dengan cara menyediakan area hijau untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mental pegawai, pembangunan taman atap dan nursery untuk mendukung penyediaan tanaman di lingkungan kantor.

Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut, gedung kantor ramah lingkungan tidak hanya mendukung keberlanjutan, tetapi juga berkontribusi pada kelestarian lingkungan dan terciptanya lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif bagi penghuninya.



Foto : Ibnu Sudjono



Menakar PNBP dari Sektor Platform Digital Milik Pemerintah

Penulis : Dimpos T. Simamora
Foto : Much Hari Cahyo

Esensi dan Peranan Platform Digital

“At least 40% of all businesses will die in the next 10 years... if they don't figure out how to change their entire company to accommodate new technologies.”
– John Chambers, Executive

Chairman of Cisco System. Kalimat tersebut bukan isapan jempol karena begitu kuatnya teknologi mempengaruhi peradaban manusia. Sejak ditemukannya listrik, komputer dan internet, terjadi disrupsi perilaku dengan perkuliahan/seminar/rapat dan dunia maya untuk pencarian

informasi, hiburan, bertransaksi dan pelaksanaan pekerjaan yang berdampak pada peradaban yang terdigitalisasi. Seseorang ditempat tidur mampu membeli dan mengirimkan barang/jasa, mengisi formulir, mengikuti kegiatan bahkan bekerja secara bersamaan

hanya dengan perangkat gadget yang terkoneksi dengan internet. Teknologi digital melalui platform digital ini membuat semakin efektif dan efisien aktivitas karena pengiriman data, dokumen dan informasi yang cepat, lengkap dan seketika menembus ruang dan waktu dengan cara yang mudah dan sangat praktis. Karenanya, entitas apapun akan mati atau minimal tidak diketahui peradaban jika tidak mengikuti perkembangan teknologi terkhusus dunia digital.

Bagi pemerintah, peranan platform digital sangat besar yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, mensosialisasikan dan meningkatkan kualitas kebijakan, mengamplifikasi kinerja pemerintah dan mempertinggi fungsi pengawasan dan pengendalian dimana seluruhnya dilaksanakan dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Dampak jangka panjang yang dirasakan yaitu semakin tingginya kepercayaan masyarakat pada pemerintah sehingga nama baik (*goodwill*) pemerintah semakin tinggi dan terjaga. Oleh karenanya, banyak pejabat dan instansi negara mulai dari presiden sampai dengan pejabat terkecil secara terus menerus menyampaikan informasi-informasi yang penting kepada publik.

Mengingat pentingnya peranan digitalisasi, baru-baru ini, pemerintah melalui presiden meluncurkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kegunaan SPBE ini salah satunya yaitu menjadi wadah komunikasi pemerintah yang holistik ketika menjalankan fokus kehumasan. Dengan demikian, sampai dengan saat ini, pemerintah belum menjadi “pemain” untuk meraup uang di bisnis digital. Pemerintah hanya berdiri pada

sisi kebijakan untuk para pebisnis meskipun mengetahui besarnya potensi monetisasi tersebut. Tulisan ini akan mengupas potensi seandainya negara mau menjadi pelaku bisnis termasuk tantangan yang akan menyertainya.

Potensi PNBP Platform Digital di Indonesia

Menurut Harvard Business School, platform digital adalah model-model bisnis yang menggunakan infrastruktur daring untuk memfasilitasi interaksi antara kelompok. Platform digital terdiri dari: Pertama, Media sosial. Media sosial adalah jejaring yang paling populer bersifat online dimana para pengguna biasanya diberikan user dan password untuk saling berinteraksi dan berbagi. *Facebook, youtube, instagram, whatsapp, tiktok, we chat, telegram, snapchat, twitter, pinterest, reddit* dan *linkedin* adalah contoh media sosial yang populer saat ini. Kedua yaitu *electronic Commerce (e-commerce)*. Platform digital *e-commerce* digunakan untuk mempertemukan penjual dan pembeli atau pihak yang berkepentingan secara daring sehingga tidak perlu bertatap muka. Bentuk *e-commerce* diklasifikasikan menjadi 3 yaitu *Business to Business (B2B)*, *Business to Customer (B2C)* dan *customer to customer (C2C)*. *Indogrosir, ralali.com, Mbiz.co.id, dan AXIQoe.com, tokopedia, blibli, amazon, bukalapak, lazada dan ebay* adalah contoh model ini.

Ketiga, *E-government*, merupakan model elektronik pada 3 (tiga) bidang yaitu *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)* atau sebaliknya, dan *Government to Citizen (G2C)*.

Pertumbuhan platform digital terlihat dari pertumbuhan pengguna internet. Berdasarkan data bank dunia, dalam 20 tahun terakhir Indonesia mengalami peningkatan pengguna internet secara terus menerus dimana lompatan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 ke 2015 yaitu dari 17,14% dari total jumlah penduduk menjadi 22,07% ditahun 2015 dan pada tahun sepanjang pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, persentase pengguna internet Indonesia yaitu 69,21% dari total penduduk Indonesia, lebih tinggi dari persentase dunia (67,4% dari populasi dunia) dan Afrika (Afrika timur dan selatan:34,9%, Afrika barat dan tengah:39,4%, dan negara sub Sahara:36,7%). Meskipun tinggi, Indonesia masih kalah dengan negara-negara ASEAN lainnya yaitu Brunei Darussalam (98,97%), Malaysia (97,69%), Singapura (94,29%), Thailand (89,54%) dan Vietnam (78,08%).

Tingginya pertumbuhan internet tersebut sejalan juga dengan peningkatan pendapatan platform digital. Pendapatan yang dapat diterima, bersumber dari: Pertama, iklan (*adsense*), merupakan pendapatan yang diterima oleh pemilik akun yang dibayarkan oleh mesin pencari berdasarkan per klik (*cost per click*), per mil (*cost per mile*) dan per impresi (*revenue per impression*) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kedua, kegiatan afiliasi pemasaran yaitu akun platform digital melakukan kerjasama kepada produsen untuk membantu penjualan barang dan jasa dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama. 5 (lima) *e-commerce* yang memberi komisi terbesar yaitu niaga hoster (komisi

70%), shopee dan tokopedia (komisi 10%), JD.ID (komisi 5%) dan blibli (komisi 4%). Ketiga, *Endorsement* merupakan kegiatan memberikan rekomendasi atau dukungan pada suatu produk dan jasa oleh pemilik akun dengan bayaran tertentu sesuai dengan kesepakatan (tarif *endorsement* kendall jenner sebesar Rp19miliar per postingan, Cristiano ronaldo sebesar Rp 33miliar per postingan).

Keempat, pengikuk langganan berbayar yaitu menjadi anggota khusus/premium dengan berlangganan dengan nilai langganan yang ditawarkan pemilik akun. Kelima, penjualan barang dan jasa. Pemilik akun dapat menjual barang dan jasa yang diproduksi sendiri oleh pemilik akun sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya sewa, listrik dan air serta biaya *overhead* lainnya terkait penyewaan tersebut. Keenam, donasi. Penghasilan donasi tidak menentu tergantung pada kualitas konten dan jumlah pelanggan yang mengikuti siaran langsung tersebut. Ketujuh, sewa sebagian ruang. Sewa ruangan merupakan kegiatan penyewaan ruangan biasa namun objek sewanya yaitu ruang/space yang tidak digunakan di platform digital tersebut.

Melihat banyaknya sumber pendapatan tersebut, bukan kepastian negara mendapatkan triliunan rupiah jika aktif sebagai konten kreator akun platform digital. Di detik.com, Ridwan Kamil selaku gubernur Jawa Barat pernah berkata "Coba Pak Jokowi bikin YouTube, contoh instruksi presiden 250 juta rakyat Indonesia subscribe YouTube presiden kan bisa dapat (*adsense*) puluhan miliar per bulan, Atta Halilintar lewat. Itu adalah cara

baru menghasilkan income secara murah meriah, cuma modal *subscribe*. Seandainya pimpinan memerintahkan adanya gerakan nasional monetisasi platform youtube secara terstruktur dan masif oleh seluruh pejabat sampai dengan unit terendah di pemerintah pusat dimana meminta rakyat indonesia menjadi *subscriber* dan setiap pejabat/unit terkait memiliki plafon jumlah *subscriber*, pendapatan yang dihasilkan tidak main-main.

Jika mengkonversi rata tengah estimasi pendapatan di <https://skorlife.com>, maka penghasilan yang dihasilkan minimal Rp70 Triliun. Angkat ini didapat jika presiden memiliki pengikuk 170 juta akun, wapres 150 juta, para menteri dan pejabat alat negara berkisar 50-100 juta, kementerian dengan pengikuk 10 juta, pejabat dan unit K/L lainnya masing – masing 1-10 juta. Satuan Kerja (26.000) masing-masing 2 akun dengan pengikuk 100 ribu, Kantor Wilayah diestimasi 10% dari total satker masing-masing 2 akun sebanyak 1 juta sedangkan unit eselon I berjumlah 5 akun dengan pengikuk sebanyak 10 juta. Estimasi pendapatan negara tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan penjualan barang milik negara karena tidak menyentuh sepuluh persennya estimasi ini. Apabila digabung dengan platform digital lainnya seperti instagram, facebook dan tiktok, termasuk *e-government* yang dikembangkan pemerintah, tentu pendapatan negara menjadi lebih besar.

Sistem keuangan negara saat ini dapat mengakomodasi kepentingan monetisasi ini yaitu merujuk pada Undang-undang tahun 2018 tentang penerimaan

negara bukan pajak (PNBP). PNBP terdiri dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya. Opsi yang dapat digunakan untuk PNBP platform digital yaitu pengelolaan barang milik negara dan hak negara lainnya. Jika menggunakan mekanisme pengelolaan barang milik negara, maka eksekusinya diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara yaitu Satuan Kerja mengajukan usulan pemanfaatan berdasarkan BMN yang tercatat kepada Pengelola Barang, selanjutnya Pengelola Barang melakukan penilaian tarif dan persetujuan yang berikutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan sewa dan perjanjian.

Opsi berikutnya yaitu melalui hak negara lainnya dengan membuat perjanjian kepada perusahaan media sosial atau *e-commerce* terkait selanjutnya jumlah yang tertera pada perjanjian diajukan pimpinan K/L ke Kementerian Keuangan dhi Direktorat Jenderal untuk ditetapkan tarifnya. Agar menimbulkan stimulus, perlu dibuat kebijakan bahwa dari setiap pendapatan, akan diberikan persentase pasti kepada intansi tersebut dalam bentuk bonus/komisi.

Tantangan Pelaksanaan PNBP Platform digital

Di bagian sebelumnya, sudah dijelaskan keuntungan jika pemerintah terjun sebagai pemain langsung bisnis digital. Namun, sampai saat ini aktivitas tersebut belum terlaksana secara

masif disebabkan tantangan yang dihadapi sebagai berikut: Pertama, adanya pemisahan entitas negara dengan individu. Dalam peraturan perdataan, negara memisahkan kepemilikan harta individu dan organisasi. Indonesia menganut pemisahan yang sangat jelas sehingga harus dipahami bahwa seorang pejabat negara memiliki hak pribadi disamping sebagai pejabat publik. Monetisasi youtube, instagram dan platform lainnya perlu diberi perjanjian mengenai hak dan kewajibannya sehingga tidak terjadi permasalahan kepemilikan akun di kemudian hari.

Kedua, Ketidakjelasan kapitalisasi platform digital. platform digital sebagai aset tak berwujud sulit dicatat karena entitas pemerintah tidak dapat menguasai, tidak adanya dasar kepemilikan berpindah dan sulitnya mendapatkan nilai perolehan. Pemilik akun tidak diberi serah terima barang atau perjanjian untuk menguasai 100% baik database maupun antar muka aplikasi. Disamping itu, banyak platform digital berupa software yang dibangun sendiri oleh pemerintah, tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Hal ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 14 yaitu perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh intansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB. Dampak akuntansi tersebut yaitu terdapat kesulitan dalam menentukan tarif penerimaan bukan pajak (PNBP) dari sisi Pengelolaan BMN karena untuk diberikan tarif, platform digital harus tercatat dahulu sebagai BMN.

Ketiga, keamanan data mudah ditembus oleh pihak yang tidak berhak. Untuk platform digital yang

dapat dibukukan sebagai BMN atau menggunakan mekanisme hak negara lainnya namun berisi data dan informasi yang sensitif, perlu sekali bagi entitas untuk memperhatikan aspek keamanan. Tentunya jika iklan (*adsense*) tersebut terpasang, maka terdapat keharusan bagi pemerintah untuk membuka akses. Kemungkinan perilaku jahat/*moral hazard* dari pihak yang mengakses beresiko pada level pertama, pencurian dan/ atau penggelapan informasi, data dan dokumen yang tersimpan. pada level kedua, terjadi pengambilalihan secara ilegal, kerusakan dan pengnonaktifan digital platform secara permanen. Keempat, terganggunya otoritas sebagai pemerintah yang berdaulat. Sesuai praktik bisnis penyewaan yang baik, ruang pada platform digital akan diberi penguasaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian tersebut membuat negara dalam hal ini pejabat atau intansi pemerintah tidak bisa serta merta mengatur ruang tersebut tanpa disepakati kedua belah pihak. Disamping itu, akses yang tidak semestinya mempengaruhi penguasaan permanen pemerintah. Jika hal ini terjadi, maka otoritas pemerintah sebagai entitas yang berdaulat menjadi terganggu. penduduk indonesia atau asing akan berkomentar "miring" yaitu untuk menjaga platform saja tidak bisa, apalagi menjaga kedaulatan bangsa dan wilayah indonesia.

Kelima, resiko pemerintah yang ikut terseret permasalahan pengiklan. apabila pengiklan mendapatkan masalah, maka nama baik pemerintah baik pejabat maupun intansi juga ikut terseret. Jumlah, identitas, perjanjian hak dan kewajiban Pengiklan dikelola

oleh perusahaan google atau perusahaan lainnya dengan tidak melibatkan pemerintah. Dengan demikian, tidak ada penyaringan (*screening*) atas para pengiklan yang dilakukan oleh pemerintah. Mudah-mudahan membuat iklan dan berita di platform digital, membuat berita dan iklan *hoax* bertebaran di dunia maya. Banyak perusahaan pengiklan yang memiliki kasus seperti iklan bodong, iklan penipuan atau mengalami kebangkrutan akan menyeret pihak-pihak yang menyewakan ruang yang mungkin didalamnya, termasuk pemerintah. Akibatnya, pemerintah harus melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada masyarakat atau atau menjadi saksi apabila pengiklan tersebut menjadi tergugat/penggugat di pengadilan.

Keenam, terjadi konflik kepentingan pemerintah. Ada peraturan tidak tertulis di negara ini yang sering diucapkan oleh para ahli yaitu negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Negara disinyalir akan membuat peraturan yang berat sebelah dengan menguntungkan para pejabat/intansi pemerintah, menjadi tidak profesional sebagai pelayan masyarakat dan hal negatif lainnya berkenaan dengan aktivitas monetisasi ini.



IKN, Cita-Cita atau Fakta?

Penulis : Fawzan Fadly Anshari

Foto : storypostkemenkeu

Minggu sore yang berawan, di sebuah ruang tamu yang hening, seorang pria tua renta terlihat duduk terbungkuk memegang gawainya. Dengan kacamata berlensa presbiopinya, serta tangan yang sedikit gemetar karena sel-sel syarafnya yang termakan usia, pria renta itu terlihat mengoperasikan sebuah ponsel pintar secara perlahan, dengan penuh kehati-hatian serta rasa ragu karena kekurangcukupannya. Memang, di usianya yang sudah menginjak 74 tahun, pria renta itu hanya mampu mengoperasikan sebagian kecil aplikasi dari berbagai fitur canggih yang dimiliki ponsel pintarnya, salah satu di antaranya ialah aplikasi *streaming video online*, Youtube.

Pria renta itu terlihat menggeserkan layar ponselnya ke atas dan ke bawah, seperti sedang mencari sebuah video yang menarik pikirnya. Hingga jarinya berhenti menggeser dan mengetuk layar ponselnya di sebuah video. Ia pun mulai menyimak video yang dipilihnya itu. Terdengar sayup-sayup pewara berita membacakan narasi yang sudah disusun sedemikian rupa oleh *copywriter*-nya. Dari banyaknya *script* yang dibacakan, samar namun terngiang, terdengar satu pertanyaan yang dilayangkan oleh pewara tersebut, "IKN, cita-cita atau fakta?"

Sembari mendengarkan pewara berita itu berceles panjang lebar tentang isi utama berita yang disampaikan, yaitu tentang Ibu Kota Nusantara (IKN), terputar kembali dalam ingatan pria renta itu akan sebuah file 'rahasia' yang sempat bocor ke beberapa kalangan tertentu berisi nama-nama pegawai di salah satu kementerian pusat yang 'dijadwalkan' akan menjadi

'penghuni' IKN tahap pertama. Kebetulan salah satu anaknya memang saat ini bekerja sebagai ASN di salah satu instansi pemerintah pusat. Kebetulan juga anaknya tersebut memenuhi hampir seluruh kriteria yang ditetapkan oleh Kemenpan-RB bagi ASN yang diproyeksikan akan dipindahkan ke IKN, yaitu generasi *millennial* dengan tingkat literasi digital yang tinggi.

Memang *sih*, anaknya itu baru saja melangsungkan pernikahan yang mana hal tersebut menggugurkan salah satu kriteria pegawai yang akan dipindahkan ke IKN. Namun tetap saja, pikirannya tidak bisa tenang ketika membayangkan anak bungsunya yang sangat dijaganya itu harus berpindah tempat kerja ke daerah antah berantah baginya. Dalam lamunannya, pria renta itu membayangkan bagaimana kehidupan anaknya di tanah seberang sana. "Apakah anak saya sudah siap? Apakah ia sanggup menghadapi berbagai macam tantangan seperti perbedaan budaya? Bagaimana jika ia tidak mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan dan kehidupan barunya nanti? Bagaimana jika instansinya tidak cukup maksimal dalam mempersiapkan pegawainya dalam menghadapi kepindahan ke IKN?" Isi pikirannya itu beradu dengan berita penuh optimisme tentang progres pembangunan infrastruktur di IKN yang disampaikan oleh pewara berita yang masih mengoceh sedari tadi di dalam layar ponselnya.

Seperti yang disampaikan oleh pewara berita itu, per September 2024, pembangunan tahap I infrastruktur di IKN saat ini memang sudah mencapai 93%. Nilai itu terasa wajar mengingat Istana Garuda saja sudah berdiri megah

di sana, bahkan menjadi *venue* utama dalam upacara perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI bulan Agustus kemarin di IKN. Belum lagi sejumlah gedung kantor pemerintahan, rumah tapak menteri, serta rumah susun (rusun) bagi ASN yang sudah hampir rampung di kawasan inti pusat pemerintahan. Namun, dengan segala optimisme progres positif pembangunan infrastruktur tersebut, tidak cukup menenangkan kekalutan dalam pikiran pria renta itu yang masih semrawut bak kabel listrik perempatan Jatiasih dari tadi.

Kegelisahannya itu rasanya adalah sebuah respon yang sangat natural. Karena pemindahan Ibu Kota Negara ini merupakan sebuah cita-cita besar pemimpin negara ini dalam upayanya mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju yang berkelanjutan. Namun, Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara tidak hanya sekadar memindahkan gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga memindahkan ribuan jiwa dengan segala kompleksitas emosinya. Bayangkan, meninggalkan zona nyaman di Jakarta dengan segala fasilitas dan relasi sosial yang telah terbangun selama bertahun-tahun, lalu merantau ke hutan Kalimantan yang masih perawan. Tantangan terbesar mungkin bukan soal infrastruktur atau fasilitas, melainkan bagaimana ASN dapat mengatasi perubahan drastis dalam lingkungan hidup dan sosial. Apakah mereka siap menghadapi perasaan cemas, stres, atau bahkan kehilangan identitas yang mungkin timbul akibat perpindahan ini?

Memindahkan ribuan ASN (bahkan beserta keluarganya) ke lokasi yang sama sekali baru

tentu bukan perkara mudah. Perpindahan ASN ke IKN dapat diibaratkan sebagai migrasi dalam skala besar. Sama seperti para migran yang meninggalkan kampung halaman untuk mencari kehidupan yang lebih baik, ASN juga akan mengalami proses adaptasi yang panjang dan kompleks. Selain aspek teknis seperti infrastruktur dan fasilitas, terdapat juga tantangan psikologis dan sosial yang perlu diperhatikan. Para ASN mungkin harus menghadapi adaptasi besar-besaran, terutama dengan lingkungan alam yang berbeda, budaya masyarakat yang unik, dan iklim yang mungkin lebih ekstrem. Tidak hanya berdampak pada individu ASN itu sendiri, tantangan psikologis juga turut terasa sampai ke keluarga. Dukungan keluarga bisa saja menjadi salah satu faktor penentu adaptasi di lingkungan yang baru. Kesiapan mental dan dukungan sosial menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan besar ini. Lebih jauh lagi, dampak lainnya yang mungkin terpicu ada pada dinamika sosial masyarakat setempat. Interaksi antara pendatang baru dengan masyarakat asli dapat memicu konflik sosial, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Perbedaan gaya hidup, nilai-nilai, dan kepentingan dapat menjadi sumber perselisihan. Pemerintah harus mengambil peran di sini untuk dapat memfasilitasi interaksi yang harmonis antara kedua kelompok masyarakat ini.

Visi IKN sebagai kota pintar dan berkelanjutan menuntut adanya perubahan paradigma dalam pola pikir dan perilaku ASN. ASN tidak hanya dituntut untuk menguasai teknologi terbaru, tetapi juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang

dapat menginspirasi masyarakat. Dengan demikian, perpindahan ke IKN bukan hanya sekadar perpindahan fisik, melainkan juga sebuah proses transformasi untuk membentuk identitas baru sebagai ASN yang inovatif, adaptif, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Salah satu misi utama pembangunan IKN adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Perpindahan ASN ke IKN diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama ASN, serta antara ASN dengan masyarakat lokal. Dengan hidup berdampingan dalam lingkungan yang baru, ASN dapat belajar menghargai keberagaman budaya dan membangun semangat gotong royong. Nilai-nilai kebangsaan seperti toleransi, saling menghormati, dan kerjasama akan semakin teruji dan tertanam dalam diri setiap ASN.

IKN adalah sebuah laboratorium sosial yang unik. Di sini, ASN akan berinteraksi dengan berbagai macam orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk belajar tentang keberagaman budaya dan membangun relasi yang lebih baik. Namun, perbedaan juga dapat memicu konflik. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis, di mana semua orang merasa dihargai dan dihormati.

Perpindahan ke IKN ibarat menjelajahi hutan belantara yang belum terjamah. ASN akan dihadapkan pada tantangan yang tak terduga, mulai dari iklim tropis yang ekstrem hingga infrastruktur yang masih dalam tahap pembangunan. Namun, di balik setiap tantangan tersimpan peluang besar untuk tumbuh dan

berkembang. Bayangkan, Anda akan menjadi bagian dari sejarah, membangun sebuah kota dari nol. Ini adalah kesempatan emas untuk mengukir prestasi yang luar biasa dan meninggalkan warisan bagi generasi mendatang.

Pemindahan ke IKN bukan hanya sekadar perpindahan geografis, namun juga sebuah lompatan budaya yang cukup signifikan. Dari hiruk pikuk perkotaan Jakarta, ASN akan bertransisi ke lingkungan yang lebih tenang dan asri di Kalimantan Timur. Perbedaan budaya, adat istiadat, dan gaya hidup masyarakat lokal akan menjadi tantangan tersendiri. ASN perlu menghargai keberagaman budaya ini sambil tetap menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan terbesar dalam adaptasi budaya adalah membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat lokal. Perbedaan sekecil apapun dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Untuk mengatasi hal ini, ASN perlu memiliki sikap toleransi yang tinggi dan empati yang mendalam terhadap budaya lokal. Dengan saling memahami dan menghormati, kita dapat membangun komunitas yang inklusif dan harmonis. Komunikasi antarbudaya menjadi kunci keberhasilan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Perbedaan dalam bahasa, gaya komunikasi, dan gestur dapat menimbulkan misinterpretasi. ASN perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan terbuka untuk belajar bahasa dan budaya lokal. Dengan demikian, mereka dapat membangun relasi yang lebih efektif dengan masyarakat sekitar.

Para ASN yang berpindah ke IKN dapat dibayangkan seperti seorang penjelajah yang tengah memasuki hutan belantara budaya yang kaya. Agar perjalanannya mulus, pemerintah perlu menjadi pemandu wisata yang andal. Dengan program pelatihan budaya yang komprehensif, ASN akan dibekali peta jalan yang jelas, kamus bahasa lokal, dan pengetahuan mendalam tentang adat istiadat setempat. Hal ini akan membuat transisi menjadi lebih lancar dan menyenangkan. Jika diibaratkan sebagai kanvas kosong, IKN adalah kanvas yang siap diwarnai dengan warna-warni persahabatan. Pemerintah perlu menjadi seniman yang menciptakan suasana yang kondusif bagi ASN untuk menjalin hubungan baru. Dengan berbagai kegiatan sosial dan rekreasi, ASN akan menemukan komunitas baru dan merasa seperti di rumah sendiri. IKN adalah rumah baru bagi ASN. Pemerintah perlu memastikan rumah ini dilengkapi dengan segala fasilitas yang dibutuhkan. Bayangkan sebuah rumah yang nyaman dengan perpustakaan, ruang belajar, dan pusat kesehatan. Dengan fasilitas yang lengkap, ASN dapat fokus pada tugas mereka dan menikmati kehidupan baru. Jika memang pemindahan ASN ke IKN ini dapat dianggap sebagai sebuah petualangan baru bagi para ASN, maka siapa yang tidak tertarik dengan petualangan yang menguntungkan? Pemberian insentif yang menarik perlu dipertimbangkan pula agar ASN bersemangat untuk menjadi pionir di IKN. Dengan berbagai fasilitas dan peluang yang ditawarkan, ASN akan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa

Jika kita menilik pada kondisi-kondisi ideal seperti di atas, IKN saat ini rasanya jauh lebih dekat untuk dikatakan sebagai fakta daripada hanya bergelantungan saja sebagai cita-cita semata. Apapun itu, kita sebagai masyarakat yang taat beserta seluruh elemen NKRI ini mau tidak mau toh harus patuh dan tunduk terhadap amanat Undang-Undang, *kan? Ya*, dengan ditetapkannya Undang-Undang No.3 Tahun 2022 yang mengatur tentang IKN tersebut, maka menyongsong perpindahan ke Ibu kota Nusantara cepat atau lambat akan menjadi keniscayaan yang akan terkabulkan, kini atau nanti.

Perpindahan ibu kota ke IKN adalah tonggak sejarah yang menandai dimulainya babak baru bagi Indonesia. Tantangan pasti ada, namun dengan semangat gotong royong dan dukungan penuh, kita akan mampu melewatinya. Bayangkanlah, IKN akan menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan baru yang akan membawa Indonesia semakin maju dan sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Mari kita dukung bersama pembangunan IKN agar cita-cita kita untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dapat terwujud. Seperti kata Bung Karno, "*Beri aku seribu orang tua, maka akan ku guncangkan dunia*".

Mari kita jadikan IKN sebagai bukti nyata dari semangat juang bangsa Indonesia.

Ketika Engkau Pergi, Lantas Bagaimana Nasibku?

Penulis : Zanuar Prasetyo Aji

Perpindahan pegawai ke IKN bisa berdampak pada kekosongan gedung-gedung perkantoran Kementerian Keuangan yang sebelumnya mereka tempati. Ini bisa menjadi peluang untuk dimanfaatkan kembali, misalnya dengan menyewakan gedung-gedung tersebut kepada pihak lain, atau digunakan untuk tujuan pemerintahan lainnya. Untuk mengurangi penggunaan gedung - gedung yang tidak terpakai (idle), Kementerian Keuangan dapat melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. **Penyewaan.** Gedung-gedung yang tidak digunakan bisa disewakan kepada pihak lain, baik itu sektor swasta, lembaga pemerintah lain yang membutuhkan ruang, atau digunakan kembali untuk keperluan lain yang produktif.
2. **Konsolidasi dan Optimalisasi Ruang.** Mengkonsolidasikan kegiatan yang tersebar di berbagai gedung ke dalam satu gedung atau lokasi yang lebih efisien, sehingga mengurangi jumlah gedung yang harus dipertahankan.



Foto : Much Hari Cahyo

3. **Renovasi dan Pemanfaatan Ulang.** Melakukan renovasi terhadap gedung-gedung yang sudah ada untuk diadaptasi kembali sesuai dengan kebutuhan baru, misalnya untuk kantor yang lebih modern atau multifungsional.

4. **Kerjasama Publik - Privat.** Melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan dan penggunaan kembali gedung-gedung pemerintah yang tidak terpakai melalui konsep kerjasama publik-privat, seperti pengembangan properti atau proyek revitalisasi.

5. **Digitalisasi dan Fleksibilitas Kerja.** Mendorong penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kerja jarak jauh (remote work) sehingga tidak semua aktivitas harus dilakukan dari kantor, yang dapat mengurangi kebutuhan akan ruang kantor fisik.

6. **Penghematan Energi dan Biaya Operasional.** Jika gedung-gedung tersebut tidak bisa langsung dimanfaatkan kembali, pemerintah dapat mengurangi biaya operasional dengan mematikan atau mengurangi penggunaan fasilitas seperti listrik dan pendingin udara.

Langkah-langkah ini dapat membantu pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk efektif dalam pengelolaan sumber daya gedung dan infrastruktur fisiknya, serta meminimalisasi biaya operasional yang tidak perlu. Baru-baru ini, di Indonesia sedang mengalami tren penggunaan virtual office, khususnya kota besar seperti Jakarta. Adapun bisnis-bisnis yang cocok untuk mengisi virtual office sebagai berikut:

a. **Agensi.** Agensi merupakan bisnis yang bergerak di bidang

kreatif mulai dari desain, fotografi, videografi, dan penulis. Pekerja di agensi tidak semuanya berkantor pada satu tempat. Jadi, virtual office kerap digunakan sebagai tempat management berkumpul atau untuk sekedar rapat koordinasi.

b. **Media Online.** Beberapa perusahaan baru yang bergerak di bidang media terus tumbuh mulai dari media humor, media populer, hingga media berupa konten video. Media seperti ini biasanya tidak memiliki kantor pusat sehingga memilih menggunakan virtual office.

c. **UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).** Penggunaan virtual office pada UMKM juga bisa meningkatkan gengsi dari merek yang diusung. Daripada menggunakan gudang dan bekerja di rumah, lebih baik menggunakan virtual office untuk tempat bekerja, mendesain, dan berhubungan dengan calon pembeli.

d. **Online Shop.** Dengan fasilitas lengkap dan koneksi yang baik, berbagai aktivitas penjualan bisa dilakukan di sini dan pengiriman bisa dilakukan dari gudang. Menggunakan virtual office juga membuat koordinasi antar pegawai jadi lebih baik.

Namun, bukan berarti konsep ini tidak memiliki kelemahan. Virtual office yang terus berkembang di Indonesia ini ternyata memiliki beberapa kekurangan.

i. **Koneksi Internet.** Salah satu keunggulan yang banyak ditawarkan oleh virtual office adalah koneksi internet yang cepat. Karena pekerja atau bisnis yang menggunakan virtual office banyak

menggunakan internet, koneksi yang cepat.

ii. **Bergantian Menggunakan Fasilitas.** Fasilitas yang ditawarkan oleh virtual office tidak sama satu dengan yang lain. Ada yang mendapatkan fasilitas lengkap mulai dari set meja dan kursi yang baik, perlengkapan presentasi, hingga mesin cetak dan fotokopi. Namun, fasilitas seperti mesin fotokopi atau printer dipergunakan secara bergantian sehingga cukup mengulur waktu. Lebih lanjut, ruangan bersantai dan toilet juga dipergunakan oleh banyak orang sehingga kebutuhan privasi individu dan kantor sulit dipenuhi.

iii. **Membutuhkan Sistem Penyimpanan Data.** Bekerja di virtual office sedikit berbeda dengan bekerja di kantor. Dibutuhkan fasilitas penyimpanan data sehingga diperlukan sebagai tempat khusus seperti cloud. Karena data dalam bentuk virtual tidak memiliki backup, untuk menghindari masalah ini, data disarankan untuk disimpan di online storage tepercaya atau media penyimpanan fisik seperti hardisk portable dengan jumlah lebih satu.

Upaya Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi virtual office dengan mengoptimalkan aset idle di kompleks Kementerian Keuangan di kota Jakarta pasca perpindahan pegawai ke IKN adalah langkah progresif dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan adaptasi terhadap perubahan pasar modern. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Kementerian Keuangan dapat memainkan peran strategis dalam mendukung inovasi e-commerce, meningkatkan daya saing UMKM



Foto : Much Hari Cahyo

di era digital, dan memanfaatkan aset-aset pemerintah yang sebelumnya tidak terpakai secara efisien. Ini juga mencerminkan respons positif terhadap perubahan dan tren konsumen yang mengarah pada interaksi pasar yang lebih modern tanpa harus berhadapan secara langsung antara pembeli dan penjual. Beberapa langkah penting dalam modernisasi pada optimalisasi aset idle, melibatkan:

1. **Identifikasi Aset Idle.** Langkah pertama adalah mengidentifikasi aset-aset yang saat ini tidak digunakan atau digunakan tidak efisien oleh Kementerian Keuangan. Ini bisa berupa Gedung atau bangunan lainnya seperti rumah.
2. **Penilaian dan Evaluasi.** Aset-aset tersebut kemudian dinilai untuk menentukan nilai pasar saat ini dan potensi pendapatan yang bisa dihasilkan melalui penyewaan. Ini melibatkan penilaian kondisi fisik, nilai pasar properti di lokasi terkait, dan permintaan pasar untuk jenis aset tersebut.
3. **Perencanaan Strategis.** Setelah aset-aset telah diidentifikasi dan dinilai, perlu dibuat rencana strategis untuk

menyewakan mereka. Ini mencakup menentukan durasi sewa, harga sewa yang wajar, dan target pasar potensial seperti perusahaan swasta, institusi publik, atau organisasi non-profit yang membutuhkan akses ke aset tersebut.

4. **Pemasaran dan Penawaran.** Kementerian Keuangan perlu melakukan kegiatan pemasaran untuk menginformasikan tentang ketersediaan aset-aset tersebut kepada calon penyewa potensial. Ini bisa melibatkan kampanye pemasaran, pameran properti, atau kerja sama dengan agen real estate untuk meningkatkan jangkauan.
5. **Manajemen Penyewaan.** Setelah berhasil menemukan penyewa, penting untuk memiliki sistem manajemen yang efektif untuk mengelola kontrak sewa, pemeliharaan aset, dan perpanjangan kontrak jika diperlukan. Ini memastikan aset tetap dijaga dengan baik dan menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.
6. **Pemantauan dan Evaluasi Kinerja.** Proses modernisasi

juga mencakup pemantauan secara teratur terhadap kinerja penyewaan. Kementerian Keuangan perlu mengevaluasi apakah strategi ini telah berhasil mengoptimalkan penggunaan aset idle dan memberikan manfaat finansial yang diharapkan.

Saat menggunakan virtual office, perusahaan atau pihak penyewa akan mendapatkan surat keterangan domisili. Surat ini bisa digunakan untuk berbagai kepengurusan termasuk sebagai tanda legalitas wilayah bisnis dan usaha. Dalam Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta nomor 06/SE/2016 tanggal 29 Januari 2016 terkait Penerbitan Surat Keterangan Domisili dan Izin- Izin Lanjutannya Bagi Pengguna virtual office. Dengan menerapkan konsep ini, Kementerian Keuangan tidak hanya mengurangi beban biaya perawatan aset idle, tetapi juga meningkatkan pendapatan melalui penyewaan. Ini merupakan praktik yang umum dilakukan di banyak negara untuk memaksimalkan nilai dari aset-aset pemerintah dan memanfaatkan sumber daya secara efisien.

Pensertipikatan BMN Berupa Tanah

Penulis : Teguh Sunyoto

Tanah merupakan aset strategis yang memerlukan perlindungan hukum berupa sertifikat untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik kepemilikan. Pensertipikatan tanah BMN merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut diakui secara hukum dan memiliki kekuatan yang sah di mata hukum. Pensertipikatan BMN berupa tanah memiliki beberapa manfaat penting, di antaranya:

- **Kepastian Hukum.** Sertipikat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Tanah yang sudah bersertipikat memiliki kekuatan hukum yang sah sehingga mencegah adanya sengketa dan klaim dari pihak lain. Hal ini sangat penting bagi tanah yang dimiliki oleh negara karena melibatkan kepentingan publik.
- **Optimalisasi Pengelolaan Aset.** Dengan adanya sertipikat, pemerintah dapat lebih mudah mengelola aset tanah BMN. Sertipikat tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan yang efektif, termasuk untuk kepentingan perencanaan, pembangunan, atau pengalihan hak jika diperlukan.
- **Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan.** Tanah BMN yang belum bersertipikat rentan terhadap penyalahgunaan, baik oleh oknum di dalam maupun di luar pemerintahan. Sertipikat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap tanah tersebut dari kemungkinan dialihfungsikan secara ilegal.
- **Transparansi dan Akuntabilitas.** Proses pensertipikatan tanah BMN juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Dengan adanya data tanah yang bersertipikat, pemerintah dapat lebih mudah memantau dan melaporkan status tanah yang dimiliki serta memitigasi potensi korupsi dalam pengelolaan aset negara.



Foto : Canva

Meskipun proses pensertipikatan tanah Barang Milik Negara (BMN) memiliki banyak manfaat, tantangan dalam pelaksanaannya tetap signifikan. Tantangan ini berasal dari berbagai aspek, mulai dari keterbatasan administratif, permasalahan teknis, hingga hambatan sosial dan hukum yang memerlukan penanganan yang komprehensif. Beberapa tantangan yang umum ditemui meliputi:

1. **Keterbatasan Data dan Dokumen.** Banyak tanah BMN yang belum memiliki dokumen lengkap terkait kepemilikannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pencatatan aset di masa lalu, perubahan status tanah, atau permasalahan administratif lainnya. Proses pengumpulan dan verifikasi dokumen menjadi langkah yang sangat krusial, namun sering kali memakan waktu lama. Banyak aset negara yang diperoleh pada masa lalu tidak didokumentasikan dengan baik, sehingga sulit untuk menemukan bukti sah kepemilikan atau dokumen pendukung lainnya.
2. **Sengketa Lahan.** Tanah BMN sering kali terlibat dalam sengketa lahan, baik dengan masyarakat setempat, perusahaan swasta, maupun pemerintah daerah. Sengketa ini bisa memperpanjang proses pensertipikatan karena perlu penyelesaian secara hukum terlebih dahulu. Sengketa ini terjadi karena berbagai alasan, seperti klaim kepemilikan yang tumpang tindih, penguasaan oleh pihak lain tanpa izin, atau perbedaan tafsir mengenai batas-batas lahan.
3. **Koordinasi Antar Lembaga.** Pensertipikatan tanah BMN membutuhkan koordinasi antar berbagai instansi dan lembaga pemerintah, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kementerian atau lembaga pemilik tanah, serta instansi pengelola. Kurangnya sinkronisasi data, lambatnya birokrasi, atau perbedaan kebijakan di antara instansi sering menjadi hambatan.

4. **Pendanaan dan Sumber Daya.** Pensertipikatan tanah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik untuk proses administrasi maupun untuk biaya survei dan pengukuran. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten juga dapat menjadi hambatan dalam mempercepat proses ini. Proses pensertipikatan tanah membutuhkan anggaran yang cukup untuk biaya administrasi, survei, pengukuran, dan lain-lain. Keterbatasan anggaran atau sumber daya manusia yang kompeten juga bisa menjadi hambatan. Di beberapa wilayah, kurangnya personel BPN atau tenaga ahli menyebabkan proses pengukuran dan verifikasi tanah menjadi lambat.
5. **Kendala Teknis di Lapangan.** Kendala teknis di lapangan, seperti akses ke lokasi yang sulit, kondisi geografis yang rumit, atau adanya infrastruktur fisik yang menghambat pengukuran tanah, juga bisa menjadi tantangan dalam pensertipikatan tanah BMN.

Tantangan-tantangan di atas menunjukkan bahwa pensertipikatan tanah BMN tidak hanya memerlukan kesiapan administrasi dan hukum, tetapi juga kemampuan untuk mengatasi hambatan teknis dan sosial di lapangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu adanya strategi komprehensif, mulai dari peningkatan koordinasi antar lembaga, alokasi anggaran yang tepat, hingga penyelesaian sengketa secara adil dan cepat. Untuk mempercepat proses pensertipikatan tanah BMN, beberapa langkah strategis dapat diambil, antara lain:

- **Digitalisasi dan Integrasi Data.** Pemerintah perlu mendorong digitalisasi aset BMN, termasuk tanah, dengan memanfaatkan teknologi untuk inventarisasi, pengelolaan dokumen, dan pelacakan status sertipikasi. Integrasi data antar instansi juga penting untuk mempercepat verifikasi dan proses administrasi.
- **Penyelesaian Sengketa Secara Hukum.** Penyelesaian sengketa tanah BMN harus menjadi prioritas agar tidak menghambat proses sertipikasi. Pemerintah dapat membentuk tim khusus yang berfokus pada penyelesaian sengketa tanah secara cepat dan adil.
- **Pendampingan oleh Ahli Hukum Pertanahan.** Pemerintah perlu melibatkan ahli hukum pertanahan untuk memastikan setiap langkah dalam proses sertipikasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat memitigasi potensi permasalahan hukum di kemudian hari.
- **Pengalokasian Anggaran yang Memadai.** Pendanaan yang cukup perlu dialokasikan untuk mendukung proses pensertipikatan tanah BMN. Dengan anggaran yang memadai, proses pengukuran, survei, dan administrasi lainnya dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Digitalisasi dalam proses sertifikasi tanah BMN (Barang Milik Negara) adalah sebuah langkah modernisasi yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah klasik dalam pengelolaan aset negara, seperti lambatnya proses, potensi sengketa, kesalahan administratif, dan keterbatasan

akses terhadap informasi. Dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah Indonesia berharap bisa mempercepat proses sertifikasi tanah, meningkatkan akurasi, serta memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang dimiliki negara. Berikut beberapa digitalisasi dalam sertifikasi tanah BMN:



Sertifikat Tanah Elektronik (e-Sertifikat).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerapkan sertifikat tanah elektronik (e-sertifikat) sebagai bagian dari digitalisasi layanan pertanahan. Melalui layanan ini, proses pengajuan sertifikat tanah yang sebelumnya harus dilakukan secara manual kini dapat diakses secara online melalui platform elektronik. Dengan adanya platform elektronik tersebut diharapkan manfaatnya sebagai berikut:

- **Percepatan Proses Sertifikasi.** Dengan e-sertifikat, proses pensertipikatan tanah BMN yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama karena prosedur manual kini dapat dilakukan secara lebih cepat. Instansi pemerintah dapat mengajukan sertifikasi secara online, menghindari birokrasi

berbelit, dan meminimalkan kontak fisik antara pengaju dan petugas.

- **Keamanan Data dan Sertifikat.** Sertifikat tanah dalam bentuk digital lebih aman dari risiko kehilangan, pemalsuan, atau kerusakan. Ini memberikan jaminan tambahan atas kepemilikan tanah BMN yang terdaftar secara legal.
- **Pelacakan Proses Sertifikasi.** Layanan elektronik memungkinkan instansi pengguna tanah BMN untuk melacak progres pengajuan sertifikasi tanah secara real-time, sehingga mereka dapat mengetahui status permohonan dengan lebih mudah.

Geoportal Satu Peta

Program Satu Peta adalah inisiatif pemerintah untuk menyediakan satu referensi peta yang terintegrasi dan dapat diakses oleh berbagai lembaga pemerintahan untuk mengurangi tumpang tindih klaim lahan. Dalam konteks sertifikasi tanah BMN, Geoportal Satu Peta menyediakan data geospasial yang akurat mengenai posisi tanah negara. Data dari berbagai instansi terkait tanah, termasuk Kementerian Agraria, Kehutanan, dan Kementerian/Lembaga lainnya, dikumpulkan dan diintegrasikan dalam Geoportal Satu Peta. Geoportal Satu Peta menyediakan data peta tematik yang terintegrasi, termasuk peta pertanahan, kehutanan, tata ruang, infrastruktur, dan lainnya, yang semuanya ditujukan untuk mengurangi tumpang tindih lahan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan tanah. Beberapa manfaat satu peta adalah:

- **Pemetaan Tanah yang Akurat.** Geoportal Satu Peta membantu dalam memastikan bahwa pengukuran tanah BMN dilakukan dengan tepat, sehingga meminimalkan kemungkinan sengketa atau klaim ganda terhadap lahan negara.
- **Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan.** Dengan menggunakan data geospasial terintegrasi, Geoportal Satu Peta memungkinkan pemerintah untuk memverifikasi batas-batas tanah BMN dan menyelesaikan masalah tumpang tindih klaim dengan pihak lain.

Penggunaan Teknologi GIS (Geographic Information System)

Geographic Information System (GIS) adalah teknologi digital yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan memetakan data spasial, termasuk data terkait tanah. Pemerintah melalui BPN dan lembaga terkait lainnya mulai memanfaatkan teknologi GIS untuk melakukan pengukuran dan pencatatan tanah secara digital. Manfaat bagi Sertifikasi Tanah BMN:

- **Pengukuran Tanah yang Lebih Akurat.** Teknologi GIS memungkinkan pengukuran dan pemetaan tanah BMN dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga meminimalkan kesalahan pengukuran yang bisa menyebabkan sengketa atau masalah lain dalam proses sertifikasi.
- **Identifikasi Lahan dengan Cepat.** GIS memfasilitasi identifikasi lahan BMN secara lebih cepat dan tepat berdasarkan data spasial yang terintegrasi, mempercepat

proses pengelolaan tanah yang belum bersertifikat.

- **Sistem Informasi Geospasial Terintegrasi.** Dengan GIS, data geospasial terkait tanah BMN dapat dihubungkan dengan data dari SIMAN atau Geoportal Satu Peta, sehingga informasi yang diperoleh lebih lengkap dan terpercaya.

Pensertipikatan tanah BMN adalah langkah penting dalam memastikan kepemilikan aset negara terlindungi secara hukum dan dikelola dengan baik. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, manfaat dari sertifikasi tanah BMN sangat signifikan, terutama dalam hal kepastian hukum, optimalisasi pengelolaan aset, dan transparansi. Dengan upaya yang lebih terkoordinasi, didukung oleh teknologi dan sumber daya yang memadai, proses pensertipikatan tanah BMN dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, memastikan aset negara terjaga untuk kepentingan publik.

Digitalisasi dalam proses sertifikasi tanah BMN memberikan banyak manfaat dalam hal percepatan, efisiensi, keamanan, dan transparansi pengelolaan aset negara. Inisiatif seperti e-sertifikat, integrasi Geoportal Satu Peta, dan teknologi GIS menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang sebelumnya menghambat proses pensertipikatan tanah BMN. Dengan memanfaatkan teknologi digital ini, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara dan memastikan tanah BMN tersertifikat dengan legalitas yang kuat dan jelas.



Mengurai Tantangan Pengelolaan Aset Bermasalah Dan Rumah Negara

Penulis : Sandi Fajar Pratama
Foto & infografis : Much Hari Cahyo

Bagaimana aset-aset yang nilainya mencapai miliaran rupiah bisa terlantar dan terjebak dalam permasalahan administrasi yang kompleks? Pernahkah kita membayangkan bagaimana ribuan unit rumah yang dimiliki oleh negara dikelola? Di tengah dinamika pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kementerian Keuangan menghadapi tantangan besar dalam menangani masalah ini. Diperlukan Langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak hanya mempengaruhi kinerja pemerintah, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Saat ini, masih banyak BMN dengan status rusak berat yang belum dihapuskan dari pencatatan BMN. Padahal, tindak lanjut BMN rusak berat adalah salah satu komponen yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Aset (IPA), di mana IPA sendiri merupakan salah satu poin penilaian dalam evaluasi reformasi birokrasi suatu Kementerian. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa lebih dari 41.000 unit BMN yang seharusnya telah dihapuskan kini kembali

muncul dalam sistem, menciptakan kebingungan dalam pencatatan dan manajemen aset.

Di sisi lain, terdapat lebih dari 10.000 unit rumah negara Kementerian Keuangan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Rumah-rumah ini seharusnya menjadi tempat tinggal bagi pejabat dan pegawai negeri untuk mendukung mereka dalam menjalankan tugas negara. Namun kenyataannya, masih banyak dari rumah tersebut justru dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak, seperti pensiunan, ahli waris pensiunan, atau bahkan pihak ketiga lainnya. Dari total unit rumah negara, 723 unit di antaranya berada di tangan pihak-pihak yang tidak seharusnya menghuninya.

Situasi ini tidak hanya mengganggu fungsi utama dari rumah negara, tetapi juga mengurangi penerimaan negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pembayaran sewa rumah negara hilang begitu saja. Lebih jauh lagi, kondisi ini memperparah kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan

rumah negara bagi pegawai Kementerian Keuangan yang aktif, di mana saat ini Kemenkeu sendiri masih kekurangan sekitar 35.000 unit hunian untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Bagi mereka yang membutuhkan, rumah negara seharusnya menjadi solusi hunian yang layak. Namun, ketidakpatuhan terhadap aturan hunian menyebabkan rumah-rumah ini tidak lagi berfungsi sesuai tujuan awalnya.

Merancang Solusi: Mencari Jalan Keluar dari Masalah

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini Biro Manajemen BMN dan Pengadaan menyelenggarakan serangkaian diskusi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian PUPR, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kejaksaan Agung untuk menyusun strategi penyelesaian dan penertiban aset bermasalah yang mempengaruhi proses pengelolaan bmn di lingkungan Kementerian Keuangan.

BMN Rusak Berat

Topik pertama yang menjadi pembahasan adalah strategi tindak lanjut terhadap BMN rusak berat. Permasalahan utama yang dihadapi terkait data BMN rusak berat adalah kekhawatiran mengenai saldo akhir yang lebih besar daripada saldo awal akibat pembaharuan data di tahun berjalan, apalagi dengan diadakannya sensus BMN tahun ini. Hal ini dapat mempengaruhi pencapaian IPA Kementerian Keuangan mengingat tindak lanjut BMN rusak berat merupakan salah satu komponen yang dinilai. Masalah lainnya adalah adanya aset BMN rusak berat yang belum direklasifikasi dan adanya ketidaksesuaian data antara SIMAN dan SAKTI, hal ini menyebabkan kesulitan dalam pencatatan dan penghapusan aset.



Foto : Much Hari Cahyo

Perlu sinergi yang lebih erat antara seluruh stakeholders (Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, dan DJPb selaku pengelola SAKTI) dalam menangani masalah BMN rusak berat. Proses rekonsiliasi data secara berkala serta asistensi kepada Satker sangat krusial untuk mencapai target IPA yang diinginkan. Diskusi juga menyoroti pentingnya verifikasi data yang akurat dan pengelolaan BMN rusak berat yang efektif agar saldo akhir



bisa sesuai dengan kondisi fisik aset.

Selanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan, misalnya RP4 terkait proses tindak lanjut BMN rusak berat. Seluruh pihak terkait diharapkan untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah ini dan memastikan semua langkah administratif dan teknis dilakukan dengan baik. Termasuk agar satker memprioritaskan penghapusan BMN dengan total nilai perolehan terbesar.

BMN Gagal Hapus

Gambar di atas menunjukkan bahwa saat ini masih terdapat 41.984 NUP BMN gagal hapus yang tersebar di seluruh Unit Eselon I. Permasalahan utama yang dihadapi dalam BMN gagal hapus adalah ketidakcocokan data antara sistem informasi manajemen aset BMN (SIMAN)

dan sistem aplikasi keuangan instansi (SAKTI), yang diakibatkan oleh migrasi sistem. Satker menyatakan BMN sudah dihapuskan, namun faktanya BMN tersebut masih tercatat aktif dalam Aplikasi SIMAN V2.

Tantangan yang dihadapi adalah kesulitan dalam mendapatkan/menemukan dokumen penghapusan, mengingat usia dokumen yang relative sudah lama, termasuk bagi satker yang telah dilikuidasi atau ditutup. Hal ini membuat satker mengalami kesulitan dalam melacak dan menindaklanjuti penghapusan BMN yang termasuk dalam daftar gagal hapus tersebut.

Selanjutnya, diperlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa BMN yang belum terhapus tersebut dicatat dan diproses dengan benar. Terakhir, perlu dibuat panduan

yang jelas dan batas waktu (cut-off) untuk menyelesaikan proses input dokumen penghapusan.



Foto : Much Hari Cahyo

Penertiban Rumah Negara-Sharing Session dan Masukan Kementerian PUPR

Bapak Rieski Nanda Pratama, selaku Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara I, Kementerian PUPR menyampaikan bahwa untuk mengamankan BMN berupa rumah negara, Kementerian PUPR lebih menekankan pendekatan mitigasi risiko dengan fokus pada pencegahan melalui penertiban administrasi SIP melalui Aplikasi ARUS khusus untuk hunian berupa Rusunara. Aplikasi tersebut berfungsi untuk manajemen penghunian Rusunara, antara lain berfungsi memantau ketersediaan kamar, serta mengidentifikasi siapa yang berhak dan tidak berhak menghuni. Selanjutnya, Biro Hukum Kementerian PUPR juga telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menangani aset-aset yang seringkali mengalami sengketa di lapangan.

Di lingkungan Kementerian PUPR, SIP Rumah Negara Golongan II berupa rumah tapak diterbitkan oleh masing-masing Unit Eselon I, sehingga bisa

langsung dilakukan monitoring dari pusat. Namun, secara demografis kebijakan tersebut membuat rumah negara tersebut hanya didominasi dari satu Unit Eselon I tertentu, sama halnya dengan yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan, sehingga perlu dicarikan Solusi guna menunjang semangat Kemenkeu Satu.

Selanjutnya, banyak dari Rumah Negara di Kementerian PUPR dijadikan Golongan I, yang dianggap lebih efektif dari segi keamanan karena tidak bisa dialihkan menjadi golongan III, sehingga menutup peluang penghuni untuk berharap dapat membeli rumah tersebut.



Foto : Much Hari Cahyo

Penertiban Rumah Negara-Sharing Session dan Masukan Kemenkumham

Agenda pembahasan strategi penertiban rumah negara dilanjutkan dengan sharing session dan masukan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Moh. Imron Nurhakim selaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya dan Ibu Deswati selaku Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum. Dalam kesempatan ini, Narasumber mengemukakan tantangan dalam

penertiban penghuni rumah yang tidak berhak, antara lain berupa kebutuhan biaya yang besar, serta terkadang bersifat represif. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga menghadapi masalah gugatan dari pihak Ketiga meskipun sudah memiliki sertipikat sah atas tanah tersebut. Atas hal tersebut, perlu mencari solusi terkait pembiayaan penertiban, keterlibatan lawyer, dan teknis mengamankan aset setelah sengketa dimenangkan.

Dalam pembahasan, Narasumber dari Kemenkumham menjelaskan bahwa pembiayaan penertiban dapat menggunakan dana dari APBN karena melibatkan instansi lain, sedangkan penggunaan jasa lawyer, Kemenkumham belum pernah melibatkan tim lawyer dari luar karena alasan pertanggungjawaban yang sulit, dan lebih mengandalkan optimalisasi SDM yang ada. Jika menang dalam sengketa, langkah yang diambil adalah mengamankan aset secara fisik dengan segera dan memastikan sertipikat tanah dikeluarkan untuk menghindari klaim pihak lain di masa depan. Selain itu, Kemenkumham menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak terkait seperti APH dan Kementeri ATR/BPN untuk memastikan kepemilikan tanah secara fisik. Mekanisme hukum yang dijelaskan termasuk melakukan gugatan balik jika digugat oleh pihak ketiga, serta menjaga kelengkapan administrasi BMN menghindari jikalau ada masalah di masa mendatang. Kemenkumham juga mendukung pembuatan regulasi penertiban aset BMN setingkat presiden yang akan mengikat seluruh kementerian di Indonesia, dengan usulan inisiatif berdasarkan kebutuhan yang dinamis.



Foto : Much Hari Cahyo

Penertiban Rumah Negara-Sharing Session dan Masukan Kejaksaan Agung

Sharing session dan masukan terakhir terkait strategi penertiban rumah negara pada kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang Narasumber dari Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) yaitu Bapak Amrizal Tahar selaku Kasubdit Bantuan Hukum Penyelamatan pada Direktorat Perdata dan Bapak Rio Aditya Arifiansyah selaku Jaksa Pengacara Negara.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung dapat berperan penting dalam mediasi dan pendampingan hukum, mengingat pihak Kejaksaan dapat melakukan pengukuran dan penelusuran bukti secara mendalam untuk

memastikan keabsahan kasus. Selain itu, Kejaksaan Agung dapat memberikan bantuan hukum berdasarkan wilayah dan mendampingi tergugat berdasarkan permohonan yang disampaikan, kecuali dalam kasus indikasi tipikor.

Upaya mediasi merupakan strategi yang diutamakan untuk menghindari dampak negatif dari langkah paksa. Namun dalam hal upaya tersebut gagal, maka Kejaksaan Agung akan menindaklanjuti dengan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kejaksaan Agung juga menyampaikan bahwa terkadang terdapat kendala dalam penanganan kasus terkait sertipikat tanah dan indikasi pemalsuan yang harus diatasi dengan bukti kuat.

Dalam hal penanganan penghuni rumah negara yang tidak berhak, kerja sama antar Kementerian sangat penting. Kemenkeu diharapkan mengambil langkah tegas, seperti pengajuan gugatan, dan memastikan adanya dukungan dari aparat penegak hukum. Proses gugatan perlu dilakukan secara spesifik dengan menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk setiap kasus, dan biaya gugatan harus dikelola dengan hati-hati. Kejaksaan Agung juga akan mendiskusikan langkah hukum lebih lanjut dengan Jamdatun, termasuk kemungkinan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kedua jika diperlukan.

Menanti Aksi Nyata: Ujian Komitmen dalam Pengelolaan Aset Negara

Diskusi dan kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju pengelolaan BMN yang lebih baik. Implementasi strategi yang disepakati akan menjadi ujian nyata bagi Kementerian Keuangan dalam menunjukkan komitmen mereka untuk mengelola BMN secara efektif dan efisien.

Dengan sinergi dan kolaborasi antar lembaga yang lebih kuat, harapan untuk mengatasi masalah BMN bermasalah ini semakin nyata. Bagaimanapun, BMN adalah aset negara yang harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan bersama. Keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kini, kita menanti aksi nyata dari berbagai pihak terkait. Masukan dan langkah strategis yang telah disepakati harus diimplementasikan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Hanya dengan begitu, pengelolaan BMN dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Optimalisasi Barang Rampasan Negara Untuk Pengurangan Biaya Sewa Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan

Penulis : Ayu Damelia Putri
Foto : Much Hari Cahyo

Dalam rangka perbaikan ekosistem kerja untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, dibutuhkan sarana penunjang antara lain aset berupa tanah dan/atau bangunan yang sampai dengan bulan Juli 2024 masih terdapat 89 Satker Kementerian Keuangan yang belum memiliki gedung kantor. Artinya, setiap tahunnya Kementerian Keuangan perlu menganggarkan biaya sewa gedung kantor untuk Satker-Satker tersebut. Salah satu sumber pemenuhan kebutuhan aset yang tidak membebani APBN/D adalah optimalisasi penggunaan aset yang berasal dari Barang Rampasan

Negara yang berasal dari KPK. Hal ini disampaikan oleh Edy Gunawan, Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, pada acara Serah Terima Barang Rampasan Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Acara tersebut berlangsung di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Kegiatan serah terima ini merupakan bagian dari penanganan tindak pidana korupsi, di mana barang rampasan hasil penegakan hukum dapat

dimanfaatkan kembali. Diharapkan, hibah barang rampasan negara ini dikelola dengan baik oleh Kementerian Keuangan.

Rincian aset yang diserahkan kepada Kemenkeu meliputi Barang Milik Negara (BMN) berupa sebidang tanah seluas 6.625m², yang memiliki nilai Rp79.733.118.000, atas nama Rudy Hartono Iskandar. Tanah tersebut terletak di Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang akan dibangun gedung kantor KPP Pratama Depok Cimanggis dan KPP Pratama Depok Sawangan.

Selain itu, KPK juga menyerahkan sebidang tanah dan bangunan seluas 1.340m² senilai Rp9.339.266.000, yang terdaftar atas nama Agung Ilmu Mangkunegara, berlokasi di Jalan Sultan Agung Nomor 43, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang akan digunakan sebagai rumah dinas Kemenkeu Satu Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, total nilai BMN yang diterima Kementerian Keuangan mencapai Rp89.072.384.000.

Penyerahan ini didasarkan pada Surat Menteri Keuangan RI cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 109/KM.6/2024 tanggal 4 Juni 2024 mengenai Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Negara dari Barang Rampasan Negara. Surat lainnya juga terkait dengan penetapan status penggunaan BMN di Biro Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung, yang tertanggal 2 April 2024.

Kementerian Keuangan, melalui Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, bertanggung jawab atas pengelolaan barang-barang tersebut. Dengan nilai total aset sebesar Rp89.072.384.000, yang terdiri dari tanah dan bangunan yang diserahkan, Kemenkeu berupaya memastikan bahwa barang-barang ini dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan oleh Mungki Hadipratiko sebagai Direktur Labuksi KPK, dengan David Hartono Hutaaruk sebagai saksi. Pihak penerima, Edy Gunawan, Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Kemenkeu, juga menandatangani serah terima tersebut, disaksikan oleh Mohammad Lucky Akbar.

Sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kementerian Keuangan perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk dijalankan dengan baik sehingga pemanfaatan Barang Rampasan Negara dapat dikelola secara akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.



Foto : Tanah dan Bangunan di Kota Bandar Lampung



Foto : Sebidang Tanah Kosong di Kota Depok



Foto : Much Hari Cahyo

Sensus Belum Usai, Sebelum Catatan Sesuai

Penulis : Komang Debby Puspita Rini
Foto : Ibnu Sudjono

Ketika mendengar sensus, mungkin akan terbayang sensus penduduk. Ya, sensus yang dilakukan 10 tahun sekali untuk menghitung jumlah penduduk. Petugas sensus akan menghitung satu per satu jumlah penduduk *door-to-door*. Nah, metode perhitungan sensus ini tidak hanya untuk menghitung jumlah orang, tetapi juga digunakan untuk menghitung Barang Milik Negara (BMN).

Kenapa BMN harus dihitung lagi? Padahal setiap perolehan atas BMN tentunya dicatat kan. Masa iya, pemerintah tidak punya catatannya? Semua BMN yang diperoleh atas beban negara atau perolehan yang sah tentunya sudah dicatat dan disajikan dalam neraca keuangan pemerintah. Namun, setelah digunakan beberapa tahun lamanya, BMN akan mengalami perubahan kondisi. Ini lah momen untuk menyesuaikan antara kenyataan di lapangan dengan catatan.

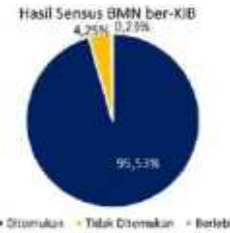
Sama seperti kita menggunakan barang pribadi, setelah beberapa tahun mungkin barang tersebut kondisinya sudah berbeda dibandingkan ketika baru membeli. Begitu juga BMN yang digunakan bertahun-tahun, BMN tersebut perlu dievaluasi kondisinya apakah masih layak digunakan atau tidak. Selain itu, yang paling utama dari sensus adalah memastikan barang itu masih ada atau hanya catatan saja.

Sensus BMN sudah dilaksanakan 2 kali sebelumnya yaitu pada sebelumnya yaitu tahun 2013-2014 dan 2018-2019). Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/KM.06/2016 tentang Penatausahaan BMN. Berdasarkan pengalaman sensus ada tiga hal yang akan dialami orang yang melakukan sensus BMN di Kementerian Keuangan. Pertama, catatannya ada dan barangnya ada secara fisik, maka diperlukan penyesuaian pencatatan kondisi

terkini. Kedua, barangnya ada di catatan tetapi tidak ada secara fisik. Hal kedua ini yang disebut hanya catatan saja. Yang ketiga, tidak ada di catatan, tetapi barangnya ada. Jika mengalami keadaan kedua dan ketiga, maka diperlukan penelusuran lebih lanjut.

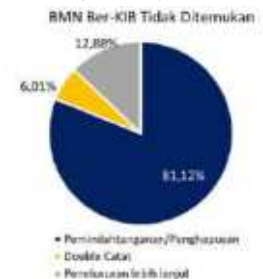
Penelusuran lebih lanjut ini dapat dilakukan setelah pelaksanaan sensus. Ketika semua barang telah disensus, langkah selanjutnya satuan kerja harus menyampaikan laporan sensus atau yang disebut Laporan Hasil Inventarisasi (LHI). Setelah LHI terkirim, kebanyakan orang mungkin akan berpikir bahwa "akhirnya... sensus sudah selesai". Padahal, hal yang paling penting belum dilakukan, yaitu pembukuan dan pemutakhiran data BMN. Setelah Pembukuan dan Pemutakhiran data barulah hasil sensus ini akan tampak di neraca barang. Laporan sensus BMN ber-KIB atau hasil Sensus 2023 menunjukkan dari total

objek 43.797 item BMN, 41.933 BMN ditemukan, 1.864 BMN tidak ditemukan, dan 99 BMN barang berlebih. Seluruh objek tersebut harus ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data.



Gambar 1. Hasil Sensus BMN ber-KIB (2023)

Jika dilihat pada gambar 1, BMN tidak ditemukan persisnya sebanyak 4,25%. BMN tidak ditemukan tersebut bukan berarti hilang. Tetapi ada yang dalam proses Pemindahtanganan/ Penghapusan, Double Catat dan Penelusuran lebih lanjut (proporsi dilihat di gambar 2).

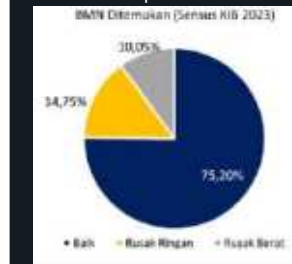


Gambar 2. BMN Tidak Ditemukan Sensus BMN ber-KIB 2023

Untuk BMN yang dalam proses Pemindahtanganan/ Penghapusan, maka Satuan Kerja cukup melaporkan dokumen Pemindahtanganan/ Penghapusan yang menyatakan proses tersebut telah selesai. Misalnya BMN yang memang mau dihapuskan, dokumen yang diperlukan Surat Keputusan Penghapusan. Contoh kedua, BMN yang ditransfer ke satker lain dapat menggunakan BAST. Lalu bagaimana yang double catat? Sebelum dihapus, perlu diyakini dahulu apakah

memang "hanya catatan saja".

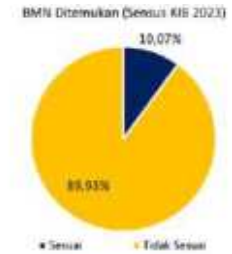
Sementara itu ada 99 BMN yang berlebih. BMN berlebih ini merupakan barang yang tidak ada di catatan, tetapi barangnya ada. Sebelum mengakuinya sebagai Barang Milik Negara perlu penelusuran terlebih dahulu, barang tersebut milik siapa. Jangan sampai "Ngrusak pager ayu" atau melanggar batas hak orang lain. Di kantor, tak jarang pegawai yang sudah pindah meninggalkan barangnya untuk digunakan umum. Selain itu terkadang juga sekelompok pegawai membeli barang bersama-sama untuk digunakan di kantor. Ketika sudah dipastikan barang termasuk BMN, maka dilakukan pencatatan saldo awal. Nilai perolehan BMN dapat dimintakan ke penilai.



Gambar 3. BMN Ditemukan (Sensus KIB 2023)

Barang ditemukan pun harus ditindaklanjuti, Satuan Kerja harus mencatat bagaimana kondisi terkini. Bisa jadi barang yang dulu kondisinya baik, kini sudah menjadi rusak ringan atau bahkan rusak berat. Untuk pencatatan kondisi, untungnya satker tidak perlu menginput transaksi perubahan kondisi satu per satu. Transaksi perubahan kondisi akan di lakukan secara masal setelah pengguna barang mengirimkan laporan hasil inventarisasinya. Walaupun sudah otomatis, perlu dimonitoring nantinya apakah sudah semua BMN yang ditemukan sudah berubah

kondisinya. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat objek sensus BMN ber non-KIB 2024 sebanyak 1.582.495 BMN.



Gambar 4. Salah Kodeifikasi pada Sensus BMN 2023

Selain mengubah kondisi, di antara barang yang ditemukan pun ternyata ada yang kodefikasi atau kelompok barangnya belum sesuai. Contohnya ada tempat sampah lama yang tercatat sebagai Alat Bantu Lainnya dan masuk ke kelompok Alat Besar, kemungkinan satker belum tahu bahwa ada kodefikasi baru untuk Tempat Sampah yang masuk ke kelompok Alat Rumah Tangga. Jika dilihat pada gambar 4, dari total 41.933 BMN yang ditemukan 10,07% nya masih salah kodefikasi. Untuk BMN yang salah kodefikasi ini, satuan kerja harus menindaklanjutinya dengan reklasifikasi BMN.

Setelah semua tindak lanjut itu, barulah sensus BMN dapat dikatakan selesai. Tindak lanjut atas hasil sensus ini diharapkan selesai paling lambat 31 Desember 2025 untuk BMN ber non-KIB dan 30 Juni 2025 untuk BMN ber-KIB sesuai Petunjuk Teknis yang telah diterbitkan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Sensus tidak hanya mendata BMN ada atau tidak dan kondisinya seperti apa. Tetapi harus dilakukan penyesuaian pencatatan BMN sehingga hasil sensus ini tercermin dalam Laporan BMN.

Mrintilin Printilan Master Aset

Penulis : Fawzan Fadly Anshari

“Master asetnya udah di-update belum?”

Pertanyaan tersebut mungkin sudah sering terdengar di telinga para operator Barang Milik Negara (BMN), khususnya operator-operator lama yang telah menangani pengelolaan BMN di satuan kerja (satker) selama bertahun-tahun. Master aset seharusnya sudah merupakan barang yang lumrah bagi para operator BMN, bahkan menjadi ruang kerja alias *workspace* harian bagi mereka. Berbagai kegiatan pengelolaan BMN saat ini sudah terpusat menggunakan satu aplikasi, mulai dari penetapan status penggunaan hingga ketika satuan kerja ingin melakukan penghapusan BMN, semua pengusulannya dilakukan lewat satu aplikasi terpadu. Namun, meskipun master aset telah menjadi santapan sehari-hari, sayangnya ‘*printilan*’ datanya masih banyak yang perlu dilengkapi.

Sebenarnya, sampai dengan saat ini data yang ada di Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) V2 terlihat tidak kurang juga, tapi juga masih tidak cukup untuk dikatakan lengkap dan valid. Sesuai data yang sudah diolah, per September 2024 saja data di SIMAN itu sudah mencapai 74,14% kelengkapan isinya. Cukup banyak yang terisi, tapi juga masih banyak data yang kosong. Jika kita lihat lebih dalam, tingkat kebaruan dari seluruh data-data itu masih cukup rendah. Bagaimana tidak, data penghuni rumah negara saja misalnya, masih ada data yang diinput sejak tahun 2010, *loh*. Jika kita tarik ke kondisi terkini, bisa jadi pegawai penghuninya saja sudah pindah atau pensiun, bahkan mungkin saja rumahnya sudah rusak dan tidak berbentuk. Misalnya saja satu contoh di Tarakan, di dalam master aset tercatat rumah tersebut dihuni oleh pegawai ‘A’, tapi setelah dilakukan sensus BMN tahun 2023 kemarin, ternyata rumah negaranya itu



Foto : Canva

sudah tidak ditemukan bangunan fisiknya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata rumahnya sudah dirobohkan karena merupakan objek sengketa, ironis *kan*?

Selain informasi terkait penghuni rumah negara itu, data-data anomali juga banyak loh yang ditemukan di dalam master aset BMN Kemenkeu. Data anomali ini ada bermacam-macam bentuknya. Beberapa parameter yang ditemukan diantaranya adalah luas bangunan terisi “0m²”, luas dasar bangunan terisi “0m²”, luas dasar bangunan lebih besar dibanding luas total bangunannya, luas dasar bangunan lebih besar dibanding luas tanah, atau bangunan yang jumlah lantainya hanya “0”. Berbagai macam parameter tersebut tidak jarang ditemukan di master aset yang mengakibatkan tim analis kesulitan dalam mengolah data lebih lanjut untuk keperluan pengambilan keputusan pimpinan. Hal-hal tersebut yang diinginkan oleh pimpinan untuk dapat ‘disegarkan’ datanya di dalam aplikasi SIMAN oleh para pengelola BMN di tiap satker, karena apa yang diinput di dalam SIMAN itu lah yang menjadi sumber utama dalam pengambilan keputusan.

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, atau Romadan (begitu kita sering menyebutnya), sendiri sebenarnya telah mengeluarkan petunjuk teknis yang bisa dipelajari oleh semua pegawai, bahkan buat operator yang baru pun bisa langsung mahir master aset setelah membacanya. Panduannya itu bisa dilihat dan dibaca di <https://sites.google.com/view/pemutakhirandatabmn>. Bahkan Romadan sendiri membuka layanan konsultasi, yang diisi oleh agen-agen layanan yang

siap direpotkan kapan saja, jika seandainya teman-teman operator BMN memiliki pertanyaan terkait pengelolaan BMN dan pengadaan. Kanal untuk konsultasinya pun beragam, bisa melalui saluran telepon, *e-mail*, *WhatsApp*, atau konsultasi tatap muka langsung pun siap dilayani. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan Biro Madan. Sangat membantu, *kan*?

Balik lagi ke master aset, para operator BMN sangat diharapkan kesadarannya dalam mengelola dan melengkapi informasi tiap aset yang dicatat di satkernya di dalam master aset. Komponen yang harus dilengkapi memang sangat banyak, sampai-sampai kalau kita narik datanya ke dalam satu file excel bisa terisi hingga kolom BA-BS, sangat banyak seperti barang *printilan* kecil yang harus diprintilin satu-satu. Karena alasan itu mungkin ya, makanya para operator BMN terkesan tidak sempat untuk melengkapi dan memutakhirkan datanya secara rutin dan berkesinambungan. Tapi, jika tidak dilakukan sedikit demi sedikit, maka nantinya akan menjadi tumpukan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, bahkan memerlukan waktu hingga lintas generasi operator.

Pekerjaannya memang terlihat kecil, tapi teman-teman operator harus yakin dan percaya kalau hasil kerjanya itu akan sangat berdampak bagi pengambilan keputusan pimpinan, terlebih di level pengguna barang.

Jadi, mau nunggu *numpuk* atau mau *mrintil* dari sekarang? Keputusannya ada di masing-masing operator BMN sendiri.

Laporan Wasdal BMN : Pekerjaan yang *muspro*?

Penulis : Suroso

Foto : Canva

Setiap Satuan Kerja (Satker) baik sebagai pengelola barang maupun pengguna barang diwajibkan melakukan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Untuk Satker di bawah Kementerian/Lembaga, tata cara pelaksanaan Wasdal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (PMK 207/2021). Ketepatan waktu penyampaian laporan Wasdal merupakan indikator kinerja pengelolaan barang. Setiap satker berlomba-lomba menyampaikan laporan Wasdal secara tepat waktu untuk mendapatkan nilai tinggi Indikator Pengelolaan Aset (IPA).

Selain penyampaian laporan Wasdal secara tepat waktu, ada hal lain yang lebih penting, yaitu

bagaimana menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengendalian supaya BMN terkelola dengan baik. Dalam laporan Wasdal setidaknya terdapat informasi mengenai keseluruhan pengelolaan BMN yang tidak sesuai dengan ketentuan mulai dari penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan aset. Ketidaksesuaian pengelolaan aset yang tidak dilakukan proses perbaikan menjadi pembuatan laporan Wasdal yang sia-sia, yang dalam bahasa Jawa disebut "muspro" (pekerjaan yang sia-sia).

Dalam laporan Wasdal terdapat BMN yang belum dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP). Atas BMN yang belum PSP tersebut, setiap Satker yang mengelola barang dimaksud harus segera mengusulkan PSP dalam kesempatan pertama. Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN disini adalah kegiatan menetapkan penggunaan BMN yang digunakan dan dikuasai oleh satuan kerja yang mengusulkan PSP BMN sehingga BMN tersebut menjadi tanggung jawab dari satuan kerja yang mengusulkan. Kewenangan usulan PSP dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kepada Pengelola Barang (Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kementerian Keuangan) atau kepada Pengguna Barang. BMN yang PSP-nya diusulkan ke Pengelola Barang meliputi tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehannya lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per unit barang.

Sedangkan PSP yang ditetapkan oleh Pengguna Barang yaitu selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan dibawah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Di lapangan terkadang ditemukan terdapat BMN yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tertuang dalam PSP. Untuk itu, pencatatan BMN perlu dilakukan reklasifikasi dan juga perlu dilakukan pengusulan PSP ulang. Contoh terdapat BMN gedung kantor yang digunakan sebagai arsip. Apabila memang dalam jangka panjang lebih optimal diunakan untuk arsip, maka dilakukan alih fungsi dengan pengusulan PSP ulang yang selanjutnya dilakukan reklasifikasi pencatatan.

Dalam siklus penggunaan BMN, dimungkinkan juga terdapat penggunaan sementara atau terdapat BMN yang dioperasikan pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jika terdapat BMN yang digunakan sementara oleh Kementerian/Lembaga lain, perlu dilihat tujuan penggunaan dalam perjanjian dan persetujuan sementara tersebut. Apabila ditemukan penggunaan tidak sesuai dalam perjanjian, maka perlu dilakukan peneguran kepada instansi pemakai dan penggunaan sementara tersebut dapat dihentikan sepihak.

Selain itu, setiap Pengguna Barang diperkenankan mendayagunakan aset negara yang tidak digunakan penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan mengoptimalkan BMN tanpa mengubah status kepemilikan, seperti: disewakan, pinjam pakai, kerja sama

Wasdal sesuai dengan kenyataan baik yang sesuai ketentuan maupun yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN. Contohnya terdapat BMN yang dilakukan sewa tanpa persetujuan. Penyewaan BMN yang tidak sesuai ketentuan dimaksud harus segera ditindaklanjuti dengan berkoordinasi pihak-pihak terkait penyewaan BMN yang tanpa persetujuan tersebut, yang kemudian diurus legalitas penyewaan BMN dimaksud. Satker harus melakukan peneguran dan meminta penyewa untuk mengikuti prosedur tatacara pelaksanaan sewa.

Ketidaksesuaian pengelolaan BMN dengan peraturan perundang-undangan dimaksud dapat terjadi pada semua siklus, termasuk siklus pemindahtanganan BMN. Pemindahtanganan BMN diantaranya meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyerahan modal pemerintah pusat. Contohnya, terdapat penerima hibah yang tidak sesuai ketentuan, misal diberikan kepada oknum pegawai. Jika terdapat kasus tersebut, maka dilakukan pencabutan persetujuan hibah dan meminta pengembalian BMN yang dihibahkan.

Kemudian, ketidaksesuaian pengelolaan BMN dapat juga terjadi pada proses penatausahaan BMN, antara lain terjadi pencatatan ganda, tanggal perolehan lebih awal dari tanggal buku, kuantitas tidak normal, nilai perolehan minus, atau bisa juga terdapat nilai buku minus. Ketidaksesuaian penatausahaan tersebut dicantumkan dalam laporan Wasdal dan harus segera dilakukan perbaikan pencatatan yang dalam hal ini menggunakan aplikasi SIMAN. Selain itu,

dalam penatausahaan juga perlu ditindaklanjuti BMN hilang/ rusak ringan/ rusak berat, tindak lanjut BMN untuk diserahkan ke masyarakat, tindak lanjut BMN yang sudah terbit persetujuan penghapusan, serta tindak lanjut pencatatan aset tetap renovasi.

Ketidaksesuaian pengelolaan BMN juga dapat terjadi pada siklus pengamanan dan pemeliharaan BMN. Ketidaksesuaian pengamanan BMN contoh terdapat oknum pensiunan yang tetap menguasai dan menghuni rumah negara. Satker harus melakukan peneguran dan jika perlu dilakukan pengusiran dengan bekerjasama penegak hukum. Ketidaksesuaian pemeliharaan BMN dapat terjadi apabila Satker yang mempunyai bangunan yang rusak ringan namun tidak mengajukan anggaran pemeliharaan dalam Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) yang dapat berakibat BMN menjadi rusak berat. Jika terjadi hal tersebut, Satker harus mengajukan perubahan RKBMN agar selanjutnya BMN tersebut terpelihara dan dalam kondisi yang baik.

Laporan Wasdal merupakan laporan internal atau laporan yang sifatnya manajerial. Tujuannya menjadi alat evaluasi sejauh mana pengelolaan BMN sudah tertib hukum dan administrasi. Keseluruhan ketidaksesuaian pengelolaan BMN seyogyanya dituangkan dalam laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal). Namun, menjadi hal yang muspro kalau ketidaksesuaian pengelolaan BMN dalam laporan Wasdal tidak ditindaklanjuti. Tahapan penertiban BMN setelah adanya laporan Wasdal merupakan tahapan yang wajib dilakukan setiap Satker.



pemanfaatan, bangun guna serah/ bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur, atau bisa juga kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Setiap pemanfaatan BMN tersebut harus disampaikan dalam laporan

Penguatan Ekosistem Pengadaan Yang Inklusif : Transformasi Digital Pengadaan

Penulis : Edy Gunawan

Penguatan Ekosistem Pengadaan merujuk kepada suatu upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, kolaborasi, serta keberlanjutan dalam proses pengadaan barang/jasa yang mendukung tujuan pengadaan barang/jasa secara nasional yaitu peningkatan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK).

Desain penguatan ekosistem pengadaan yang inklusif dilakukan melalui transformasi digital pengadaan dengan mengadopsi teknologi digital serta mengubah cara kerja dan budaya organisasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Transformasi digital pengadaan di Kementerian Keuangan didasarkan pada empat pilar utama yang bertujuan untuk memperkuat organisasi UKPBJ.

Pilar pertama adalah perubahan pola kerja dan tata kelola menuju organisasi yang unggul dan sentralisasi pengadaan, mencakup integrasi fungsi *Center of Excellence* (CoE) dengan manajemen kinerja, sentralisasi layanan pengadaan di seluruh Indonesia, serta perubahan regulasi sesuai kebutuhan terkini. Pilar kedua adalah simplifikasi proses bisnis untuk menciptakan organisasi yang lebih efektif dengan mengurangi birokrasi. Ini dilakukan melalui otomatisasi dan interkoneksi prosedur



Foto : Canva

administrasi, percepatan alur administratif, serta penghapusan prosedur manual. Pilar ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia yang berdaya, dengan fokus pada perencanaan dan pengelolaan SDM yang dinamis dan agile. Peningkatan kompetensi SDM secara terstruktur, penciptaan *Community of Practice* (CoP), dan manajemen pengetahuan menjadi bagian penting dari pilar ini serta pembentukan SDM yang mumpuni bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan Manajemen talenta yang cermat. Pilar keempat adalah penerapan data-driven, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas berdasarkan analitik data dan kecerdasan buatan (AI), mencakup prediksi kebutuhan anggaran, rekomendasi spesifikasi/harga dapat lebih presisi, dan efisiensi proses pemilihan waktu, serta prediksi resiko (deteksi penipuan/fraud) secara *real-time*.

Keempat pilar penguatan organisasi UKPBJ Kementerian Keuangan diimplementasikan melalui lima inisiatif utama yang saling mendukung. Pertama, digitalisasi proses pengadaan yang memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi dan memantau pengadaan, sehingga mengurangi kesalahan manusia dan duplikasi administrasi. Kedua, transparansi dan akuntabilitas yang meningkatkan keterbukaan informasi, mencegah konflik kepentingan, dan korupsi. Ketiga, peningkatan kapasitas yang berfokus pada peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, memastikan mereka memiliki pengetahuan dan

keterampilan yang diperlukan. Keempat, kolaborasi dan kemitraan yang memperkuat kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi inovatif dan efisien dalam pengadaan.

Terakhir, *sustainability* yang memastikan barang dan jasa yang dibeli memberikan nilai terbaik tidak hanya dari segi biaya, tetapi juga dari segi dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mendukung praktek berkelanjutan.

Setiap inisiatif dalam transformasi digital pengadaan di Kementerian Keuangan menghasilkan berbagai inovasi yang saling mendukung. Pertama, digitalisasi dan otomatisasi pengadaan melahirkan dua inovasi utama: sistem informasi manajemen pengadaan langsung *next generation* (SIMPEL-NG) dan *contract management system* (CMS) Kemenkeu. Kedua, peningkatan transparansi menghasilkan dua inovasi: implementasi standar sistem manajemen keamanan informasi (S2MKI) dan helpdesk chat-bot (HeCaB). Ketiga, peningkatan kapasitas mencakup empat inovasi: sistem profil risiko berbasis AI (SiProko-AI), *procurement knowledge management system* (Pro KMS), embracing digital years (EDY), dan *community of practice* (COP). Keempat, kolaborasi dan kemitraan menghasilkan dua inovasi: *digipay market place* (DigiPay) dan *cost project management* (Cost Pro). Terakhir, inisiatif *sustainability* menghasilkan inovasi *eco office certification* (EOC).

Digital Payment Market Place (DigiPay) adalah transformasi digital dalam sistem pembayaran pengadaan barang/jasa yang dirancang untuk memudahkan proses transaksi pemerintah yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Sistem ini menyediakan informasi *real-time* mengenai anggaran yang tersedia, histori pembayaran, dan kinerja penyedia, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan anggaran. DigiPay telah diakui sebagai inovasi terbaik di Kementerian Keuangan pada tahun 2023 dan sedang dalam proses pendaftaran hak cipta. Inovasi ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan kualitas pengadaan, serta mendukung kompetensi KPA, PPK, dan penyedia barang/jasa.

Community of Practice (COP) memungkinkan para praktisi pengadaan, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), KPA, dan penyedia barang/jasa, untuk berbagi pengetahuan, praktik terbaik, dan solusi inovatif secara efektif. Secara keseluruhan, CoP menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan peningkatan kompetensi, memastikan bahwa proses pengadaan berjalan lebih efisien dan transparan, serta menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan.

Embracing Digital Years (EDY) adalah inovasi UKPBJ Kementerian Keuangan dengan menyediakan berbagai kegiatan berupa workshop, seminar, dan diskusi bagi pelaku pengadaan, termasuk KPA, Pejabat Pengadaan, PPK, dan penyedia barang/jasa yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan implementasi praktik pengadaan melalui digitalisasi. Melalui EDY, peserta dapat memperoleh wawasan terbaru tentang inovasi dalam pengadaan barang/jasa, serta memungkinkan penghematan anggaran melalui penggunaan teknologi digital.

Procurement Knowledge Management System (Pro KMS) adalah sistem yang dirancang untuk menyediakan platform pengetahuan berkualitas bagi seluruh pelaku pengadaan barang/jasa, termasuk KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan penyedia barang/jasa. Sistem ini menawarkan pengetahuan yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru dan mengadopsi pendekatan manajemen pengetahuan berbasis digital. Pro KMS juga membantu mengotomatisasi proses manajemen pengetahuan, mengurangi biaya operasional, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia.

Sistem Profil Risiko berbasis Artificial Intelligence (SiProko-AI) adalah sistem yang dirancang untuk memberikan penilaian risiko terhadap pelaku usaha menggunakan sistem berbasis data AI. Sistem ini mampu memberikan rekomendasi berdasarkan data historis, secara otomatis memetakan risiko penyedia calon peserta tender menjadi kategori rendah, sedang, atau tinggi. Selain itu, SiProko-AI menyediakan informasi tambahan yang mendukung evaluasi tender, membantu menetapkan pemenang tender yang berkualitas, dan memberikan sistem peringatan dini yang bermanfaat bagi PPK dalam manajemen kontrak.

Cost Project Management (Cost Pro) mengelola kemitraan antara Kementerian Keuangan dan Bank Himbara untuk menyelesaikan masalah pembiayaan kontraktor, terutama terkait modal kerja yang dibutuhkan dalam kontrak pengadaan barang/jasa. Program ini memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat bagi kontraktor, sehingga mereka dapat mengatasi kendala modal kerja yang sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek. Program ini mematuhi prinsip efektivitas dan efisiensi, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar dalam layanan publik dan penghematan anggaran.

Eco Office Certification (EOC) mengintegrasikan praktik pengadaan ramah lingkungan dengan prinsip keberlanjutan dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Program ini dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih hijau dengan menerapkan standar pengadaan yang memprioritaskan produk dan layanan yang mendukung keberlanjutan. EOC merupakan pengembangan dari kebijakan Eco Office Kementerian Keuangan, yang bertujuan untuk mendorong perubahan sistem kerja di kalangan pelaku pengadaan dan penyedia barang/jasa.

Sistem Informasi Manajemen Langsung Next Generation (SIMPEL-NG) dirancang untuk mengatasi tantangan dalam implementasi sistem e-procurement, khususnya dalam mengotomatisasi pengadaan langsung dengan desain yang mudah diterapkan. Sistem ini mampu mengubah proses transaksi pengadaan langsung yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi otomatis, menyediakan informasi referensi spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan kinerja penyedia. Pada tahun 2022, SIMPEL-NG diakui sebagai salah satu dari lima inovasi terbaik di Kementerian Keuangan dan telah didaftarkan hak ciptanya untuk pengakuan resmi.

Contract Management System (CMS) Kemenkeu memberi manfaat kemudahan dalam melakukan pemantauan pelaksanaan kontrak secara menyeluruh mulai dari tahap persiapan kontrak, pelaksanaan kontrak, sampai dengan serah terima dan pembayaran. CMS Kemenkeu mengubah pelaksanaan pemantauan kontrak menjadi terotomatisasi dan memiliki informasi terkait progres dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak. CMS Kemenkeu dapat mengoptimalkan PPK dan Tim Asistensi untuk dapat bekerja lebih efisien serta dimana dan kapan saja.

Implementasi **Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (S2MKI)** di UKPBJ Kementerian Keuangan mengatasi masalah keamanan informasi dengan menerapkan Standar ISO 27001. Sejak tahun 2012, S2MKI telah diterapkan untuk meningkatkan keamanan sistem e-procurement dan membangun kepercayaan stakeholder terhadap keamanan data. S2MKI membantu mengoptimalkan sumber daya manusia di UKPBJ Kementerian Keuangan, memastikan keamanan informasi berjalan lebih efektif dan efisien, serta mengurangi risiko akibat kebocoran informasi.

Helpdesk Chat-Bot (HeCaB) adalah sistem yang dirancang untuk menyediakan layanan konsultasi pengadaan barang/jasa selama 24/7 melalui sistem percakapan otomatis pada perangkat seluler atau smartphone. Manfaat utama HeCaB adalah kemampuannya untuk menyediakan layanan konsultasi kapan saja dan dimana saja. HeCaB mengubah cara layanan yang sebelumnya hanya tersedia melalui tatap muka, telepon, atau email pada jam kerja menjadi layanan yang tersedia 24 jam sehari. HeCaB telah diakui dengan penghargaan Peringkat Terbaik Pertama Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 oleh Ombudsman RI.

Mengapa Marak Banting Harga Pada Tender Konstruksi Pemerintah?

Penulis :Muhammad Iqbal Mutaqin

Dalam sebuah pertemuan dengan para pengusaha konstruksi, Presiden Joko Widodo mengangkat isu maraknya banting harga dalam tender proyek konstruksi pemerintah. Beliau mengatakan, "Urusan lelang, urusan harga penawaran. Ini Gapensi ini kan tidak pernah lepas dari ini, harga penawaran. Yang saya lihat dari jauh, biasanya banting-bantingan harga supaya menang proyek. Benar ndak? Enggak apa-apa. Kompetisi itu baik, bersaing itu baik. Tetapi kalau sudah membanting harga, itu yang tidak baik." (Joko Widodo, 31 Juli 2024) .

Pernyataan Presiden Jokowi mengenai "supaya menang" dan "kompetisi" sangat relevan dalam menjelaskan fenomena maraknya banting harga di kalangan kontraktor. Motivasi untuk memenangkan tender ditambah dengan kemudahan syarat dalam pengadaan pemerintah telah menciptakan situasi dimana perang harga menjadi hal yang umum. Statistik dari hasil tender konstruksi di Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa mayoritas harga pemenang tender berada di kisaran 80% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau bahkan lebih rendah.

Angka dan Implikasinya

Data dari Kementerian Keuangan selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa mayoritas tender dimenangkan oleh kontraktor yang menawarkan

harga rendah. Sekitar 75% tender dimenangkan oleh kontraktor dengan harga di kisaran 80% dari HPS atau bahkan lebih rendah. Sebaliknya, kontraktor yang memenangkan tender dengan harga di kisaran 85% dan 90% HPS hanya mencakup sekitar 10% dari tender, sementara hanya sebagian kecil tender yang menghasilkan harga di atas 96% HPS.



Grafik Harga Pemenang Tender Konstruksi Kementerian Keuangan Tahun 2021 - 2024. Sumber: SPSE.

HPS yang disusun oleh pemilik pekerjaan telah memperhitungkan berbagai aspek untuk memastikan kualitas pekerjaan yang optimal. Dari sisi teknis, komponen biaya dalam HPS dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan guna mencapai hasil yang terbaik. Dari segi kewajaran biaya, nilai HPS dihitung berdasarkan harga pasar yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran legal dan materialnya.

Sesuai dengan regulasi pengadaan, nilai HPS dari pemilik pekerjaan juga telah direviu kewajarannya setidaknya

sebanyak dua kali. Yang pertama dilakukan bersama tim teknis dan konsultan perencana saat sebelum HPS ditetapkan, sedangkan reviu kedua dilakukan oleh panitia lelang sebelum tender dimulai. Dengan demikian, semakin besar jarak selisih antara harga kontrak dengan HPS, semakin tinggi pula risiko terhadap kualitas hasil pekerjaan.

Terkait dengan risiko yang muncul akibat rendahnya harga kontrak, studi yang dilakukan oleh Mutaqin, M.I. (2023) mengungkapkan bahwa fenomena banting harga membuat kontrak konstruksi sangat rentan terhadap eksploitasi. Setelah persaingan harga yang ketat pada tahap tender, kontraktor sering mencari celah untuk mendapatkan tambahan pembayaran melalui adendum kontrak. Dalam situasi ini, kualitas pekerjaan juga berpotensi terpengaruh, di mana kontraktor berusaha tetap meraih keuntungan meskipun mereka telah melakukan penawaran dengan harga yang sangat rendah.

No	Aspek	Persyaratan	Keterangan
1	Kualifikasi	ijin usaha konstruksi	Dokumen administratif, tidak menunjukkan kualitas kinerja
2	Kualifikasi	Sertifikat Badan Usaha	Dokumen administratif, tidak menunjukkan kualitas kinerja
3	Kualifikasi	Akta Perusahaan	Dokumen administratif, tidak menunjukkan kualitas kinerja
4	Kualifikasi	NPWP, status KSWP valid	Dokumen administratif, tidak menunjukkan kualitas kinerja
5	Kualifikasi	Tidak masuk daftar hitam	Rekam jejak, namun tidak menunjukkan kualitas kinerja. Peserta daftar hitam secara sistem tidak bisa mengikuti tender.
6	Kualifikasi	Mempunyai 1 pengalaman dalam 4 tahun terakhir	Rekam jejak, namun tidak menunjukkan kualitas kinerja
7	Teknis	Metodologi pekerjaan	Hanya untuk pekerjaan kompleks dan/atau bagi kualifikasi usaha besar
8	Teknis	Bukti kepemilikan/sewa peralatan utama	Dokumen administratif, tidak menunjukkan kualitas kinerja
9	Teknis	Bukti kemampuan menyediakan personal manajerial	Dokumen administratif, tidak menunjukkan kualitas kinerja
10	Teknis	Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	Dokumen administratif, tidak menunjukkan kualitas kinerja
11	Harga	Tidak melebihi HPS. Uji kewajaran harga apabila < 80% HPS.	Tidak menunjukkan kualitas kinerja. Dirangking, dari harga terendah ke tertinggi.

Standar Persyaratan Tender Konstruksi. Sumber: Peraturan LKPP No. 12/2021

Peraan Regulasi dalam Persaingan Harga

Menariknya, fenomena perang harga di tender konstruksi sebenarnya merupakan akibat dari regulasi pemerintah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, persyaratan tender menjadi lebih longgar. Pelonggaran ini dimaksudkan untuk mendukung iklim kemudahan berusaha, seperti dihapuskannya syarat kemampuan keuangan dan naiknya batasan nilai tender khusus untuk usaha kecil, dari Rp2,5 miliar menjadi Rp15 miliar.

Semangat kemudahan ini tentunya mengurangi hambatan bagi pelaku usaha untuk mengikuti tender. Dengan hambatan yang lebih rendah, jumlah peserta tender meningkat, sehingga menciptakan iklim persaingan yang sangat kompetitif. Regulasi tender pemerintah di sektor konstruksi yang menekankan persaingan harga dibandingkan rekam jejak dan kualitas juga semakin mendorong fenomena banting harga.

Apabila kita memeriksa detail persyaratan kualifikasi dan teknis

tender konstruksi sesuai Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, akan terlihat bahwa persyaratan tender lebih bersifat pemenuhan dokumen administratif yang tidak menunjukkan kualitas kontraktor.

Dari uraian standar persyaratan sesuai Peraturan LKPP No. 12/2021, dapat diketahui bahwa kredibilitas dan kualitas kontraktor bukanlah merupakan syarat yang dipertandingkan dan dirangking. Setelah memenuhi semua syarat minimal, maka harga menjadi elemen yang sangat menentukan dalam memenangkan tender.

Upaya Menghadapi Fenomena Banting Harga

Dalam menghadapi fenomena banting harga, pemilik pekerjaan dan panitia lelang berupaya mengambil langkah-langkah inovatif tanpa melanggar aturan. Beberapa upaya tersebut termasuk menambah persyaratan di luar standar minimal yang telah diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Beberapa tambahan persyaratan untuk menaikkan standar peserta, diantaranya adalah:

1. Kepemilikan tempat usaha, dengan alamat yang tetap dan

2. Pengaturan keikutsertaan perusahaan cabang;
3. Surat pernyataan mengenai kewajaran harga;
4. Syarat dukungan material utama dari distributor resmi; dan
5. Pengalaman pekerjaan sejenis dengan referensi baik.

Penambahan persyaratan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas peserta tender. Sehingga hanya kontraktor yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat dipertandingkan harganya. Syarat tambahan di atas juga memberikan sinyal kepada kontraktor yang kredibel supaya memberikan harga penawaran yang wajar.

Dengan upaya tersebut, diharapkan proses lelang dapat berjalan lebih transparan dan adil, serta mengurangi praktik banting harga yang sering kali merugikan semua pihak. Peningkatan kualitas peserta tender tidak hanya akan berkontribusi pada hasil pekerjaan yang lebih baik, tetapi juga pada keberlangsungan industri konstruksi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Mitigasi Risiko Pada Sistem E-Purchasing

Penulis : Yelly Metasari



Sumber : voaindonesia.com



Sumber : kompas.id

Pengadaan barang dan jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang mengedepankan prinsip “Value for Money”. Prinsip tersebut dikembangkan melalui platform berupa produk pengadaan berupa *system E-Purchasing*. Alternatif pengadaan ini diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Saat ini pada e-katalog.lkpp.go.id, dalam link Katalog Sektorial Kementerian Keuangan, sudah

tersedia 11 (sebelas) etalase baik yang disediakan dari LKPP maupun yang dibuat Kementerian Keuangan.

Metode *E-Purchasing* ini dilaksanakan dimana badan/ Lembaga publik dapat membeli secara langsung melalui katalog elektronik maupun Toko daring. Sistem pembelian langsung atau *E-Purchasing* merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pencegahan Korupsi. Pejabat Pengadaan bertanggung jawab pada persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

Katalog elektronik untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin populer, meningkatkan efisiensi,

transparansi, dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, meskipun sistem belanja online yang dibangun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dianggap sebagai sistem yang dapat mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, kecurangan masih terjadi.

Berdasarkan berita di atas, dapat kita ketahui bahwa walaupun metode pelaksanaan pemilihan penyedia sudah menggunakan *E-Purchasing*, namun tetap ada celah dalam pelaksanaan *E-Purchasing*. Lalu, risiko apa saja yang dapat terjadi pada proses *E-Purchasing* dan apa saja mitigasi risiko yang dapat dilakukan.

E-Purchasing

E-Purchasing adalah Pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Petunjuk teknis pelaksanaan dari sisi regulasi mengenai *E-Purchasing* adalah peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia yang disingkat LKPP RI telah menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ada dua jenis sarana *E-Purchasing* :

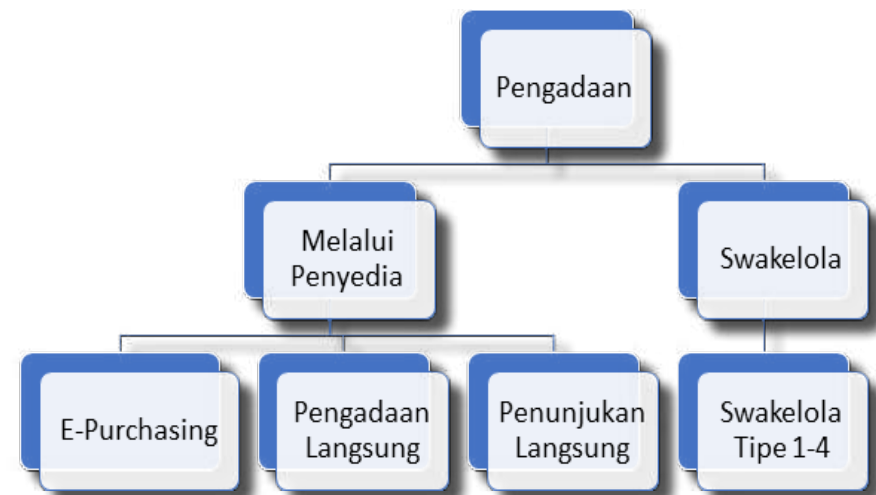
- Katalog Elektronik;
- Toko Daring.

Cara melaksanakan Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring yaitu :

- Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian hasil pemilihan penyedia melalui *E-Purchasing* diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.

Tujuan dari *E-purchasing* sendiri adalah untuk memfasilitasi proses pemilihan barang dan jasa secara langsung melalui sistem e-katalog, sehingga semua UKPBJ dapat memilih barang dan jasa yang paling cocok dengan efisiensi biaya dan dengan waktu proses yang lebih cepat daripada metode tender lainnya.

- Tahapan Alur Pembelian barang/jasa menggunakan katalog:
1. Pemesanan Barang/Jasa, LKPP menayangkan daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan pada Katalog Elektronik Nasional melalui aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP pada <https://e-katalog.lkpp.go.id>. Barang/jasa yang ada di e-katalog yaitu barang/jasa dibutuhkan oleh beberapa Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, barang/jasa standar atau dapat distandarkan dan merupakan kebutuhan 7 barang/jasa bersifat berulang.
 2. Perjanjian Pembelian Barang/ Jasa. PPK mendownload Perjanjian Pembelian setelah terjadi persetujuan permintaan pembelian antara PPK dan penyedia.
 3. Pengiriman dan Penerimaan Barang atau Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Jasa. Penyedia mengirimkan barang



Alur pengadaan (E-Purchasing) Pasal 1 angka 35 dan Pasal 38 ayat (2) Perpres 12 Tahun 2021

selambat-lambatnya lima hari kerja sejak tanggal transaksi untuk area Jabodetabek, sedangkan untuk area di luar jabodetabek selambat-lambatnya dilakukan tujuh hari kerja sejak tanggal transaksi pada aplikasi *E-Purchasing*.

4. Pembayaran, dilakukan setelah PPK menerima barang dimana barang tersebut sudah sesuai spesifikasi barang yang dipesan dan dibuktikan dengan penandatanganan BAST oleh PPK dan penyedia barang.

Pengadaan pemerintah yang efektif dan efisien sangat penting untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik. *E-Procurement* yang dilakukan melalui katalog elektronik, merupakan kemajuan teknologi. Meskipun ada keuntungan, tantangan dan kemungkinan kecurangan dalam penggunaan *E-Purchasing* menunjukkan bahwa analisis dan penelitian mendalam diperlukan.

Di beberapa kasus, seperti pengadaan jasa umroh dan CCTV di atas, kecurangan atau penipuan ditemukan melalui

analisis pengadaan melalui Katalog Elektronik/Toko Daring. Ini termasuk persekongkolan antara penyedia dan pejabat pengadaan, transaksi palsu, penyalahgunaan kemampuan negosiasi, pemilihan barang yang tidak sesuai aturan, dan kurangnya pemeriksaan terhadap barang yang diterima.

Risiko pada Sistem E-Purchasing

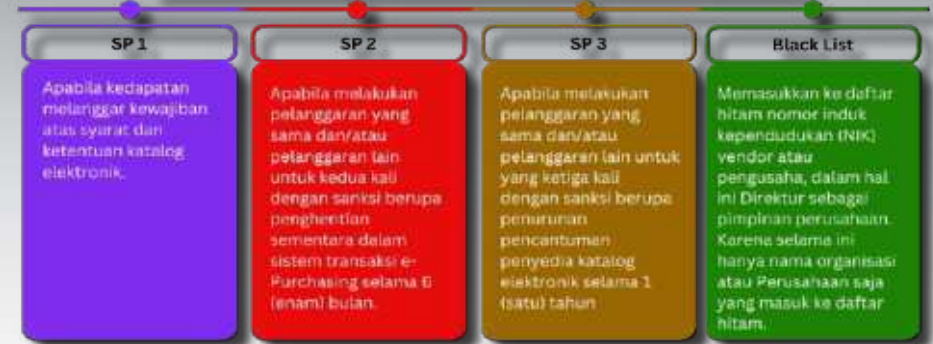
Risiko berdasar ISO 31000 adalah dampak/akibat dari ketidakpastian pada sasaran. Risiko dalam pengadaan barang dan jasa adalah dampak/akibat dari ketidakpastian terhadap sasaran dari Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan pengadaan menggunakan *E-Purchasing* sebenarnya memberikan dampak positif yang dapat bermanfaat bagi entitas pengadaan seperti, K/L/D/I tidak perlu lagi melaksanakan tender, lebih efisien dari sisi sumber daya manusia, waktu dan biaya, PPK dapat memilih produk sesuai kebutuhan, lebih transparan karena harga dan spesifikasi teknis

pengadaan barang/jasa dapat diakses oleh siapa saja. Namun, dalam pelaksanaannya, Risiko pada *E-Purchasing* sering terjadi. Risiko yang kerap terjadi pada pelaksanaan *E-Purchasing* antara lain:

- Terjadi pesengkongkolan antara penyedia dan PPK dalam hal pengaturan harga barang/jasa yang ditawarkan, biasanya dikenal dengan modus biaya "Klik".
- Adanya ongkos kirim yang fiktif yang telah diatur sedemikian rupa oleh penyedia dan PPK. PPK menerima ongkos kirim saat mengambil barang di Lokasi penyedia.
- User meminta penyedia untuk mengupload barang lalu, PPK membeli dengan transaksi satu kali. Kemudian barang tersebut ditarik atau tidak pernah dibeli oleh institusi manapun.
- Sehingga, hanya 1 instansi terkait yang membeli.
- PPK memilih barang bukan harga yang paling murah.
- PPK tidak melakukan pengecekan terhadap barang yang datang sesuai spesifikasi yang ditawarkan.

SURAT PERINGATAN PADA PELANGGAR KATALOG ELEKTRONIK



Mitigasi Risiko Pengadaan E-Purchasing

Risiko tidak dapat sepenuhnya dihindari, risiko perlu dikelola agar tetap dalam batas aman untuk diterima. Pada tahap perencanaan, peran UKPBJ maupun user sangat krusial yaitu menginventarisasi paket yang akan dilakukan *E-Purchasing*, pada pelaksanaan *E-Purchasing*, PPK dituntut untuk dapat menyusun dokumen persiapan pengadaan seperti KAK, Spesifikasi teknis (menetapkan kriteria yang jelas), RAB, Rancangan kontrak dengan baik. Lalu memilih penyedia terbaik di *E-Catalog* sesuai kebutuhan. Selain itu, PPK juga dapat melakukan mitigasi seperti melakukan *screenshot* atau foto setiap proses, karena etalase *E-Catalog* cepat sekali berubah. Vendor dengan mudah dan cepat dapat mengubah harga dan isi etalase setiap saat. Akuntabilitas harga, jangan sampai terindikasi *mark up* atau *overpriced*.

Dari sisi UKPBJ tentunya diperlukan pendampingan dan pengawasan persyaratan pada dokumen pengadaan, melakukan monitor produk dan harga yang tayang pada katalog elektronik. Selain sisi User, PPK, Vendor, diperlukan

juga kontribusi dari LKPP dalam rangka memitigasi risiko terkait pelaksanaan *E-Purchasing* ini, yaitu, mengembangkan *e-audit* dan pemanfaatan *open source intelligent*. fitur pengawasan e-Audit yang nantinya dapat diakses oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan belanja pemerintah melalui katalog elektronik.

Fitur tersebut memberikan pedoman pengawasan untuk pengadaan menggunakan katalog elektronik, yang cenderung cepat dan tidak dapat dihindari perubahan harga oleh penyedia, transaksi ke penyedia yang sama berulang, kecepatan transaksi pertama dan kecepatan status, dan membuka data transaksi katalog elektronik secara transparan.

Untuk memastikan bahwa modus korupsi dapat dilacak dan terintegrasi dengan LKPP, KPK, dan BPKP melalui pengawasan *e-audit*. Sistem pengawasan ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat yang bisa dimanfaatkan oleh APIP, untuk melakukan analisis terhadap modus-modus transaksi yang terindikasi anomali. diharapkan APIP dapat terbantu untuk lebih cepat mengidentifikasi adanya

potensi penyimpangan proses pengadaan melalui dashboard yang akan menampilkan rincian transaksi *E-Purchasing*.

LKPP menggalakan pemberian Surat Peringatan pada pelanggar katalog elektronik dapat menjadi langkah yang ditempuh untuk menegakkan disiplin dan memberikan klarifikasi terkait pelanggaran yang dilakukan. Seluruh Penyedia Katalog Elektronik dapat melakukan pengecekan secara berkala untuk mengetahui daftar penyedia yang dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan oleh Pengelola Katalog Elektronik melalui laman berikut: <https://e-katalog.lkpp.go.id/> pelanggaran.

Mitigasi risiko pada pelaksanaan e-purchasing yang telah dilakukan oleh PPK, Pejabat Pengadaan, User dan Pemerintahan tentu saja tidak akan berjalan sempurna tanpa peran dari vendor/pengusaha barang/jasa. Peranan vendor sangat penting yaitu berani bertindak jujur, mengambil keuntungan sewajarnya saja, itu kunci untuk menghindari korupsi demi terwujudnya pelaksanaan pengadaan yang baik dengan mengedepankan prinsip efisien biaya dan waktu.

INFOGRAFIS TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO PADA E-PURCHASING



Antara Proteksi dan Liberalisasi Pelajaran dari Korea Selatan, Brazil, dan Indonesia

Penulis : Muhammad Iqbal Mutaqin

Dalam memajukan industri dan perdagangan suatu negara, pengutamakan produk dan pelaku usaha dalam negeri menjadi salah satu strategi andalan. Kebijakan ini, yang dikenal sebagai proteksionisme, memiliki dampak yang beragam di berbagai negara. Contoh keberhasilan proteksionisme dapat kita lihat di Korea Selatan, yang berhasil memajukan industrinya melalui gerakan yang dikenal dengan jargon “*Jarip Gyongje*” atau “Ekonomi Berdikari”. Di sisi lain, Brazil menunjukkan contoh kegagalan, di mana kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk produk komputer melalui “*Política Nacional de Informática*” justru berujung pada kegagalan pasar dalam industri teknologi informasi mereka.



Ilustrasi : Artificial Intelligent

Strategi proteksi produk dan pelaku usaha domestik juga telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan. Program pertama adalah Gerakan Benteng pada tahun 1950-an, kemudian diikuti oleh Program Penghapusan dan Insentif selama Orde Baru. Saat ini, kebijakan pro konten lokal yang bernama Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) mengalami berbagai dinamika dalam proses implementasinya. Program ini tidak lepas dari pro dan kontra, dan beberapa inisiatif bahkan menghasilkan hasil yang melenceng dari tujuan awalnya.

Niat baik pemerintah untuk memajukan industri melalui proteksionisme tidak selalu berujung pada hasil yang diharapkan. Apabila kebijakan proteksi tidak dikelola dengan baik, efek positif yang diinginkan bisa berubah menjadi bencana. Oleh karena itu, Indonesia perlu belajar dari pengalaman sendiri serta mengambil pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan negara lain, seperti Korea Selatan dan Brasil, dalam merumuskan kebijakan proteksi produk TKDN.

Dengan memahami dinamika ini, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional.

Kisah Sukses 20 Tahun Jarip Gyongje Korea

Gerakan “*Jarip Gyongje*” atau “Ekonomi Berdikari” merupakan contoh sukses strategi Korea Selatan dalam menyeimbangkan kebijakan ekonomi proteksi dan liberal. Pada tahun 1950-an, negara ini termasuk salah satu yang termiskin di dunia, namun

berhasil bertransformasi menjadi negara industri yang kompetitif pada tahun 1970-an. Keberhasilan ini tidak terlepas dari perlindungan pemerintah terhadap industri rintisan dan penerapan regulasi TKDN sejak tahun 1960-an.

Di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Park Chung Hee (1961-1979), Korea menerapkan kebijakan ekonomi dengan dua tujuan utama: mendorong ekspor dan mendukung industri rintisan. Strategi yang digunakan meliputi kebijakan pasar bebas untuk industri mapan dan perlindungan bagi industri baru. Hasilnya, Nilai investasi di tahun 1962 yang hanya mencapai 12.8% dari produk nasional bruto (PNB) melonjak menjadi 35.7% PNB di tahun 1979. Ekspor juga mengalami peningkatan pesat, dari 2.4% PNB di tahun 1962 menjadi 31% PNB di 1979.

Kunci sukses Park terletak pada pemilihan sektor industri yang tepat untuk dilindungi serta alokasi sumber daya yang tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar. Dengan dukungan dari The Economic Planning Board (EPB), Korea Selatan berhasil mengembangkan berbagai sektor industri, termasuk teknologi tinggi, sebelum akhirnya membuka diri terhadap perdagangan bebas pada tahun 1998.

Kegagalan Proteksionisme Brazil

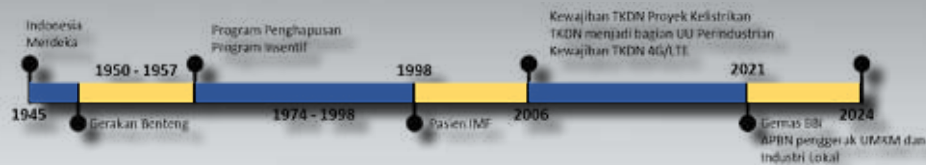
Program “*Política Nacional de Informática*” menjadi contoh nyata kegagalan strategi Brazil dalam melindungi produk lokal. Kebijakan anti-impor produk komputer yang diterapkan Brazil pada tahun 1970 hingga 1992 justru mengakibatkan

kegagalan pasar di sektor teknologi informasi. Alih-alih meningkatkan daya saing dan inovasi pabrikan lokal, proteksi ini malah membuat harga komputer lokal melambung tinggi dengan kualitas yang tertinggal.

Selama masa proteksi, pemerintah Brazil melarang penjualan komputer asal luar negeri. Lebih jauh lagi, karena dianggap sebagai industri vital bagi keamanan nasional, pabrikan asing seperti IBM dan Apple dilarang untuk membangun pabrik di Brazil. Harapan pemerintah adalah bahwa kebijakan proteksi yang ekstrim ini akan mendorong industri komputer lokal menjadi semakin efisien dan berkembang teknologinya.

Namun, ketiadaan kompetitor asing justru menyebabkan berbagai konsekuensi negatif. Pertama, harga komputer lokal menjadi sangat mahal, sementara kualitasnya tertinggal jauh dari produk internasional. Kedua, kebijakan TKDN hanya efektif di area belanja pemerintah dan bisnis formal. Ketiga, masyarakat kalangan bawah lebih memilih untuk membeli komputer impor dari pasar gelap yang lebih murah dan berkualitas lebih baik.

Akibatnya, ketika kebijakan proteksi dicabut pada tahun 1992, pabrikan lokal yang sebelumnya terlindungi harus bersaing dengan produk asing dan banyak yang terpaksa gulung tikar. Seandainya Brazil memanfaatkan masa proteksi untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi, mungkin kisahnya akan seindah Korea Selatan.



Linimasa Kebijakan Pro Konten Lokal di Indonesia

Dinamika Kebijakan Konten Lokal Indonesia

Kebijakan proteksi produk domestik di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan dan dapat dibagi menjadi empat fase penting. Fase pertama terjadi pada masa awal kemerdekaan, di mana Gerakan Benteng menjadi tonggak awal upaya perlindungan terhadap pengusaha lokal. Fase kedua ditandai dengan penerapan Program Insentif dan Program Penghapusan yang berlangsung selama era Orde Baru, bertujuan untuk memberikan dukungan bagi industri otomotif dalam negeri.

Fase ketiga merupakan masa liberalisasi ekonomi, ketika Indonesia menjadi salah satu pasien IMF pada tahun 1998 – 2006. Sedangkan fase terakhir adalah era proteksionisme pasca reformasi, di mana pemerintah menggalakkan TKDN di berbagai bidang serta menggunakan APBN sebagai alat penggerak industri domestik dan UMKM.

Gerakan Benteng pada masa Orde Lama berakhir dengan hasil yang mengecewakan. Program pemberdayaan pribumi melalui pemberian kredit dan lisensi impor melenceng dari tujuan semula. Lisensi impor yang seharusnya diperuntukkan bagi pengusaha pribumi justru menjelma menjadi perusahaan "Ali-Baba", dimana secara tertulis dimiliki oleh pribumi, namun pada kenyataannya dijalankan oleh pengusaha Cina.

Sementara itu, Program Penghapusan dan Program Insentif yang digagas pemerintah Orde Baru menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan. Kedua program ini berhasil mengembangkan industri otomotif nasional. Namun, karena target pemasarannya didominasi oleh sektor domestik, ketika krisis ekonomi melanda pada tahun 1998, penurunan penjualan otomotif nasional membuat industri terkait terpaksa gulung tikar.

Krisis ekonomi 1998 telah memaksa Indonesia untuk menjadi pasien International Monetary Fund (IMF). Ketika menjadi pasien IMF, kebijakan perdagangan dan industri Indonesia harus sejalan dengan semangat liberalisasi sebagai salah satu syarat untuk dapat menerima bantuan. Selama periode 1998 hingga 2006, kebijakan industri dan perdagangan Indonesia cenderung liberal tanpa proteksi.

Setelah menjadi pasien IMF, pemerintah pasca reformasi kembali aktif mendorong proteksi produk lokal. Tonggak awalnya adalah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2010 yang mewajibkan produk TKDN untuk proyek ketenagalistrikan. Kemudian, kewajiban pemberdayaan industri komponen otomotif lokal melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 80 Tahun 2014. Pada level undang-undang, regulasi yang pertama kali mewajibkan

penggunaan produk TKDN pada PBJ pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Pada sektor PBJ Pemerintah, melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, Presiden mengamanatkan bahwa paling tidak 40% PBJ pemerintah harus dibelanjakan ke produk UMKM. Terkait TKDN, Presiden mengamanatkan kewajiban pembelian produk dalam negeri dengan TKDN minimal 25% pada PBJ Pemerintah, apabila terdapat produk dalam negeri dengan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%.

Meskipun terdapat banyak faktor yang mempengaruhi sektor industri, pada masa liberalisasi ekonomi antara tahun 2000 hingga 2006, sektor industri/manufaktur domestik secara stabil memberi kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 27% hingga 28%. Namun, pada era proteksi produk lokal di antara tahun 2009 hingga 2023, kontribusi sektor manufaktur ke PDB justru terus menurun dari 26% pada tahun 2009 menjadi hanya sekitar 18% pada tahun 2023.

Tren kontribusi manufaktur ke PDB pada gambar di atas menunjukkan bahwa sektor industri yang seharusnya menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi kurang berkembang. Islami & Hastiadi (2020) bahkan berpendapat bahwa Indonesia



Grafik Kontribusi Sektor Industri ke PDB tahun 2000 s.d. 2023
Sumber : BPS



Grafik Persentase Laju Pertumbuhan PDB dan Manufaktur Tahun 2000 s.d. 2023
Sumber : BPS

mengalami gejala deindustrialisasi. Menurut mereka, deindustrialisasi di Indonesia termasuk fenomena kemunduran industri yang terlalu cepat. Prematurnya kemunduran industri di Indonesia ini merupakan salah satu sebab mengapa ekonomi Indonesia tidak pernah tumbuh lebih dari 6% sejak tahun 2014.

Kemunduran Industri juga akan nampak jelas apabila kita membandingkan antara pertumbuhan ekonomi dan

pertumbuhan sektor manufaktur dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2023, pertumbuhan sektor industri tidak pernah melampaui pertumbuhan PDB Indonesia. Bahkan, pada tahun 2009 pertumbuhan industri sempat tumbuh minus 1,53% di saat ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 4%.

Untuk mengatasi gejala deindustrialisasi dan memperkuat sektor industri, pemerintah perlu mengambil langkah-

langkah strategis. Hal ini meliputi peningkatan investasi dalam sektor industri, perbaikan infrastruktur yang mendukung produksi dan distribusi, peningkatan kualitas produk dalam negeri agar lebih kompetitif di pasar global, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan pasar internasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mengatasi gejala deindustrialisasi dan memperkuat sektor industri sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.



Kemenkeu Dukung Gernas BBI/BBWI Tahun 2024

Penulis : Yelly Metasari & Tyta Hanistia Rizkimada
Foto : Ibnu Sudjono

Kementerian Keuangan mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara kegiatan *Harvesting* Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia dan Bangsa Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI) tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan. Gernas BBI/BBWI merupakan program yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan produk lokal serta pariwisata di Indonesia melalui peningkatan kepercayaan diri bangsa terhadap potensi dan kualitas produk buatan dalam negeri.

Terbentuknya program BBI/BBWI dilatarbelakangi oleh penurunan ekonomi yang disebabkan oleh penurunan kinerja UMKM, IKM, dan artisan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Presiden Republik Indonesia memulai program BBI secara nasional pada tanggal 14 Mei 2020, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia. Tim ini bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas di antaranya untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai target Gernas BBI, menyelaraskan program Gernas BBI dengan kampanye publik, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian target Gernas BBI, dan melaporkan data perkembangan Gernas BBI.

Dua tahun kemudian, program nasional ini diperluas dan diperdalam, dengan menambahkan aktivasi program Bangsa Berwisata di Indonesia atau BBWI. Aktivasi program BBWI ini dipicu oleh arahan presiden pada tanggal 29 Desember 2022 peningkatan wisatawan domestik, "*Saya titip mengenai wisata. Ajak masyarakat kita. Sekali lagi tolong masyarakat diajak, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Walikota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja. Kita ini punya daerah-daerah wisata yang baik, Bali, Labuan*

Bajo, Wakatobi, Toba, Raja Ampat, Bromo, Jogja, Babel, Borobudur, Jakarta dan lain-lainnya".

Pada awal terbentuknya, yakni pada tahun 2020, Gernas BBI dimulai dengan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan promosi secara online oleh Kementerian/Lembaga. Selanjutnya pada tahun 2021, kampanye Gernas BBI dilakukan dengan cara campuran (daring dan luring) di 13 Provinsi. Pada tahun 2022 dan 2023, Gernas BBI akan ditingkatkan melalui pelatihan dan pameran di 29 daerah secara offline dan online secara bergantian.

Hasil dari pelaksanaan program ini dalam kurun waktu kurang lebih 3,5 tahun (14 Mei 2020 s/d September 2023) adalah telah tercapai total jumlah UMKM/IKM onboarding sebanyak 22,9 juta unit atau terjadi peningkatan sebesar 186%. Berkaca pada hal tersebut, BBI 2024 memiliki tujuan untuk melakukan onboarding UKM/IKM/Artisan sebanyak 30 juta unit dengan transaksi minimal Rp50

miliar perdaerah, dan belanja PDN oleh K/L/PD minimal 95% dari APBN dan APBD. Adapun tujuan BBWI 2024 adalah tercapainya sejumlah 1,25-1,5 miliar perjalanan wisatawan domestik dengan potensi pendapatan pariwisata sebesar minimal Rp3.000,78 triliun.

Program Gernas BBI/BBWI ini dapat terealisasi dengan baik dan mencapai targetnya berkat sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini 29 Kementerian/Lembaga dan 34 Provinsi yang bekerjasama secara erat dengan berbagai pelaku industri, media, komunitas, akademisi, dan asosiasi. Salah satu rangkaian acara yang penting dalam pencapaian target BBI adalah acara panen atau *harvesting*.

Adapun acara panen/*harvesting* merupakan salah satu acara utama dari rangkaian Gernas BBI/BBWI 2024, yang disesuaikan dengan agenda HUT daerah. Dalam acara panen ini, UMKM, IKM, dan artisan di suatu daerah ditemukan dan diperkenalkan secara langsung kepada masyarakat dengan berbagai macam konsep kegiatan. Sebelum acara panen tersebut, terdapat rangkaian acara lainnya yang dilaksanakan sejak awal tahun 2024, dari pembukaan atau kick off Gernas BBI/BBWI 2024 yang dihadiri oleh seluruh daerah secara daring dan mengundang kementerian/lembaga, kepala daerah, dan top brand.

Dalam pelaksanaan program ini pada tahun 2024, terdapat *lesson learned* yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan peluang keberhasilan. *Lesson learned* atau evaluasi ini berdasarkan hasil kajian *white paper idea* terkait pelaksanaan BBI 2023.

Beberapa poin evaluasi di antaranya adalah pendekatan BBI saat ini masih terlalu generik atau kurang spesifik, serta cenderung rutinitas atau seremoni. Kemudian pelatihan berpotensi tidak tepat sasaran, jenis pelatihan relatif sama meskipun dilaksanakan oleh berbagai K/L atau Pemda, serta dihadiri oleh UMKM yang masih rendah dan UMKM dinilai kurang bankable. Adapun dari sisi perspektif masyarakat, mindset untuk mengutamakan produk lokal masih rendah dan engagement daerah untuk keberlanjutan cukup minim. Selanjutnya khusus untuk daerah timur, biaya logistik dan operasional dinilai tinggi.

Untuk itu, dalam menjawab tantangan dan menjawab evaluasi dari pelaksanaan Gernas BBI Tahun 2023 tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. Di antaranya adalah kegiatan agar mengarah kepada KPI, pembagian tugas K/L dan Pemda lebih spesifik dan berkelanjutan, Pemda agar untuk melibatkan top brand dalam diskusi teknis, identifikasi jenis pelatihan yang diperlukan, seperti literasi digital/onboarding, literasi keuangan, manajemen bisnis, maupun penyusunan laporan keuangan, penguatan pasar domestik dan mancanegara melalui jaringan perhotelan, retail, hingga pasar ekspor; serta penyediaan hub di kota besar dan dukungan logistik sebagai solusi untuk UMKM wilayah timur.

Kementerian Keuangan sebagai Campaign Manager mendukung kegiatan *Harvesting* Gernas BBI/BBWI dengan pembinaan maksimal kepada UMKM binaan Kementerian Keuangan di Sulawesi Selatan agar mampu

diminati dan dikenal dalam kancah nasional bahkan sampai Tingkat Internasional. Kegiatan ini diselenggarakan di Sulawesi Selatan bersamaan dengan HUT Sulawesi Selatan. Rangkaian acara berlangsung selama 4 hari dimulai dari tanggal 16-19 Oktober 2024 di Anjungan *City of Makassar*, Pantai Losari Makassar, dengan menampilkan beberapa kegiatan diantaranya:

- Pertunjukan budaya,
- Pameran UMKM dan
- Berbagai kompetisi yang diikuti dan dinikmati oleh seluruh lapisan Masyarakat di Sulawesi Selatan.

Upaya yang dilakukan oleh Kemenkeu dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan rangkaian acara tersebut salah satunya dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kemenkomarves, Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov Sulawesi Selatan, untuk melaksanakan *Harvesting* Gernas BBI/BBWI dengan mengadakan pameran/expo bagi UMKM di wilayah Sulawesi Selatan. Expo tersebut juga melibatkan Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Kemenkeu yang berada di wilayah Sulawesi Selatan.

Acara dibuka pada tanggal 16 Oktober 2024 oleh Bapak Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, yang dalam pidatonya menyampaikan bahwa Pemerintah Sulawesi Selatan mengedepankan program Gernas BBI/BBWI. Program ini memiliki makna strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor UMKM dan Pariwisata.



Foto : Ibnu Sudjono
Perwakilan Tim Kemenkeu Satu (Setjen dan Unit-Unit Eselon I) di Kota Makassar yang berpartisipasi dalam Booth Kemenkeu.

Dalam kegiatan *harvesting* Gernas BBI/BBWI pada acara ulang tahun Sulawesi Selatan ke-355, terdapat 50 booth dari UMKM binaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 30 booth UMKM Binaan Kemenkeu Sulawesi Selatan yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan KPTIK Makassar. Adapun produk - produk yang ditampilkan pada pameran oleh UMKM tersebut yaitu produk kerajinan tangan, kuliner, kecantikan, busana, selain itu ada juga layanan untuk Masyarakat, seperti layanan kependudukan, Imigrasi, Pengadaan Barang/ Jasa, Kesehatan dan lainnya.

Salah satu *booth* kemenkeu pada kegiatan tersebut yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa (UKPBJ). UKPBJ Kemenkeu berkontribusi dengan membuka booth layanan pengadaan dengan memberikan informasi layanan pengadaan barang/ jasa, melakukan koordinasi dan memberikan kontribusi positif dalam akselerasi upaya transformasi digital pengadaan pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kegiatan Gernas BBI/BBWI merupakan agenda tahunan berskala nasional yang telah memberikan kontribusi baik di bidang ekonomi, pariwisata, maupun pengadaan barang dan jasa khususnya untuk membangun sinergi antar pemangku kepentingan dari berbagai pihak mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pemangku kepentingan lainnya.

Acara penutupan diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2024, dengan memberikan penghargaan kepada 15 UMKM *Champion* Gernas BBI yang telah dilakukan kurasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Pemrov Sulawesi Selatan dan telah mendapat rekomendasi dari Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. UMKM ini telah mendapatkan pembinaan baik dari Kemenkeu maupun dari Pemrov Sulawesi Selatan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan baik oleh Kemenkeu Provinsi Sulawesi Selatan maupun oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Penghargaan diberikan atas kategori kebugaran dan kecantikan, kuliner, *fashion*, dan kriya.

Penghargaan di antaranya diberikan oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan dan Perwakilan Pejabat dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Selatan. UMKM yang menerima piagam penghargaan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Kategori Kuliner
 - a. UMKM Surya Mandiri Sejahtera
 - b. PT Tani Abadi Nusantara
 - c. CV Luhur Abadi
 - d. PT Climera Sukses Bersama
 - e. Kopi 1000 Nurhidayah.
2. Kategori Kriya:
 - a. Atap Konjo
 - b. PT Karya Rappo Indonesia
 - c. Souvenir Bugis Bittara Art
 - d. Melodi Rajut, dan
 - e. Rama Craft.
3. Kategori *Fashion* Modesta
 - a. Butik dan Jahit Eka Majid
 - b. Nabila Fashion
 - c. Fenisha 05
 - d. Aufara Rumah Jahit, dan
 - e. Marika Batik.

Penghargaan diberikan kepada sejumlah UMKM di Sulawesi Selatan untuk memacu produksi produk lokal dan kegiatan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam program Gernas BBI/BBWI 2024 dalam rangka peningkatan devisa negara, pengurangan impor dan tentunya peningkatan perekonomian di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan.

Akhir kata, mengutip pada website kemenkeu.go.id, Kementerian Keuangan berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Selain berpartisipasi melalui program Gernas BBI/BBWI, Kemenkeu juga berperan melalui kebijakan fiskal, akses pembiayaan inklusif, dan dukungan digitalisasi. Contoh konkret yang dapat disebutkan adalah pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Dana Bergulir Ultra Mikro (UMi), yang memberikan kemudahan akses modal dengan bunga rendah, dan kebijakan perpajakan yang lebih sederhana dan ringan yang diberikan untuk UMKM. Hal tersebut mencerminkan komitmen Kemenkeu dalam mengoptimalkan UMKM sebagai penggerak ekonomi yang berkelanjutan.

"UMKM Tangguh, Ekonomi Kokoh: Kemenkeu Mendukung Pertumbuhan Berkelanjutan!



Foto : Tyta Hanistia Rizkimada

INFO LAIN

Personal Branding Melalui Media Sosial: Menciptakan Image yang Konsisten di Media Sosial

Penulis : Dwi Citra Lestari

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi *platform* yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya sebagai sarana komunikasi dan hiburan, media sosial juga menjadi wadah untuk membangun personal branding atau ciri khas. Personal branding melalui media sosial penting bagi seseorang atau instansi yang sedikit banyak berkecimpung di dunia media sosial untuk mempunyai ciri khas yang kuat. Dengan kata lain, personal branding adalah sebagai apa kita ingin dikenal di media sosial.

Tujuan dari personal branding di media sosial memang beragam, mulai dari membuat dan menjaga citra baik hingga mencari keuntungan. Maka dari itu seharusnya setiap pengguna media sosial juga harus memahami pentingnya personal branding dalam kehidupan di dunia maya. Selain itu kesadaran untuk melakukan personal branding di media sosial setidaknya membuat para pengguna media sosial menjadi lebih baik dan lebih bijak dalam membagikan konten pribadi ataupun konten yang bersifat informatif.

Foto : Pinterest



Personal Branding ini akan sangat cocok diterapkan pada media social yang berbasis social networking dan media sharing. Beberapa contoh media sosial yang berfokus pada *social networking* dan media *sharing* adalah Instagram, YouTube, Twitter/X, dan TikTok. Walaupun sebagai media sharing media sosial ini telah melahirkan berbagai profesi baru bagi pengguna yang dapat menarik ribuan hingga jutaan *like* dan tontonan dari pengguna lainnya atau yang sering disebut dengan *influencer*.

Beberapa tips untuk membangun *personal branding* di media sosial yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Buat konten sosial media yang unik namun positif atau berguna bagi pengguna sosial media lain, seperti *tutorial* membuat sesuatu atau *tutorial* memperbaiki sesuatu dengan alat sederhana dan mudah untuk diikuti.
2. Konsisten, yaitu selalu memberikan konten-konten dengan rajin dan masih dalam tema yang sama, karena konsistensi membuat konten akan menimbulkan persepsi masyarakat bahwa pemilik konten tersebut memang fokus untuk terjun di salah satu bidang konten sosial media yang dimiliki.
3. Selalu memberikan edukasi dalam setiap konten yang dibuat, hal tersebut akan menjadi nilai tambah bagi penonton

4. Menanggapi berbagai feedback dari para pengguna sosial media maupun pengikut akun yang dimilikinya, hal ini juga dapat menambah nilai plus bagi akun yang dimiliki karena komunikasi terjadi secara dua arah karena memberikan tanggapan, dan hal ini juga dapat membuat stigma bahwa pemilik akun sosial media tersebut terbilang ramah karena memberikan balasan atas tanggapan atau komentar yang diberikan.

Adapun manfaat yang dapat diambil jika personal branding kita lakukan di media sosial berhasil adalah pertama, kita bisa menunjukkan perbedaan diri kita dengan orang lain. Kedua munculnya kredibilitas yang membuat diri kita mendapat pengakuan di bidang keahlian yang kita miliki. Ketiga, menjadi bukti eksistensi diri kita di media sosial dan keempat yaitu membantu kita untuk dapat memperluas jaringan koneksi kita dengan orang lain. Sehingga pada akhirnya dengan personal branding melalui media sosial kita mampu untuk menunjukkan kelebihan atau kemampuan dengan lebih mudah dan luas jangkauannya.

Gimana, jadi apa kamu tertarik untuk membangun *personal branding* di media sosial?

Fomo dalam Pengambilan Keputusan

Penulis : Much Hari Cahyo

Apa itu Fomo?

Fomo merupakan singkatan dari *Fear of Missing Out*, yang berarti ketakutan akan kehilangan atau tertinggal. Istilah ini menggambarkan perasaan cemas atau khawatir yang muncul ketika seseorang merasa bahwa orang lain sedang mengalami sesuatu yang menarik, menyenangkan, atau penting, sementara mereka sendiri tidak ikut terlibat.

Fomo sering kali muncul karena pengaruh media sosial, di mana orang dapat dengan mudah melihat apa yang dilakukan atau dicapai oleh orang lain, seperti bepergian, menghadiri acara, atau mendapatkan sesuatu yang baru. Hal ini dapat memicu rasa iri, kecemasan, atau tekanan untuk ikut serta agar tidak merasa tertinggal. Takut ketinggalan tren terbaru, seperti *gadget* atau mode pakaian tertentu merupakan salah satu contoh dari situasi Fomo.

Fomo dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif fomo salah satunya dalam beberapa kasus, dapat memotivasi seseorang untuk lebih proaktif atau terlibat dalam aktivitas baru. Sedangkan, dampak negatif antara lain dapat menyebabkan stres, kurang percaya diri, atau keputusan impulsif (seperti membeli sesuatu tanpa berpikir matang). Untuk mengelola FOMO, penting untuk fokus pada prioritas pribadi dan menghargai momen yang sedang Anda jalani, daripada membandingkan diri dengan orang lain.



Ilustrasi : Artificial Intelligent

Fomo bisa saja muncul dalam sebuah instansi/kementerian dalam konteks pengambilan keputusan, kebijakan, atau strategi yang dilakukan untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan atau pemegang jabatan tidak tertinggal atau kehilangan peluang.

Berikut adalah beberapa aspek hubungannya:

1. **Pengambilan Keputusan yang terburu-buru**. Pemangku jabatan sering merasa perlu untuk segera mengambil tindakan atau mengikuti tren kebijakan yang dilakukan oleh instansi lain agar tidak terlihat tertinggal. Contohnya : Ketika kementerian lain mengadopsi teknologi baru atau memulai inisiatif besar, kementerian terkait mungkin merasa tertekan untuk melakukan hal serupa tanpa analisis yang matang.
2. **Kompetisi Antar-Instansi**. Fomo dapat memicu persaingan antarinstitusi. Pemangku kepentingan mungkin takut jika inovasi atau pencapaian instansi lain lebih unggul, sehingga mereka merasa harus segera menunjukkan pencapaian serupa untuk menjaga reputasi.
3. **Pencitraan dan Performa Publik**. Dalam era transparansi dan media sosial, instansi/kementerian sering mempublikasikan kegiatan atau inovasi mereka. Pemangku jabatan mungkin merasa khawatir jika publik melihat bahwa instansinya "kurang aktif" dibandingkan instansi lain, sehingga mereka terdorong untuk mengikuti arus meskipun belum memiliki persiapan memadai.

4. **Pembuatan Kebijakan yang Tidak Tepat Sasaran**. Fomo dapat menyebabkan pemangku kepentingan membuat kebijakan yang sifatnya mengikuti tren tanpa mempertimbangkan relevansi terhadap kebutuhan lokal atau dampak jangka panjangnya. Misalnya: Mengadopsi sistem digital tanpa pelatihan SDM memadai hanya karena tren digitalisasi sedang populer.
5. **Tekanan dari Pemangku Kepentingan Lain**. Fomo bisa diperparah oleh tekanan dari pihak eksternal, seperti politisi, masyarakat, atau media, yang mengharapkan instansi selalu up-to-date. Pemangku jabatan mungkin merasa perlu bertindak cepat untuk menjaga citra atau kepercayaan publik.

Lalu, Bagaimana Mengatasinya?

Pertama, Fokus pada Tujuan Strategis. Pastikan keputusan didasarkan pada kebutuhan dan visi jangka panjang, bukan sekadar mengikuti tren. Kedua, Evaluasi Mendalam : Setiap kebijakan atau tindakan harus melalui proses evaluasi dan analisis dampak terlebih dahulu. Ketiga, Prioritaskan Komunikasi Internal. Edukasi pemangku kepentingan bahwa inovasi atau perubahan harus relevan dan terukur, bukan sekadar pencitraan. Keempat, Kolaborasi, Bukan Kompetisi. Alih-alih merasa tertinggal, instansi bisa menjalin kerja sama untuk saling belajar dan berbagi pengalaman.

Fomo yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan keputusan yang kurang efektif dan membebani instansi dalam jangka panjang.

Membentuk Kekuatan, Membangun Kesehatan : Rahasia Weight Training Untuk Hidup Yang Lebih Baik

Penulis & Foto : Jeri Martin

Menemukan Kekuatan Di Balik Beban

Di era modern ini, di mana rutinitas kerja seringkali melibatkan duduk di depan layar selama berjam-jam, menjaga kesehatan fisik menjadi semakin penting.

Gaya hidup yang minim aktivitas fisik dan tekanan kerja yang tinggi dapat berdampak negatif pada tubuh dan mental. Di sinilah *weight training*, atau latihan beban, berperan sebagai solusi yang efektif. Lebih dari sekadar cara untuk membentuk otot, *weight training* menawarkan manfaat yang menyeluruh bagi kesehatan, mulai dari meningkatkan kekuatan fisik hingga mendukung keseimbangan mental.

Mengapa Weight Training Penting di Era Modern?

Dengan ritme hidup yang cepat, banyak dari kita kesulitan menemukan waktu untuk berolahraga. Namun, *weight training* bisa menjadi jawaban praktis dan efisien. Latihan ini tidak hanya membantu meningkatkan kekuatan otot dan tulang, tetapi juga membantu menjaga metabolisme tetap aktif, bahkan di tengah aktivitas yang cenderung pasif. Di era modern yang serba cepat ini, kemampuan untuk menjaga kebugaran dan stamina sangatlah penting, dan *weight training* memberikan manfaat jangka panjang yang relevan dengan tantangan zaman. Ditambah lagi, penelitian menunjukkan bahwa latihan beban membantu mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan osteoporosis menjadikannya investasi penting bagi kesehatan jangka panjang. Selain itu, *weight training* juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan mental. Di tengah



dapat membantu mengurangi kecemasan, meningkatkan suasana hati, dan memberikan perasaan pencapaian. Dengan begitu, *weight training* bukan hanya tentang tubuh yang lebih kuat, tetapi juga pikiran yang lebih sehat.

Manfaat Weight Training Untuk Kesehatan Fisik

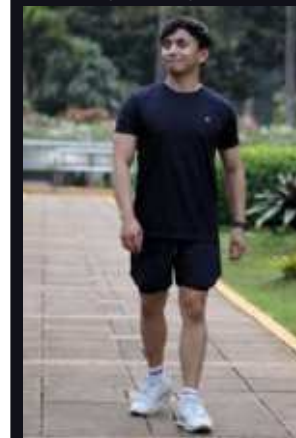
Latihan beban, atau *weight training*, telah lama dikenal sebagai salah satu bentuk olahraga yang paling efektif untuk menjaga kesehatan fisik. Tidak hanya untuk membentuk tubuh yang ideal, *weight training* juga memiliki banyak manfaat penting yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Berikut adalah tiga manfaat utama *weight training* yang dapat menjadi alasan kuat untuk mulai berlatih :

Meningkatkan Kekuatan dan Massa Otot. Salah satu manfaat paling jelas dari *weight training* adalah peningkatan kekuatan dan massa otot. Saat kita menantang tubuh dengan beban, serat-serat otot akan rusak dan, seiring waktu, memperbaiki diri dengan menjadi lebih kuat dan lebih besar. Proses ini tidak hanya membuat tubuh lebih bertenaga dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga membantu menjaga stabilitas dan keseimbangan, mengurangi risiko cedera. Bagi mereka yang ingin mempertahankan vitalitas seiring bertambahnya usia, latihan beban adalah kunci untuk menjaga fungsi fisik tetap optimal.

Kesehatan Tulang: Mengurangi Risiko Osteoporosis. *Weight training* bukan hanya tentang otot, tetapi juga tentang tulang. Latihan beban terbukti membantu

meningkatkan kepadatan tulang, yang sangat penting dalam mencegah osteoporosis, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Dengan menstimulasi pertumbuhan sel-sel tulang baru, *weight training* mampu memperkuat tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Ini menjadikannya salah satu cara paling efektif untuk menjaga kesehatan tulang sepanjang hidup, terutama bagi wanita yang lebih rentan mengalami penurunan kepadatan tulang setelah menopause.

Metabolisme dan Manajemen Berat Badan. Selain kekuatan otot dan kesehatan tulang, *weight training* juga memiliki peran besar dalam mengatur metabolisme tubuh. Latihan beban meningkatkan laju metabolisme basal (BMR), yang berarti tubuh akan membakar lebih banyak kalori, bahkan saat beristirahat. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin mengelola berat badan, karena *weight training* tidak hanya membantu membakar lemak saat latihan, tetapi juga mempercepat pembakaran kalori sepanjang hari. Dengan demikian, *weight training* dapat menjadi elemen penting dalam program pengelolaan



Dampak Positif Weight Training pada Kesehatan Mental

Weight training tidak hanya memberikan manfaat fisik yang nyata, tetapi juga memiliki efek luar biasa pada kesehatan mental. Bagi banyak orang, mengangkat beban adalah lebih dari sekadar aktivitas fisik ini adalah bentuk pelepasan emosi, perbaikan suasana hati, dan sarana untuk meraih kesejahteraan mental yang lebih baik. Berikut adalah beberapa dampak positif *weight training* bagi kesehatan mental yang dapat mengubah cara kita melihat latihan beban.

Mengurangi Stres dan Kecemasan Latihan beban memiliki kemampuan unik untuk membantu meredakan stres dan kecemasan. Saat kita berfokus pada gerakan dan teknik selama latihan, tubuh secara alami melepaskan endorfin, hormon yang bertindak sebagai pengurang stres alami. Endorfin ini membantu menciptakan perasaan positif dan rileks setelah sesi latihan yang intens. Bagi mereka yang menghadapi tekanan pekerjaan atau beban kehidupan sehari-hari, *weight training* bisa menjadi alat ampuh untuk meredakan ketegangan, memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk "beristirahat" dari stres yang mengganggu.

Meningkatkan Kepercayaan Diri dan Mood. Melewati batas-batas kekuatan fisik selama latihan beban bukan hanya memberi dampak pada tubuh, tetapi juga pada kepercayaan diri. Setiap kali kita mencapai target baru atau mampu mengangkat beban lebih berat, ada rasa pencapaian yang mendalam. Peningkatan

kekuatan fisik ini berbanding lurus dengan peningkatan perasaan percaya diri dan citra diri. Selain itu, latihan beban rutin membantu memperbaiki mood, menjaga stabilitas emosional, dan mengurangi gejala depresi. Seiring berjalannya waktu, kemampuan menguasai tubuh sendiri dalam latihan juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan perasaan kontrol dan keyakinan diri.

Latihan Beban Sebagai Terapi Mental. Bagi banyak orang, *weight training* menjadi lebih dari sekadar aktivitas olahraga ini menjadi terapi mental yang membantu mereka melalui masa-masa sulit. Proses berlatih dan berfokus pada peningkatan diri dapat menjadi jalan keluar dari pikiran negatif atau emosi yang tidak diinginkan. Latihan beban mengajarkan disiplin, fokus, dan ketekunan, yang semuanya berkontribusi pada ketenangan mental. Bagi sebagian individu, berlatih di *gym* atau di rumah menjadi momen refleksi pribadi, di mana mereka bisa melepaskan beban emosional yang mungkin tidak dapat mereka lepaskan di tempat lain. Sebagai terapi mental, *weight training* memberikan ruang untuk meraih keseimbangan antara tubuh dan pikiran.

Integrasi Weight Training Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Weight training sering kali dianggap sebagai aktivitas yang memerlukan waktu khusus dan perlengkapan lengkap di *gym*. Dengan sedikit kreativitas dan perencanaan, latihan beban sebenarnya bisa menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, bahkan bagi mereka yang memiliki jadwal padat. Berikut adalah beberapa



sehari-hari Anda, tanpa harus mengorbankan produktivitas kerja.

Latihan Beban di Rumah: Solusi untuk Pekerja Sibuk. Untuk pekerja kantoran yang sering kali terikat dengan jadwal ketat, latihan beban di rumah adalah pilihan yang efisien. Anda tidak perlu peralatan mahal atau ruang yang luas. Dengan hanya menggunakan *dumbbell*, *kettlebell*, atau *resistance bands*, latihan singkat 20-30 menit sudah bisa memberikan hasil signifikan. Bahkan, tanpa peralatan sekalipun, latihan dengan berat badan seperti *squat*, *push-up*, dan *plank* dapat membantu menguatkan otot inti dan membentuk postur tubuh yang lebih baik. Solusi ini memungkinkan Anda untuk tetap menjaga kesehatan fisik tanpa

Tips dan Trik Menggabungkan Latihan dengan Rutinitas Kerja. Menggabungkan *weight training* dengan rutinitas kerja bukanlah hal yang mustahil. Salah satu trik yang dapat dilakukan adalah melakukan "*micro workouts*" selama waktu istirahat atau di antara rapat. Misalnya, Anda bisa melakukan beberapa set *lunges*, *desk push-up*, atau bahkan *wall sit* di area kerja Anda. Jika bekerja dari rumah, manfaatkan jeda antar rapat untuk melakukan set latihan singkat. Pilihan lainnya adalah memulai hari dengan latihan ringan sebelum berangkat kerja atau beralih ke *gym* setelah jam kantor. Kuncinya adalah menyesuaikan latihan dengan waktu yang ada, bukan sebaliknya.

Membangun Kebiasaan.

aspek kehidupan, konsistensi adalah kunci dalam *weight training*. Latihan sekali atau dua kali tidak akan memberi hasil yang signifikan, namun latihan rutin, meskipun dalam durasi singkat, akan memberikan perubahan nyata. Mulailah dengan target yang realistis misalnya tiga kali seminggu selama 20 menit dan secara bertahap tingkatkan intensitasnya. Untuk menjaga motivasi, tuliskan jadwal latihan di kalender atau temukan teman latihan yang bisa saling mengingatkan. Dengan membangun kebiasaan, *weight training* akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Anda, mendukung kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang.

Cerita Inspiratif : Integrasi Weight Training di Tengah Kesibukan

Di tengah kesibukan sebagai pekerja kantoran, menjaga kesehatan tubuh sering kali menjadi tantangan besar. Namun, tiga narasumber kita, Arkhei Rahman S. (34), Ryan Octa Pradana (33), dan Niczen Henry L. (35), membuktikan bahwa dengan komitmen dan manajemen waktu yang baik, *weight training* (latihan beban) bisa menjadi bagian dari keseharian. Mereka berbagi cerita tentang motivasi, manfaat, serta tantangan dalam mengintegrasikan *weight training* ke dalam kehidupan yang padat, sekaligus memberikan tips bagi mereka yang ingin memulai.

training datang dari kebutuhan untuk menjaga kesehatan. Arkhei, ASN Kementerian Keuangan, termotivasi setelah hasil *Medical Check-Up* (MCU) tahunan yang menunjukkan kondisi kesehatannya cukup mengkhawatirkan. "Hasil MCU lumayan alarming, jadi saya mulai *weight training* untuk kebugaran tubuh," katanya. Sementara itu, Ryan dan Niczen, yang juga bekerja di bidang yang sama, memiliki motivasi serupa. Ryan ingin meningkatkan kebugaran dan menemukan bonus berupa postur tubuh yang lebih baik, sedangkan Niczen memulai *weight training* untuk menurunkan berat badan dan melatih ketahanan fisik serta mental.

Menyeimbangkan Latihan dengan Jadwal Kerja. Menyeimbangkan latihan dengan rutinitas kerja menjadi tantangan tersendiri. Arkhei menemukan cara untuk mengisi waktu sepuluhang kantor dengan latihan, sembari menunggu kemacetan berkurang. "Setelah pulang kantor, latihan membantu saya menghindari macet. Karena sudah terbiasa, hari libur bisa dihabiskan dengan istri dan anak," jelasnya. Bagi Ryan, *weight training* juga dilakukan setelah jam kerja agar tidak mengganggu kesibukan di kantor. Niczen, meskipun terkadang harus lembur, berusaha menjaga konsistensi dengan membuat jadwal yang teratur untuk *weight training* dan kardio.

Manfaat Fisik dan Mental yang Dirasakan. Manfaat fisik dari *weight training* memang sudah dirasakan oleh ketiga narasumber kita. Arkhei merasakan tubuhnya lebih segar meskipun berat badan



tidak banyak berubah. "Good mood after training itu luar biasa. Bikin mental jadi lebih kuat," katanya. Ryan pun merasakan manfaat berupa peningkatan massa otot dan pembakaran lemak, serta perasaan bahagia. Niczen, yang sudah berlatih sejak 2022, merasa lebih termotivasi dan percaya diri. "Tubuh lebih ideal, dan saya lebih semangat bekerja. Ini juga jadi inspirasi bagi orang lain," jelasnya.

Tantangan yang Dihadapi. Konsistensi menjadi tantangan terbesar bagi ketiganya. Bagi Arkhei, hari-hari dengan beban kerja tinggi kadang membuatnya malas berlatih. Namun, dukungan dari keluarga dan teman-teman sangat membantunya tetap konsisten. Ryan juga merasakan hal yang sama. Menurutnya, konsistensi dalam menjaga waktu latihan, istirahat, dan pola makan adalah kunci, terutama untuk terus termotivasi. Niczen pun menekankan pentingnya menjaga konsistensi setelah mencapai "body goals, berhenti sekali saja, sulit untuk memulai lagi. Tantangannya adalah godaan makanan tidak



sehat".

Tips untuk Memulai Weight Training.

Bagi mereka yang baru ingin memulai weight training, Arkhei menyarankan untuk tidak menjadikan latihan sebagai kewajiban, tetapi sebagai hiburan yang positif. "Gunakan fasilitas kantor yang ada, dan tonton video dari media massa untuk mendapatkan inspirasi. Channel Ade Rai di YouTube bisa jadi referensi yang bagus," katanya. Ryan menambahkan bahwa *weight training* bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. "Yang penting mulai aja dulu, jangan ragu untuk belajar gerakan sendiri atau minta diajari," ujarnya. Niczen juga memberikan tips untuk menciptakan lingkungan yang mendukung latihan. "Kita butuh ekosistem yang *support* kita untuk tetap berolahraga, baik itu dari teman, lokasi, atau jadwal yang konsisten," tambahnya.

Weight training bukan hanya tentang membangun otot, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Dari memperkuat tulang, meningkatkan metabolisme, hingga menjaga kesehatan mental, latihan beban menawarkan berbagai manfaat yang sangat berharga, terutama bagi mereka yang menjalani gaya hidup sibuk. Dengan integrasi yang tepat dalam rutinitas harian, *weight training* bisa dilakukan di rumah, kantor, atau di mana pun, tanpa memerlukan waktu yang berlebihan.

Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai membangun kekuatan dan kesehatan Anda. Tak perlu menunggu momen yang sempurna—mulailah dengan langkah kecil dan konsisten. Jadikan *weight training* sebagai bagian dari perjalanan menuju tubuh yang lebih kuat, pikiran yang lebih sehat, dan kehidupan yang lebih baik. *Let's lift, grow, and thrive!*

Kenapa Harus Liburan ke Dieng?

Penulis & Foto : Yelly Metasari

Dieng adalah salah satu objek wisata di Indonesia yang sangat mempesona. Dieng berlokasi di Wonosobo, Jawa Tengah. Wisata Wonosobo ini terkenal karena memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa, yang memberikan berbagai pilihan wisata bagi pengunjung. Mulai dari gunung yang menantang untuk didaki, air terjun yang indah, hingga taman yang menyajikan pemandangan alam yang begitu memukau.

Dieng merupakan kawasan dataran tinggi yang berada lebih dari 2.000mdpl. Dieng merupakan daerah pegunungan, sehingga udaranya dingin dan sejuk. Suhu di

Dieng berkisar antara 12-20°C di siang hari, dan pada malam hari berkisar 6-10°C. Pada musim kemarau suhu di Dieng dapat turun hingga 0°C. Pada bulan tertentu seperti bulan Juli-Agustus suhu di Dieng bisa mencapai -2°C. Pada Juli 2024 lalu, terdapat fenomena embun es. Kita dapat menikmati embun es pada waktu subuh di sekitaran Candi Arjuna, Dieng.

Perjalanan dari Jakarta menuju Dieng berkendara roda empat dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih kurang 9-12 jam dengan jarak tempuh sekitar 416km melalui Tol Cikopo-Palimanan. Untuk menuju Dieng dapat melalui Dieng alternatif jalur perjalanan yaitu:

1. Rute Via Gerbang Tol Pejagan
2. Rute Via Kajen
3. Rute Via Bawang dan Tol Kahyangan
4. Rute Via Semarang

Selama perjalanan menuju dieng, kita akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang indah dengan hamparan hijaunya pegunungan dibalut dengan udara yang dingin. Namun, perlu di waspadai jalanan yang menanjak dan berkelak-kelok di beberapa titik. Pastikan kondisi kendaraan kita baik. Objek wisata yang dapat kita kunjungi selama di Dieng adalah Kawah Sikidang, Bukit Sikunir, Candi Arjuna, Air Terjun Sikarim, Argowisata Kebun Teh Tambi, Telaga Menjer, Waduk

Wadaslintang, Arum Jeram Serayu, Telaga Warna, dan Batu pandang/Ratapan Angin.

Rata-rata tiket masuk kawasan wisata sekitar Rp10.000 s.d Rp20.000. Untuk kawasan Candi Arjuna, HTM Rp20.000, ini sudah termasuk tiket masuk Kawah Sikidang. Selain itu kita juga dapat menyewa jeep untuk mengelilingi objek wisata di Dieng. Sebagai Gambaran, untuk zona 3 dikenakan biaya sekitar Rp850.000 dengan rute: Air Terjun Sikarim Dieng - Swiss Van Java Dieng - Telaga Menjer Dieng - Kebun Teh Panama Dieng - Pintu Langit Skyview.

Keindahan *Golden Sunrise* dari atas bukit sikunir menjadi tujuan utama berwisata Dieng. Kita dapat melihatnya indahnya pemandangan matahari terbit dari atas bukit sikunir. panorama sunrise yang indah ini terletak di desa tertinggi yang ada di pulau jawa yaitu Desa Sembungan, Dieng. Jarak tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai puncak sikunir sekitar 30 s.d. 60 menit,

tergantungan kondisi fisik kita. Dari puncak sikunir selain menikmati keindahan matahari terbit, kita juga dapat menikmati keindahan telaga cebong.

Selain terkenal dengan keindahan alamnya, Dieng juga terkenal dengan kelezatan kuliner tradisionalnya. Beberapa makanan khas dieng antara lain, Mie Ongklok, Sego Megono, Carica, Opak, Tempe Kemul dan Soto Golak. Salah satu makanan yang paling diminati oleh wisatawan adalah Mie Ongklok. Mie ini terbuat dari tepung terigu yang diolah menjadi mie yang kenyal dan lembut. Mie Ongklok disajikan dengan kuah yang kental. Diberi potongan ayam, jamur, dan irisan bawang goreng. Biasanya dapat dimakan dengan tambahan sate ayam atau sate kambing. Rasanya yang gurih dan hangat sangat cocok dinikmati di udara dingin.

Liburan tentu saja tidak cukup bila hanya 1 malam saja, disarankan lebih dari 1 malam, karena banyak sekali objek wisata yang harus dikunjungi, mencicipi kuliner yang lezat. Beberapa tempat menginap di Dieng yang bisa di jadikan alternatif bagi wisatawan ketika berkunjung

ke dieng dengan pemandangan ladang kentang, perbukitan atau telaga antara lain:

1. Farmhouse luxury villa by Efic villa dieng. Villa ini bersih, sekompak dengan *cafe* efic yang menawarkan sajian ala *cafe modern*. Rate sekitar 1,5jt per villa. Lokasi Masuk jalan kecil. Fasilitas yang diberikan selain *mini kitchen* ada *barbeque* dan menariknya kita bisa melihat domba batur yang nantinya dibantu oleh penjaga villa untuk bermain dan memberi makan domba.
2. Omah lumbung, lokasinya ada di dieng *garden* taman kita, dekat candi arjuna. Berada di Jalan utama Dieng. Omah lumbung menawarkan pemandangan menarik berupa taman bunga dan taman stroberry. Fasilitas yang diberikan berupa tempat tidur 2 *bed* besar ukuran Sedang. Terdapat beberapa lumbung yang dapat diisi 4 orang. Selain itu disediakan TV, peralatan masak mini dan kamar mandi dalam. *Rate*-nya berkisar 1 juta per lumbung.
3. Efic villa 1 Dieng. Lokasinya dari titik 0 dieng, rutenya ikuti jalan batur, pertigaan arah puskesmas. Masuk gang kecil. Villa ini berupa rumah dengan

- beberapa kamar. Dapat diisi 12 orang. *Rate*-nya sekitar 1,8jt per malam.
4. Sikapuk *hills*, lokasinya bergabung dengan objek wisata sikapuk, berada diatas bukit, menyuguhkan pemandangan yang luar biasa dan bisa melihat matahari terbit.
 5. Edge Premium villa, penginapan 4 kamar, ada kolam renang dengan *view* telaga menjer. Untuk menginap disini perlu *booking* di *website*-nya, karena termasuk sangat laku bila di musim liburan tiba.
 6. Villa pintu langit, lokasinya melewati jalan menanjak. Namun jalanannya cukup mulus. Parkiran lumayan luas. Di dalam villa terdapat 2 tempat tidur di lantai 1 dan di lantai 2 ada 1 tempat tidur, tidak ada kamar tertutup. Cocok untuk rame-rame.
 7. Umma cabana villa, *rate*-nya 1.2jt per malam. Tipe 3 *bed*, Akses Lokasi villa masuk dari *cafe* pintu langit dan bila gratis mengunjungi objek wisata pintu langit.
 8. Penginapan madina dieng, *rate*-nya 600rb untuk 4 orang
 9. Royal Cabin dieng, *rate*-nya 1,2jt per malam. *View*-nya ladang, Lokasi ada di jalan utama. Terdapat fasilitas *barbeque*, dan *trip jip*
 10. Tani house, dengan rate 1,3jt per malam. Villa dengan bangunan kayu. Terdapat fasilitas *bath tub* jadi anak-anak bisa berendam dan *kitchen mini*.
- Tips liburan ke Dieng:
1. Cek Kondisi Kendaraan, pastikan dalam kondisi prima, karena akses menuju Dieng cukup berliku dan menanjak.
 2. Obat-obatan Pribadi, pastikan membawa obat-obatan pribadi, terutama obat flu dan demam, karena Ketika kita terbiasa dengan suhu Jakarta yang panas, lalu masuk ke wilayah dieng yang dingin, akan menimbulkan adaptasi suhu badan yang drastis.
 3. Pakaian Hangat, pastikan kita membawa pakaian hangat, seperti jaket yang tebal, topi kupluk, sarung tangan dan kaos kaki.
 4. Makanan Ringan dan Minuman, Bawa makanan ringan dan minuman secukupnya, karena biasanya bila udara dingin, kita akan lebih sering nyemil makanan.
- Liburan menjadi salah satu agenda rutin yang dapat menyegarkan pikiran. Padatnya rutinitas harian yang menyita waktu, tenaga dan pikiran membuat liburan menjadi obat yang dapat menyembuhkan kejenuhan, kita manusia membutuhkan liburan untuk mengumpulkan energi kembali sehingga dapat Kembali beraktifitas dengan professional dan maksimal.
- "Dunia ini tidak hanya selalu meja kerja. kita harus ambil cuti untuk liburan!", so rencanakan liburanmu ke Dieng segera ya, nikmati pemandangan alam, sejuknya udara dingin dan makanan yang lezat di Dieng.*





Rammang-Rammang, Wisata Eksotis di Maros.

Penulis & foto : Yelly Metasari

Gerakan Nasional Bangsa Berwisata di Indonesia atau Gernas BBWI yang saat ini sedang populer digalakkan oleh pemerintah Indonesia membuat banyak wisata di Indonesia digaungkan pada kancah nasional maupun Internasional. Salah satunya adalah objek wisata Rammang-rammang.

Sudah beberapa kali ke Makassar namun baru mendengar wisata Rammang-rammang, ya, ini ada adalah objek wisata yang dibuka sekitar tahun 2015 dan di Tahun 2020 ditetapkan sebagai Geopark oleh UNESCO. Kawasan wisata Rammang-rammang merupakan wilayah karst terbesar kedua di dunia setelah Cina selatan dengan luas sekitar 45.000 hektar. Pegunungan karst ini terdiri dari batu kapur, tebing, gua, lembah, dan sungai.

Rammang-rammang artinya kabut atau awan. Suasana pagi hari atau ketika habis hujan daerah ini akan berkabut seperti tumpukan awan yang indah. Kawasan objek wisata ini berada di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Perjalanan dari kota Makassar menuju Rammang-



rammang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam dengan jarak tempuh sekitar 43km berkendara dengan mobil.

Keindahan pegunungan karst dapat kita nikmati sepanjang perjalanan dengan menaiki perahu. Kita dapat menyewa perahu di dermaga awal dengan biaya Rp200.000-Rp300.000/ perahu yang dapat diisi 5-8 orang penumpang. Perahu kecil ini disebut dengan perahu Jolgoro yang dicat warna warni sehingga menarik mata pengunjung. Sepanjang jalan melintasi Sungai Puteh kita akan disuguhkan dengan pemandangan batu kapur yang menjulang tinggi, beberapa gua, membelah rawa-rawa dengan

air yang hijau jernih. Kanan kiri di penuh pohon nipah dan beberapa tanaman bakau. Terkadang kita akan menemukan ular air yang melintas atau biawak, suasananya khas di hutan tropis yang tenang dan eksotis.

Perjalanan kurang lebih 20 menit dari dermaga awal, kita tiba di dermaga Kampung Berua, sebuah desa wisata yang terdapat beberapa gua antara lain Goa Kristal, Goa Berlian, Padang Ammarung, Batu Kingkong atau situs Pasaung, dan Goa Karst. Jika kita memulai perjalanan berjalan kaki santai dari dermaga dan mengelilingi kampung berua, kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Lumayan

untuk memanjakan mata dengan pemandangan alam yang luar biasa yaitu situs prasejarah yang menampilkan lukisan dinding berusia ribuan tahun. Sebaiknya mengunjungi rammang-rammang saat musim kemarau di pagi hari atau sore hari. Bila siang hari cuaca dilokasi cukup panas, pengunjung dapat menyewa topi di depan dermaga awal dengan taris Rp5000-Rp10.000/topi.

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengidentifikasi Rammang-rammang sebagai tempat wisata yang sangat menjanjikan untuk peningkatan perekonomian pemerintah setempat. Banyak potensi alam yang masih dapat digali di objek wisata ini. Diperlukan usaha pemerintah baik lokal maupun nasional untuk merencanakan

bentuk pembangunan dan pengembangan wisata Rammang-Rammang sehingga namanya semakin mendunia. Pengembangan infrastruktur seperti akses perbaikan jalan menuju Lokasi dan perbaikan fasilitas seperti toilet, rumah ibadah dan tempat beristirahat bagi pengunjung. Usaha promosi wisata untuk pengembangan ekowisata juga dapat dilakukan dengan memberdayakan komunitas lokal dan nasional kemudian melakukan pelatihan dan edukasi bagi penduduk setempat sehingga dapat mengelola dan mengembangkan potensi wisata Rammang-rammang seperti manajemen tempat makan, homestay dan pemandu alam.

Rammang-rammang merupakan objek wisata di

Sulawesi Selatan yang unik karena bukit karst nya yang berada diantara sungai dan persawahan. Jangan lewatkan spot photogenic seperti tebing karst, terusan sungai puteh di Tengah rimbunan daun nipah, hutan batu gamping yang berongga yang terdiri dari batu abu kehitaman dan putih yang tersusun secara alami dengan indahnya, stalagtit yaitu kerucut yang menggantung di langit gua dan stalagmit yaitu kerucut yang berada di lantai gua berlian yang memantulkan Cahaya.

Jadi untuk sobat PASTI Kemenkeu jangan lewatkan pesonanya, Ketika berkunjung ke Makassar sempatkan mampir dan nikmati keindahan objek wisata Rammang-rammang ya!



INFO EVENT



Juara I

Cabang Olahraga Basket Putra dalam Perlombaan Olahraga Setjen Road to HORI Tahun 2024



Juara 3

Cabang Olahraga Voli Putra dalam Perlombaan Olahraga Setjen Road to HORI Tahun 2024

Juara 2

Cabang Olahraga Badminton Kategori Perorangan dalam Perlombaan Olahraga Setjen Road to HORI Tahun 2024



Juara 2

Cabang Olahraga Catur Kategori Beregu dan Perorangan dalam Perlombaan Olahraga Setjen Road to HORI Tahun 2024



Juara 3

Cabang Olahraga Tenis Meja Kategori Beregu dan Perorangan Putri dalam Perlombaan Olahraga Setjen Road to HORI Tahun 2024

Foto : Dokumentasi Humas Setjen



INFO FOTOGRAFI

*Sebelum Matahari Terbenam di
Rammang-Rammang*

Much Hari Cahyo

Pelaksana pada Biro Manajemen BMN dan
Pengadaan

Informasi Kamera :

Iphone 14 | 13mm | ISO 100 | f2.4 | 1/125s

Editing : Adobe Lightroom

Lokasi : Rammang-Rammang, Maros.

info Pasti

MEDIA INFORMASI PENGADAAN DAN ASET TERKINI